

LAPORAN PEREKONOMIAN **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

AGUSTUS 2021





Foto: Bintang Laut Pulau Segajah, Kota Bontang

KATA PENGANTAR

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini berisi informasi terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian ke depan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi *stakeholders* terkait dalam melakukan perumusan kebijakannya.

Secara umum, kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan II 2021 menunjukkan tren perbaikan pasca kontraksi yang dialami pada triwulan-triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2021 tercatat tumbuh sebesar 5,76% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 2,96% (yoy). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya aktivitas dan mobilitas domestik di tengah permintaan global yang masih solid dan harga internasional berbagai komoditas utama yang masih tinggi. Ke depan, perekonomian Kaltim diperkirakan kembali membaik yang ditopang oleh membaiknya permintaan global serta turut didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat serta iklim dan kinerja investasi yang lebih positif dari sisi domestik.

Analisis pada laporan ini menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari kegiatan laporan, survei, dan *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga menggunakan berbagai data sekunder dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak eksternal, baik dari kalangan Pemerintah maupun swasta. Untuk itu Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, hubungan kemitraan strategis yang terjalin baik selama ini dapat terus dan bahkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas laporan ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya menuju Indonesia maju.

Samarinda, Agustus 2021
**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ttd.

Tutuk S.H. Cahyono
Kepala Perwakilan

VISI BANK INDONESIA

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia;
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
VISI BANK INDONESIA	4
MISI BANK INDONESIA	4
NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GRAFIK.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	13
RINGKASAN EKSEKUTIF	17
I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	26
1.1 Gambaran Umum.....	27
1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha.....	30
1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	41
BOKS I.1	54
BOKS I.2	65
II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	72
2.1 Gambaran Umum.....	73
2.2 APBD Pemerintah Provinsi	76
2.3 APBD Kabupaten/Kota	82
2.4 APBN di Wilayah Kaltim	85
III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	87
3.1 Gambaran Umum.....	88
3.1.1 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	89
3.1.2 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kota IHK	92
3.1.3 <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan III 2021	93
3.2 Program Pengendalian Inflasi Daerah.....	96
IV. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	99
4.1 Gambaran Umum.....	100
4.2 Stabilitas Keuangan Daerah	100
4.2.1 Asesmen Sektor Korporasi	100

Asesmen Sektor Rumah Tangga.....	104
4.2.2 Asesmen Sektor Perbankan	107
4.3 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	111
V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	114
5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai di Provinsi Kalimantan Timur	115
5.1.1 Transaksi Sistem Pembayaran melalui Bank Indonesia	115
5.1.2 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) & E-Commerce.....	117
5.1.3 Program Digitalisasi Transaksi Keuangan dengan QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>)	120
5.1 Pengelolaan Uang Rupiah	122
VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	125
6.1 Gambaran Umum	126
6.2 Ketenagakerjaan	126
6.3 Kesejahteraan	132
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	138
7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi	139
7.2 Prospek Inflasi	141
DAFTAR ISTILAH	145
TIM PENYUSUN LAPORAN.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	30
Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Penggunaan (yoy)	41
Tabel I.3 Perkembangan Komoditas Ekspor Kaltim Jan–Jun’21	44
Tabel I.4 Perkembangan Ekspor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan Jan-Jun’21	44
Tabel I.5 Perkembangan Komoditas Impor Kaltim Jan-Jun’21	44
Tabel I.6 Perkembangan Impor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan Jan-Jun’21	44
Tabel II.1 APBD-P Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 & 2021.	73
Tabel II.2 Pagu Pendapatan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	74
Tabel II.3 Pagu Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2020 & 2021	75
Tabel II.4 Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	76
Tabel II.5 Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021	76
Tabel II.6 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021	77
Tabel II.7 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021	80
Tabel II.8 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021	82
Tabel II.9 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021 ...	83
Tabel II.10 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021	84
Tabel II.11 Realisasi Belanja APBN di Wilayah Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021	85
Tabel II.12 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahap II 2020 dan 2021	86
Tabel II.13 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I 2021	86
Tabel III.1 Inflasi Tahunan Kaltim (yoy)	91
Tabel III.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Triwulan I 2021 (yoy)	91
Tabel III.3 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (yoy)	92
Tabel III.4 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk Menurut Kelompok Barang (yoy)	92
Tabel III.5 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Semester I 2021	93
Tabel III.6 Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Semester I 2021	93
Tabel III.7 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan II 2021	98
Tabel IV.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	105
Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim	127
Tabel VI.2 TPT Provinsi di Kalimantan dan Nasional	128
Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim	130
Tabel VI.4 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim	130
Tabel VI.5 Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM	134
Tabel VI.6 Persentase Komoditas Non Makanan terhadap GKNM	134
Tabel VII.1 <i>Outlook</i> Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Kaltim	140
Tabel BOKS I.1. 1 Pangsa Produk Midstream dan Downstream Berdasarkan Skala	59
Tabel BOKS I.2. 1 Daftar KEK dan KI di Kalimantan Timur	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Pertumbuhan Tahunan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional	27
Grafik I.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan di Lapangan Usaha Utama Kaltim (%yoy).....	28
Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan di Berdasarkan Pengeluaran Kaltim (%yoy)	28
Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Nontambang..	29
Grafik I.5 Pangsa Pertambangan dan Nontambang	29
Grafik I.6 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan II 2021 Berdasarkan Lapangan Usaha*)	30
Grafik I.7 PDRB - LU Pertambangan	31
Grafik I.8 Produksi Batu Bara Kaltim.....	31
Grafik I.9 Pertumbuhan Produksi Batu Bara Perusahaan PKP2B dan IUP di Kaltim	32
Grafik I.10 Rerata Bulanan Curah Hujan Kaltim.....	32
Grafik I.11 Konsumsi Listrik Nasional.....	33
Grafik I.12 Harga Batu Bara Internasional	33
Grafik I.13 Kredit dan NPL Pertambangan Kaltim.....	33
Grafik I.14 PDRB - LU Industri Pengolahan	34
Grafik I.15 Perkembangan Ekspor Migas Kaltim.....	34
Grafik I.16 Pangsa PDRB Industri Pengolahan Kaltim berdasarkan sub kategori.....	34
Grafik I.17 Indeks Produksi Pupuk Kaltim	35
Grafik I.18 Indeks Produksi Methanol Kaltim	35
Grafik I.19 Pertumbuhan Harga CPO Internasional dan Bahan Kimia Organik	35
Grafik I.20 Pertumbuhan Harga Urea Internasional dan Kayu Lapis	35
Grafik I.21 Kredit dan NPL Industri Pengolahan	36
Grafik I.22 PDRB – LU Konstruksi	37
Grafik I.23 Pengadaan Semen Kaltim.....	37
Grafik I.24 Kredit dan NPL Konstruksi Kaltim	37
Grafik I.25 PDRB – LU Perdagangan	38
Grafik I.26 Suvei Penjualan Eceran Kaltim	38
Grafik I.27 Google Trends Tiga Pusat Perbelanjaan di Kaltim	39
Grafik I.28 Kredit dan NPL Sektor Perdagangan	39
Grafik I.29 PDRB – LU Transportasi dan Pergudangan	39
Grafik I.30 Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik Intra-Antar Kaltim	39
Grafik I.31 Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan utama Kaltim	40
Grafik I.32 Aktivitas Bongkar Muat di Bandara	40
Grafik I.33 PDRB – LU Penyedia Akomodasi dan Makan Minum.....	40
Grafik I.34 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Kaltim	40
Grafik I.35 Google Trends Café & Restoran di Kaltim.....	41
Grafik I.36 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan II 2021 Berdasarkan Penggunaan	41
Grafik I.37 Neraca Perdagangan Kaltim	42
Grafik I.38 Pertumbuhan Harga Komoditas Ekspor Kaltim	42
Grafik I.39 Neraca Perdagangan Migas Kaltim	43
Grafik I.40 Neraca Perdagangan Non Migas Kaltim.....	43
Grafik I.41 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Ekspor	45

Grafik I.42 Volume Ekspor Batu Bara Kaltim	45
Grafik I.43 Ekspor Batu Bara Kaltim ke Tiongkok	46
Grafik I.44 Produksi Batu Bara Tiongkok	46
Grafik I.45 Ekspor Batu Bara Kaltim ke India	46
Grafik I.46 Pertumbuhan Impor Batu Bara India dan Ekspor Batu Bara Australia	46
Grafik I.47 Volume Ekspor CPO Kaltim.....	47
Grafik I.48 Pertumbuhan Volume Ekspor CPO Ke Tiongkok dan Eropa.....	47
Grafik I.49 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Impor	48
Grafik I.50 Pertumbuhan Indeks Produksi Pupuk dan Methanol	48
Grafik I.51 Pertumbuhan Bongkar Bandar Udara	48
Grafik I.52 Volume Impor Barang Modal, Bahan Baku, dan Migas.....	48
Grafik I.53 Perkembangan PDRB - Investasi	49
Grafik I.54 Penanaman Modal di Sektor Primer	49
Grafik I.55 Impor Barang Modal, Ketel-Permesinan, dan Mesin-Perlengkapan Elektrik Kaltim	49
Grafik I.56 Impor Barang Modal dan Kendaraan/Alat Berat Kaltim	49
Grafik I.57 Perkembangan Kredit Investasi dan Modal Kerja Berdasarkan Lokasi Proyek di Kaltim	50
Grafik I.58 LS Investasi dan LS Kapasitas Utilisasi Liaison Bank Indonesia Kaltim	50
Grafik I.59 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi RT	51
Grafik I.60 Google Mobility Report	51
Grafik I.61 Kredit Konsumsi Kaltim	51
Grafik I.62 KPR, KKB dan Kredit Furnitur Kaltim.....	51
Grafik I.63 Indeks Keyakinan Konsumen Kalimantan Timur	52
Grafik I.64 PDRB-Konsumsi Pemerintah	53
Grafik I.65 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kaltim, Pemprov, dan Pemkab/Kot se-Kaltim	53
Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %).....	78
Grafik II.2 Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021 (dalam %)	78
Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim	79
Grafik II.4 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021 (dalam %)	82
Grafik II.5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim Triwulan II 2021	84
Grafik III.1 Inflasi Kaltim & Nasional	89
Grafik III.2 Perbandingan Inflasi di Kalimantan	89
Grafik III.3 Inflasi Kaltim berdasarkan Disagregasi Kelompok Pangan dan Transportasi.....	89
Grafik III.4 Perkembangan Harga Cabai Rawit Kaltim	90
Grafik III.5 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras Kaltim	90
Grafik III.6 Perkembangan Kasus Positif Covid-19 Harian Kalimantan Timur.....	95
Grafik III.7 Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Semester I 2021	95
Grafik III.8 Inflasi Tahunan Kaltim dan Nasional.....	96
Grafik III.9 Inflasi Bulanan Kaltim	96

Grafik IV.1 Volume Ekspor Batu Bara Kaltim.....	101
Grafik IV.2 Harga Internasional Batu Bara	101
Grafik IV.3 Pertumbuhan PDRB Kaltim Berdasarkan Pengeluaran Sektor Industri Pengolahan	102
Grafik IV.4 Harga Internasional CPO	102
Grafik IV.5 DPK Korporasi Kaltim	102
Grafik IV.6 Kredit dan NPL Korporasi Kaltim	102
Grafik IV.7 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim	103
Grafik IV.8 Komposisi DPK Korporasi Kaltim	103
Grafik IV.9 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim Berdasarkan Sektor	104
Grafik IV.10 Saldo Bersih Tertimbang Kondisi Dunia Usaha Sektor Industri Pengolahan	104
Grafik IV.11 Saldo Bersih Tertimbang Kondisi Dunia Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi dan Mamin	104
Grafik IV.12 Perkembangan NPL Korporasi Kaltim	104
Grafik IV.13 Indeks Keyakinan Konsumen Kaltim	105
Grafik IV.14 Indeks Kondisi Ekonomi Kaltim	105
Grafik IV.15 Perkembangan DPK RT Kaltim	106
Grafik IV.16 Perkembangan Komponen DPK RT Kaltim	106
Grafik IV.17 Pangsa DPK RT Kaltim	106
Grafik IV.18 Perkembangan Pembiayaan Rumah Tangga Kaltim	107
Grafik IV.19 Perkembangan Pembiayaan Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenisnya	107
Grafik IV.20 Perkembangan Omset Kendaraan Kaltim	107
Grafik IV.21 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional	108
Grafik IV.22 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Jenisnya	108
Grafik IV.23 Pangsa DPK Kaltim	108
Grafik IV.24 Perkembangan Pembiayaan Kaltim dan Nasional	109
Grafik IV.25 Perkembangan Pembiayaan Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan	109
Grafik IV.26 Pertumbuhan Pembiayaan Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	109
Grafik IV.27 Pangsa Pembiayaan Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim	109
Grafik IV.28 Perkembangan Pembiayaan dan NPL Kaltim	110
Grafik IV.29 Risiko Pembiayaan Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan	110
Grafik IV.30 Risiko Pembiayaan Spasial Kabupaten/Kota	110
Grafik IV.31 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim	111
Grafik IV.32 Perkembangan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim	111
Grafik IV.33 Perkembangan DPK Perbankan Syariah Kaltim	111
Grafik IV.34 Perkembangan Pembiayaan UMKM Kaltim	112
Grafik IV.35 Perkembangan Rasio NPL Pembiayaan UMKM Terhadap Total Pembiayaan Kaltim	112
Grafik IV.36 Komposisi Pembiayaan UMKM Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan	112
Grafik IV.37 NPL Kredit UMKM Kaltim	112
Grafik IV.38 Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	113
Grafik IV.39 Pangsa Pembiayaan UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	113
Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Nontunai Kalimantan Timur	116

Grafik V.2 Perkembangan Volume Transaksi Nontunai Kalimantan Timur (%yoy)	116
Grafik V.3 Transaksi Nontunai Kaltim Triwulan II 2021 Berdasarkan Instrumennya	116
Grafik V.4 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI Kaltim	116
Grafik V.5 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI Kaltim	116
Grafik V.6 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Kaltim	117
Grafik V.7 Perkembangan Volume Transaksi RTGS Kaltim	117
Grafik V.8 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit Kaltim	118
Grafik V.9 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit Kaltim	118
Grafik V.10 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit Kaltim	118
Grafik V.11 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit Kaltim	118
Grafik V.12 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik Kaltim	119
Grafik V.13 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik Kaltim	119
Grafik V.14 Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik Kaltim	119
Grafik V.15 Perkembangan Transaksi E-Commerce Kaltim	120
Grafik V.16 Pangsa Transaksi E-Commerce Kaltim berdasarkan Jenis Produknya	120
Grafik V.17 Jumlah QRIS di Masing-Masing Provinsi Kalimantan	121
Grafik V.18 Persebaran Jumlah Merchant QRIS di Kalimantan	121
Grafik V.19 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di Kaltim	121
Grafik V.20 Pengedaran Uang Kartal Kalimantan Timur ¹⁰	123
Grafik V.21 Uang Kartal Kalimantan Timur – Spasial	123
Grafik V.22 Penarikan Uang Tidak Layak Edar Kaltim	124
Grafik V.23 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap <i>Inflow</i> Kaltim	124
Grafik V.24 Temuan Uang Palsu Kaltim	124
Grafik VI.1 Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal	127
Grafik VI.2 Perbandingan TPAK Kalimantan Berdasarkan Provinsi	128
Grafik VI.3 Perbandingan TPAK Kalimantan Timur	129
Grafik VI.4 Perkembangan Penduduk Kaltim yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan	129
Grafik VI.5 Pangsa Penduduk Kaltim yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan	129
Grafik VI.6 Pangsa Tenaga Kerja Sektoral Kaltim	131
Grafik VI.7 Indeks Penjualan Riil Kaltim	131
Grafik VI.8 Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan	132
Grafik VI.9 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur	133
Grafik VI.10 Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur	133
Grafik VI.11 GKM dan GKNM Kaltim	133
Grafik VI.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	135
Grafik VI.13 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	135
Grafik VI.14 Perkembangan Rasio Gini Kalimantan Timur	136
Grafik VI.15 Perkembangan Rasio Gini wilayah Kalimantan	136
Grafik VI.16 Perkembangan NTP Kaltim	136
Grafik VI.17 Indeks Diterima dan Dibayar Petani Kaltim	136
Grafik VI.18 Perkembangan Rata-rata NTP Menurut Sektor Utama	137
Grafik VI.19 Perkembangan Harga TBS Kaltim	137
Grafik VII.1 Realisasi & Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2021 (% yoy)	141

Grafik VII.2 Realisasi & Prakiraan Inflasi Kaltim 2021 (% yoy)	142
Grafik BOKS I.1. 1 Pangsa Migas dan Batu Bara dalam Perekonomian Kaltim	55
Grafik BOKS I.1. 2 Proyeksi Demand Batu Bara Dunia	55
Grafik BOKS I.1. 3 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Indonesia.....	57
Grafik BOKS I.1. 4 Pangsa Produksi Sawit di Berbagai Wilayah Indonesia	57
Grafik BOKS I.1. 5 Pangsa Batu Bara & Kelapa Sawit dalam Perekonomian Kaltim	57
Grafik BOKS I.1. 6 Kuadran Produk Berbasis CPO Kaltim vs Wilayah Sawit Terdepan	59
Grafik BOKS I.1. 7 Perkembangan Harga Sawit Dunia	59
Grafik BOKS I.1. 8 Pemetaan Wilayah Produsen Hilirisasi Berbasis Sawit.....	60
Grafik BOKS I.1. 9 Perkembangan Hilirisasi Berbasis Sawit Berbagai Wilayah	60
Grafik BOKS I.1. 10 Pemetaan Grup Korporasi Sawit Kaltim, yang Sebagian Mengalami De- hilirisasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan	27
Gambar BOKS I.1. 1 Produksi dan Rantai Pasok Kelapa Sawit Provinsi-Provinsi di Indonesia	58
Gambar BOKS I.1. 2 Upaya yang Diperlukan untuk Mendukung Hilirisasi Sawit	63
Gambar BOKS I.2. 1 Peta Persebaran KEK, KI dan KPI di Kalimantan Timur	67
Gambar BOKS I.2. 2 Perkembangan Kawasan Ekonomi Tiongkok pada Masa Reformasi Ekonomi pada Tahun 1978 – 1990-an	68
Gambar BOKS I.2. 3 Integrasi Ekonomi Antar Wilayah Untuk Memperkuat Fungsi Kawasan	71

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Komponen PDRB	2018				2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
PDRB TOTAL	1,79	1,95	2,05	4,74	5,02	4,95	6,23	2,82	1,38	-5,35	-4,54	-2,83	-2,96	5,76
Berdasarkan Lapangan Usaha														
Pertanian	5,84	6,45	7,08	5,48	6,04	4,18	3,00	2,49	1,97	-2,33	-2,52	-1,62	-3,27	0,37
Pertambangan	-0,50	-0,41	-0,39	5,47	6,65	7,69	10,45	3,02	-0,43	-6,82	-6,67	-4,35	-3,93	5,58
Industri Pengolahan	0,27	0,43	0,67	0,42	-1,36	0,69	0,52	0,27	3,48	-7,55	-5,13	-1,82	-3,98	8,48
Listrik dan Gas	12,40	11,32	9,20	6,52	8,39	8,99	8,04	9,25	9,88	9,13	14,88	12,34	0,36	-5,44
Air	4,28	1,93	1,41	3,35	5,72	7,24	4,64	1,92	2,53	5,16	6,58	6,82	5,31	2,66
Konstruksi	3,97	3,83	10,66	13,68	14,87	6,05	2,34	0,92	0,86	0,84	-2,49	-4,09	-0,46	-0,83
Perdagangan	9,97	10,01	5,28	3,90	3,65	3,33	6,91	7,11	5,82	-1,11	-0,47	-0,32	-0,29	5,29
Transportasi dan Pergudangan	8,23	8,58	3,93	2,35	1,25	1,29	3,28	3,56	2,10	-16,72	-4,30	-3,20	-6,57	17,04
Akomodasi dan Makan Minum	9,06	11,29	7,37	7,19	7,10	4,76	6,38	7,27	5,86	-12,66	-6,71	-7,43	-8,90	12,19
Informasi dan Komunikasi	6,28	3,27	4,27	3,78	6,13	8,80	6,70	5,85	5,36	6,07	6,99	9,37	8,75	6,74
Jasa Keuangan	2,56	2,07	3,58	5,67	6,89	-2,91	-0,35	9,09	3,28	5,79	0,37	0,68	-2,97	3,69
Real Estate	6,96	6,59	3,53	2,35	1,09	0,15	3,74	3,52	3,38	1,49	0,01	-1,61	-2,60	-1,42
Jasa Perusahaan	7,51	9,56	1,32	1,64	-0,56	-3,18	6,65	5,46	2,52	-4,21	-4,72	-4,13	-4,59	6,29
Adm. Pemerintahan	7,14	5,80	3,30	3,85	3,82	-0,02	4,60	7,23	0,04	-1,98	-4,12	-9,24	-2,90	11,31
Jasa Pendidikan	8,54	9,27	6,49	4,43	5,00	2,56	3,13	4,46	0,32	1,03	5,65	5,11	8,07	7,19
Jasa Kesehatan dan Sosial	8,18	9,08	8,11	6,63	6,10	6,17	6,43	6,99	10,81	15,34	24,63	27,36	22,93	17,21
Jasa lainnya	6,76	10,56	10,41	10,45	9,69	7,04	7,09	7,93	5,39	-8,40	-4,38	-4,51	-3,80	8,03
Berdasarkan Pengeluaran														
Konsumsi Rumah Tangga	2,63	3,13	3,05	3,71	4,03	3,37	3,13	2,09	1,65	-2,34	-0,58	-0,46	-0,49	4,49
Konsumsi LNPR	9,51	7,23	12,47	8,56	8,53	7,51	7,77	3,33	-4,88	-3,12	-0,19	3,18	-0,02	0,12
Konsumsi Pemerintah	2,99	-0,34	21,11	8,04	5,15	-3,16	10,89	13,60	8,53	-0,85	1,77	-9,10	-0,33	12,39
PMTB	5,07	16,64	2,19	6,83	9,87	-1,29	5,89	5,22	0,62	0,84	0,32	-7,28	11,19	12,41
Ekspor*)					4,99	7,06	6,25	2,66	2,26	-6,30	-5,87	1,13	-8,19	8,91
Impor*)					6,97	4,96	5,26	3,99	3,12	-2,78	-2,94	3,42	-6,48	15,12

*)Sejak tahun 2020, perhitungan PDRB ekspor impor mengalami perubahan dari komponen ekspor luar negeri (LN), impor luar negeri (LN), dan net ekspor antar daerah (AD) menjadi komponen ekspor dan impor.

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

EKSPOR DAN IMPOR

Ekspor dan Impor	2018				2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
EKSPOR TOTAL	6,16	9,11	3,73	1,52	-9,36	-8,26	-11,80	-17,34	-8,67	-27,52	-32,03	-11,92	7,66	9,26
Ekspor Migas	-24,79	-13,88	-29,41	-18,74	-21,11	-53,88	-37,01	-37,72	-29,70	-29,19	-58,78	-60,42	-77,38	-41,71
Ekspor Nonmigas	16,56	16,39	14,40	7,83	-6,81	2,43	-6,79	-12,55	-4,81	-27,34	-28,44	-3,82	19,19	14,51
TOTAL IMPOR	72,35	26,37	49,82	31,38	-39,79	-45,17	-52,43	-44,46	13,32	-48,60	-40,03	-18,47	-38,65	85,38
Impor Migas	76,18	13,81	46,45	19,11	-61,03	-61,82	-62,53	-43,45	52,08	-60,24	-53,76	-71,57	-79,72	199,71
Impor Nonmigas	62,52	62,40	60,19	68,75	19,40	-11,71	-24,02	-46,65	-21,93	-38,48	-21,00	102,44	34,13	21,13

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

INFLASI

	2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kaltim	2,99	2,71	1,73	1,66	2,19	1,52	0,62	0,78	0,74	1,22
Samarinda	3,01	3,01	1,56	1,49	2,42	1,80	0,99	0,86	0,87	1,60
Balikpapan	2,97	2,97	1,94	1,88	1,89	1,16	0,12	0,66	0,57	0,71
Nasional	2,48	3,28	3,39	2,72	2,98	1,96	1,42	1,68	1,37	1,33
Kalimantan	3,31	3,11	2,64	2,41	2,36	1,44	1,13	1,37	1,13	1,41
Kalsel	3,08	3,99	4,04	4,01	2,81	1,03	1,04	1,68	2,02	2,37
Kalbar	3,50	3,03	3,09	2,37	3,16	2,07	1,74	2,46	1,02	0,69
Kalteng	3,83	2,89	2,27	2,45	2,22	1,88	1,43	1,04	1,02	1,35
Kaltara	4,74	3,10	2,46	1,47	0,15	-0,34	2,15	1,32	1,13	1,69

**)Sejak tahun 2020, perhitungan Inflasi Kaltim menggunakan SBH 2018*

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran	2018				2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
DPK dan ASET														
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	4,91	5,26	8,94	13,88	12,42	17,19	16,47	7,95	9,06	5,84	8,68	9,76	7,57	9,17
Giro	2,92	0,26	12,19	17,60	-0,47	36,67	31,23	18,23	24,01	-2,63	7,01	7,49	10,13	24,97
Tabungan	10,92	10,55	12,89	10,00	7,96	8,63	7,41	7,49	7,80	8,55	8,73	11,28	10,11	10,44
Deposito	-1,62	1,29	2,14	17,42	26,99	18,26	20,00	2,07	3,26	7,85	9,73	9,15	2,77	-1,72
Aset	5,99	4,18	5,53	11,74	8,95	16,90	13,01	10,84	9,25	4,33	8,22	5,23	4,95	4,72
KREDIT														
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	-0,02	5,67	9,80	16,72	6,47	9,50	8,43	12,91	18,40	8,18	5,14	-2,95	-4,54	-1,94
Non Performing Loans (Lokasi Proyek)	5,61	5,14	5,49	4,61	4,71	3,74	3,81	3,30	3,46	4,59	5,03	4,50	3,95	4,09
Berdasarkan Jenis Penggunaan														
Modal Kerja	12,24	16,00	17,57	21,99	0,99	9,02	8,10	13,16	17,42	3,65	-1,63	-10,48	-4,65	-2,19
Investasi	-11,36	-1,88	5,65	19,12	12,19	12,87	11,37	17,07	26,19	15,42	13,79	2,53	-5,54	-2,74
Konsumsi	5,93	5,42	6,21	5,67	4,86	4,34	3,75	5,07	5,64	1,75	-0,29	-1,05	-2,20	0,19
Berdasarkan Sektor Ekonomi														
Pertanian dan Kehutanan	-9,30	-7,99	-11,22	9,98	7,26	12,08	17,54	18,86	21,15	14,70	21,60	1,99	2,23	5,32
Perikanan	51,20	35,25	28,23	14,97	9,11	-12,64	-19,82	-14,26	-15,99	7,40	23,36	28,73	29,41	33,82
Pertambangan	19,34	48,06	71,91	83,55	12,65	25,80	13,20	24,00	49,84	17,54	-5,66	-15,29	-24,05	-25,29
Industri Pengolahan	-16,65	-13,87	-3,30	10,32	-14,46	0,33	-5,64	-40,65	-15,41	-41,06	-35,30	13,12	-4,00	20,24
Listrik, Gas dan Air	32,86	72,31	129,82	130,08	43,62	25,39	19,73	6,54	17,53	1,94	0,97	-3,55	-13,49	-4,94
Konstruksi	9,94	18,90	22,57	22,78	32,91	27,82	27,63	68,34	57,00	77,52	79,31	23,75	23,46	9,61
Perdagangan Besar dan Eceran	-0,75	5,84	4,55	-0,09	2,01	4,36	5,25	30,66	18,66	7,66	6,84	-11,09	0,05	5,07
Akomodasi dan Makan Minum	-3,71	-0,49	-2,32	0,58	2,34	-2,16	1,13	6,45	7,47	2,05	1,94	-0,55	-1,08	7,22
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	-1,10	2,41	8,13	12,54	-5,22	-9,37	3,22	0,91	8,22	2,12	-12,21	-11,05	-14,29	-8,94
Jasa Keuangan	-3,71	0,66	21,03	36,44	7,09	13,10	-14,08	-19,06	1,19	-5,70	-28,75	-33,33	-37,43	-39,15
Real Estate dan Jasa Perusahaan	-6,41	-0,14	5,76	6,89	10,47	9,87	1,95	21,10	20,81	8,30	-1,59	-21,10	-21,92	-27,63
Administrasi Pemerintahan	3,59	7,09	79,84	168,86	326,76	280,86	109,60	25,17	-21,35	-26,22	-84,55	-90,74	-89,79	-89,73
Jasa Pendidikan	7,96	-1,69	-10,33	-12,22	-2,23	10,72	50,75	87,73	97,54	84,48	29,41	5,39	-7,08	2,74
Jasa Kesehatan dan Sosial	17,88	16,44	22,16	23,82	38,17	36,14	44,27	34,11	13,36	8,44	-18,81	-29,06	-26,35	-26,38
Jasa Kemasyarakatan	-13,73	2,58	-4,21	14,26	16,65	15,20	15,69	18,06	11,53	7,27	1,02	-8,65	-7,98	7,52
Jasa Perorangan	-0,89	-9,45	-14,04	-18,31	-13,93	-5,67	0,91	1,30	0,71	4,94	30,07	11,70	7,67	34,61
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	330,51	-16,22	-35,33	-38,01	-54,33	-89,19	-84,25	-80,29	-67,88	452,25	291,18	115,97	49,87	-46,25
Rumah Tangga	5,93	5,42	6,21	5,67	4,86	4,34	3,75	5,07	5,64	1,75	-0,29	-1,05	-2,20	0,19
SISTEM PEMBAYARAN														
Inflow	-6,83	117,56	-26,22	18,62	16,93	17,64	11,31	5,93	-3,74	-34,83	-14,92	-30,96	19,34	13,34
Outflow	-4,09	6,24	17,71	11,75	6,11	-1,85	16,61	4,35	-11,54	-36,13	-33,24	2,02	-31,49	23,19
Net	-42,06	-40,76	-125,81	6,37	246,65	-32,08	66,10	2,97	46,97	-39,62	-147,94	31,66	218,21	51,76

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

AGUSTUS 2021

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan II 2021 melanjutkan tren perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan II 2021 melanjutkan tren perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas domestik di tengah permintaan global yang masih solid dan harga internasional berbagai komoditas utama yang masih tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2021 tercatat 5,76% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,96% (yoy). Dari sisi global, permintaan terhadap batu bara meningkat di tengah harga yang masih meningkat. Sementara itu, masih tingginya harga berbagai komoditas utama Kaltim mendorong kuatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terutama pada sektor primer dan pembangunan dan perluasan berbagai pabrik/instalasi pengolahan.

Lapangan usaha utama seperti pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sumber berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim di tengah kinerja konstruksi yang menurun.

Lapangan usaha utama seperti pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sumber berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim meskipun sedikit tertahan oleh kinerja lapangan usaha konstruksi yang mencatat kontraksi lebih dalam. Lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami perbaikan yang didorong oleh peningkatan produksi di tengah permintaan global yang menguat terutama Tiongkok dan India. Lapangan usaha industri pengolahan juga mengalami perbaikan yang didorong oleh membaiknya kinerja industri pupuk dan bahan kimia anorganik. Sementara itu, lapangan usaha perdagangan juga melanjutkan tren perbaikan sejalan dengan harga komoditas utama sebagai *source of income* yang masih berada pada level tinggi. Namun demikian, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh kontraksi yang lebih dalam pada lapangan usaha konstruksi.

Pada sisi penggunaan, meningkatnya kinerja investasi dan ekspor menjadi

Pada sisi penggunaan, meningkatnya kinerja investasi dan ekspor menjadi sumber utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim. Kinerja investasi (PMTB) tercatat membaik sejalan dengan

sumber utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim. meningkatnya pertumbuhan penanaman modal di sektor primer dan pembangunan dan perluasan sejumlah pabrik/instalasi pengolahan mulai dari biodiesel, kimia anorganik, hingga kilang migas. Perbaikan kinerja perekonomian Kaltim juga didorong oleh kinerja ekspor yang tumbuh meningkat. Meningkatnya kinerja ekspor didorong oleh permintaan batu bara yang solid dari negara tujuan utama terutama Tiongkok dan India, di tengah harga yang tetap melanjutkan tren peningkatan.

Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan II 2020, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. **Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami penurunan yang bersumber dari lebih rendahnya realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi.** Secara keseluruhan, realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi Kaltim sampai dengan triwulan II 2021 mencapai Rp3,61 triliun atau menurun 24,26% (yoy) (Tabel II.4). Sementara itu, realisasi belanja pemerintah di Provinsi Kaltim tercatat sebesar Rp2,8 triliun, menurun 3,05% (yoy).

Di tingkat provinsi, kinerja keuangan daerah menurun terutama akibat turunya realisasi nominal pendapatan Pemprov. **Di tingkat pemerintah provinsi, penurunan kinerja keuangan pada triwulan II 2021 terutama akibat rendahnya realisasi pendapatan.** Realisasi pendapatan triwulan II tahun 2021 mencapai Rp3,61 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan triwulan II tahun 2020 yang mencapai Rp4,77 miliar. Realisasi belanja Pemprov Kaltim triwulan II 2021 tercatat sebesar Rp2,80 triliun, lebih rendah 3,05% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II tahun 2020 yang mencapai Rp2,89 triliun. Menurunnya realisasi belanja pada triwulan II 2021 dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja modal dan belanja operasional yang masing-masing menurun hingga 65,56% (yoy) dan 23,76% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, kinerja keuangan daerah pada triwulan II 2021 mengalami penurunan secara nominal baik dari sisi pendapatan maupun belanja dibandingkan **Baik pendapatan maupun belanja 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan II 2021 mengalami penurunan secara nominal.** Sampai dengan triwulan II 2021, realisasi pendapatan di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim telah mencapai Rp7,88 triliun, lebih rendah 8,70% (yoy) dibandingkan dengan capaian triwulan II 2020 sebesar Rp8,63 triliun. Sementara itu, realisasi belanja pada

dengan periode yang sama di tahun 2020. triwulan II 2021 sebesar Rp6,63 triliun atau menurun 0,33% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2020 yang mencapai Rp6,38 triliun.

Penyerapan realisasi APBN di wilayah Kaltim hingga triwulan II 2021 menurun dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2020. Berdasarkan daerahnya, Kota Samarinda menjadi daerah dengan realisasi belanja APBN tertinggi dan Kab Bontang dengan realisasi belanja APBN terendah. **Realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan II 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.** Realisasi belanja APBN pada triwulan II 2021 tercatat sebesar Rp966,84 miliar. Secara nominal, nilai tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2020 yang tercatat sebesar Rp2,52 triliun. Berdasarkan daerahnya, Kota Samarinda memiliki pagu belanja APBN tertinggi dengan realisasi belanja sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp315,51 miliar. Pagu belanja APBN tertinggi kedua adalah Kota Balikpapan dengan realisasi sebesar Rp268,02 miliar. Sementara itu, Kota Bontang merupakan daerah dengan nominal realisasi belanja paling rendah yaitu sebesar Rp19,36 miliar.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 1,21% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,74% (yoy), meskipun masih di bawah inflasi nasional dan inflasi Kalimantan. **Inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 1,21% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,74% (yoy), meskipun masih di bawah inflasi nasional dan inflasi Kalimantan.** Inflasi Kaltim pada periode ini merupakan yang tertinggi selama pandemi terjadi, setelah empat triwulan terakhir selalu mencatat inflasi di bawah 1% (yoy). Walaupun demikian, angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 1,33% (yoy) dan angka inflasi rata-rata Kalimantan sebesar 1,41% (yoy). Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan permintaan dalam rangka momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2021.

Inflasi di Kalimantan Timur relatif rendah jika dibandingkan dengan sebagian besar provinsi lain di Kalimantan. **Kalimantan Timur menempati urutan kedua terendah untuk laju inflasi se-Kalimantan pada triwulan ini.** Inflasi yang terjadi di Kalimantan Timur relatif rendah jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara yang tercatat memiliki angka inflasi berturut-turut sebesar 2,37% (yoy), 0,69% (yoy) 1,35% (yoy) dan 1,69% (yoy). Berdasarkan kota IHK, baik

Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan keduanya mengalami peningkatan inflasi pada triwulan ini.

Tingginya tingkat inflasi pada triwulan II 2021 utamanya bersumber dari adanya peningkatan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau khususnya komoditas daging ayam ras, ikan layang dan cabai rawit.

Lebih tingginya tingkat inflasi pada triwulan II 2021 utamanya bersumber dari adanya peningkatan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau khususnya komoditas daging ayam ras, ikan layang dan cabai rawit. Pada triwulan II 2021, kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 2,74% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,30% (yoy). Hal ini utamanya disebabkan oleh aktivitas perekonomian masyarakat jelang Ramadhan yang secara historis selalu menunjukkan tren peningkatan khususnya dalam konsumsi bahan makanan. Memasuki bulan Ramadhan, harga sebagian besar bahan pokok utama seperti daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih dan cabai rawit secara historis mengalami kenaikan.

Berdasarkan spasial, kedua kota IHK di Kaltim mencatat peningkatan inflasi.

Berdasarkan kota IHK, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan keduanya mengalami peningkatan inflasi pada triwulan ini yang didorong oleh tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kota Samarinda tercatat mengalami inflasi sebesar 1,60% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,87% (yoy). Sama halnya dengan yang terjadi pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan inflasi dari semula 0,57% (yoy) menjadi 0,70% (yoy) pada triwulan II 2021. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan inflasi di dua kota tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Selama triwulan II 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah Kaltim terus meningkatkan koordinasi dan kegiatan dalam upaya mengendalikan harga dan menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan barang penting

Selama triwulan II 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah Kaltim terus meningkatkan koordinasi dan kegiatan dalam upaya mengendalikan harga dan menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan barang penting (bapokting) khususnya menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Selama bulan April 2021 setidaknya tercatat enam kali agenda *High Level Meeting* (HLM) yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah dalam rangka koordinasi stok persediaan bahan pangan menjelang Idul Fitri. HLM diselenggarakan oleh TPID Kota Samarinda, TPID Provinsi Kalimantan Timur, TPID

(bapokting) khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara, TPID Kabupaten Paser, TPID Kota menjelang HBKN Ramadhan Balikpapan dan TPID Kabupaten Berau. Beberapa agenda HLM tersebut dan Idul Fitri. kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan sidak pasar untuk memastikan mekanisme rantai distribusi berjalan secara efisien.

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan daerah Kaltim pada triwulan II 2021 terpantau membaik, 2021 terpantau membaik, yang bersumber dari membaiknya kinerja korporasi dan rumah tangga.

Stabilitas sistem keuangan daerah Provinsi Kaltim pada triwulan II 2021 terpantau membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Membaiknya stabilitas sistem keuangan Kaltim tercermin dari perbaikan kinerja korporasi, dibarengi dengan membaiknya kinerja Rumah Tangga (RT) baik dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran pembiayaannya. DPK korporasi tercatat masih melanjutkan tren pertumbuhan yang meningkat sebesar 35,34% (yoy), sementara kinerja pembiayaan menunjukkan kontraksi yang mengecil. Perbaikan kinerja konsumsi RT triwulan II 2021 turut tercermin dari membaiknya DPK rumah tangga yang utamanya bersumber dari giro, diikuti membaiknya kinerja pembiayaan yang bersumber dari kendaraan bermotor dan properti.

Intermediasi perbankan turut membaik, didorong kinerja penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan baik dari jenis penggunaannya maupun secara spasial.

Kinerja intermediasi perbankan wilayah Kaltim triwulan II 2021 turut menunjukkan perbaikan, yang bersumber dari membaiknya penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan. Membaiknya DPK terutama bersumber dari giro dan tabungan, sementara membaiknya penyaluran pembiayaan bersumber dari seluruh jenis (kredit konsumsi, modal kerja dan investasi). Secara spasial, membaiknya kinerja pembiayaan Kaltim bersumber dari pembiayaan di sebagian besar wilayah kabupaten/kota baik dari tren pertumbuhan yang berlanjut maupun kontraksi yang mengecil. Risiko pembiayaan tercatat meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun berada di bawah ambang batas level *threshold* 5%.

Penyaluran pembiayaan UMKM di Kaltim triwulan II 2021 melanjutkan perbaikan, sehingga terjadi peningkatan pangsa pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM Kaltim melanjutkan perbaikan yang bersumber baik dari kredit modal kerja maupun kredit investasi, sehingga mampu meningkatkan pangsa pembiayaan terhadap total pembiayaan. Kinerja pembiayaan UMKM Kaltim triwulan II 2021 tercatat tumbuh sebesar 5,58% (yoy) setelah kontraksi sebesar 1,70% (yoy) pada

dari total penyaluran pembiayaan. triwulan sebelumnya. Membaiknya kredit UMKM Kaltim tersebut bersumber dari kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 5,79% (yoy), melanjutkan perbaikan dari triwulan sebelumnya. Selain itu, perbaikan pembiayaan UMKM bersumber dari kredit investasi yang tumbuh 5,27% (yoy) atau membaik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi 5,77% (yoy). Perbaikan tersebut turut tercermin dari meningkatnya pangsa pembiayaan UMKM menjadi 20,45% dari total pembiayaan berlokasi proyek di Kaltim, lebih tinggi dari pangsa triwulan sebelumnya sebesar 19,79%. Berdasarkan pangasanya, pembiayaan modal kerja menjadi penyumbang utama pembiayaan UMKM di Kaltim. Di samping itu, risiko pembiayaan syariah juga membaik yang tercermin dari menurunnya rasio Non-Performing Financing (NPF) dari 4,36% pada triwulan lalu, menjadi 4,06%.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi nontunai di Provinsi Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, disebabkan menurunnya nominal dan volume transaksi RTGS. **Pada triwulan II 2021, nominal transaksi nontunai di Kaltim mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Lebih dalamnya kontraksi transaksi nontunai di Kaltim disebabkan lebih dalamnya kontraksi transaksi Real-Time Gross Settlement (RTGS). Dari segi nominal, transaksi nontunai di Provinsi Kaltim pada triwulan ini tercatat mengalami kontraksi sebesar 31,89% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 19,61% (yoy). Namun demikian, kontraksi volume transaksi nontunai mengecil menjadi 1,57% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 12,04% (yoy).

Transaksi nontunai ritel/masyarakat mengalami peningkatan pada seluruh jenisnya, seiring peningkatan transaksi e-commerce dan ekonomi di Kaltim. **Di sisi lain, transaksi nontunai ritel/masyarakat dengan menggunakan kartu kredit, kartu ATM/Debit, serta Uang Elektronik mengalami peningkatan baik dari segi volume maupun nominal transaksi seiring dengan peningkatan transaksi e-commerce dan perbaikan perekonomian Kaltim.** Secara nominal, transaksi non tunai menggunakan kartu kredit meningkat sebesar 37,50% (yoy). Nominal transaksi kartu ATM/Debit juga mengalami peningkatan sebesar 20,36% (yoy). Selain itu, transaksi nontunai masyarakat dengan menggunakan Uang Elektronik juga tumbuh positif sebesar 75,36% (yoy), meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat

94,15% (yoy). Peningkatan transaksi pada seluruh jenis Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) juga diikuti oleh peningkatan transaksi pada *e-commerce* Kaltim yang tercatat sebesar Rp1,12 triliun pada triwulan II 2021, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp1,00 triliun.

Gencarnya kampanye transaksi nontunai menggunakan QRIS mendorong terus meningkatnya jumlah merchant QRIS secara signifikan. **Sejalan dengan pesatnya perkembangan digitalisasi di era pandemi COVID-19, Bank Indonesia terus berupaya untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan di Kaltim dengan mengakselerasi penggunaan QRIS.** Hingga 6 Agustus 2021, jumlah merchant QRIS di Kalimantan telah mencapai 427.580 merchant. Kalimantan Timur berkontribusi sebesar 36% dari total merchant QRIS di Kalimantan atau sejumlah 153.862 merchant. Selanjutnya disusul oleh Kalsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltara berturut-turut sebesar 24%, 21%, 14%, dan 4%. Jika dianalisis dari segi spasial, dari 10 Kota/Kabupaten di Kaltim yang memiliki pertumbuhan jumlah *merchant* tertinggi berasal dari Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Aliran uang kartal di Provinsi Kaltim pada triwulan II 2021 menunjukkan posisi net outflow yang sejalan dengan perbaikan ekonomi dan pola seasonal **Transaksi tunai berupa aliran uang kartal di Kaltim mencatat posisi net outflow yang sejalan dengan perbaikan ekonomi serta pola seasonal masuknya momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.** Secara nominal, nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) di wilayah Kaltim pada triwulan II 2021 sebesar Rp5,27 triliun atau tumbuh sebesar 23,19% (yoy). Sementara itu, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) yaitu sebesar Rp3,61 triliun atau tumbuh sebesar 13,34% (yoy). Dengan demikian, pada triwulan II 2021 transaksi tunai di Kaltim berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp1,66 triliun atau selisih Rp3,73 triliun dari posisi triwulan sebelumnya yaitu *net inflow* sebesar Rp2,07 triliun

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim menunjukkan penurunan yang tercermin dari menurunnya TPAK dan meningkatnya TPT. **Di tengah pemulihan ekonomi yang tertahan pada triwulan I 2021, kondisi ketenagakerjaan Kaltim Februari 2021 mengalami penurunan yang tercermin dari menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).** Level TPAK Kaltim pada Februari 2021 tercatat melambat menjadi 67,46%, dari 71,79% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan TPAK

tersebut sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. Sementara itu, level TPT di Kaltim tercatat meningkat dari 6,72% menjadi 6,81% yang didorong oleh adanya kebijakan efisiensi biaya yang ditempuh berbagai perusahaan di Kaltim seperti kebijakan merumahkan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja.

Kondisi kesejahteraan Kaltim pada triwulan I 2021 secara umum juga mengalami penurunan sebagaimana tercermin dari naiknya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, namun NTP terus mengalami perbaikan hingga triwulan II 2021.

Seiring dengan menurunnya kondisi ketenagakerjaan, kondisi kesejahteraan Kaltim pada triwulan I 2021 secara umum juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan dengan triwulan I 2020 kecuali kondisi kesejahteraan petani perkebunan, sejalan masih membaiknya harga Tandan Buah Segar (TBS). Tingkat kemiskinan Kaltim pada bulan Maret 2021 tercatat meningkat menjadi 6,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,10%. Penurunan kondisi kesejahteraan juga ditunjukkan oleh ketimpangan pendapatan yang meningkat. Rasio gini Kaltim pada bulan Maret 2021 sebesar 0,334 atau lebih tinggi daripada bulan Maret 2020 lalu sebesar 0,328. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 118,97 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 116,98. Perbaikan NTP utamanya bersumber dari perbaikan subsektor perkebunan seiring dengan meningkatnya harga Tandan Buah Segar (TBS).

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan kembali positif terutama didorong oleh membaiknya kinerja lapangan usaha utama seiring kenaikan permintaan domestik dan global.

Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan kembali positif setelah tahun 2020 mengalami kontaksi yang utamanya ditopang oleh membaiknya permintaan global serta turut didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat serta iklim dan kinerja investasi yang lebih positif dari sisi domestik. Di sisi penggunaan, kinerja ekspor pada 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan perbaikan perekonomian negara mitra dagang utama maupun alternatif. Kinerja investasi diperkirakan juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan masih berlanjutnya proyek-proyek strategis di tengah telah diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berpotensi mempermudah regulasi investasi. Pemulihan kinerja ekspor dan investasi sebagai *source of income* masyarakat Kaltim tersebut diperkirakan turut mendorong kinerja

konsumsi masyarakat di tengah program bantuan sosial oleh pemerintah yang kembali dilanjutkan. Di sisi lapangan usaha, kinerja lapangan usaha pertambangan diperkirakan tumbuh lebih tinggi seiring dengan potensi meningkatnya permintaan dari negara mitra utama serta adanya kenaikan kuota produksi batu bara sebesar 75 juta ton yang telah disahkan oleh pemerintah. Sementara itu, kinerja industri pengolahan juga diperkirakan membaik, ditopang oleh mulai beroperasinya 1 (satu) pabrik biodiesel yang memiliki kapasitas produksi yang cukup tinggi, penambahan kapasitas pabrik kimia anorganik, pulihnya permintaan pupuk, dan juga *base effect* di industri pengolahan migas dan BBN akibat menurunnya mobilitas masyarakat secara signifikan selama pandemi 2020.

Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sejalan dengan perbaikan permintaan, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sejalan dengan terus membaiknya permintaan, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kaltim yang mendorong terus meningkatnya permintaan diperkirakan menjadi faktor utama yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Potensi tekanan inflasi juga dapat bersumber dari gangguan di sisi *supply* kelompok makanan dan bahan pangan sejalan dengan masih besarnya ketergantungan Kaltim terhadap pasokan komoditas pangan dari luar provinsi di tengah adanya gangguan cuaca akibat fenomena La Nina hingga awal triwulan II 2021, Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia, serta adanya momen panen komoditas pangan yang terjadi di wilayah sentra secara *seasonal*. Kenaikan inflasi juga diperkirakan bersumber dari sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok yang mulai berlaku 1 Februari 2021, kenaikan tarif iuran BPJS Kelas III, dan tarif bea materai.



Foto: Pulau Sangalaki, Kabupaten Berau

BAB. I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

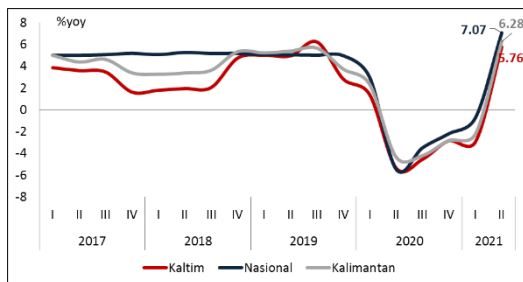
RINGKASAN EKSEKUTIF

- *Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2021 melanjutkan tren perbaikan. Lapangan usaha utama seperti pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sumber berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim di tengah kinerja lapangan usaha konstruksi yang mencatat kontraksi lebih dalam. Pada sisi penggunaan, seluruh komponen melanjutkan tren perbaikan dengan investasi dan ekspor menjadi sumber utama perbaikan ekonomi Kaltim.*

I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

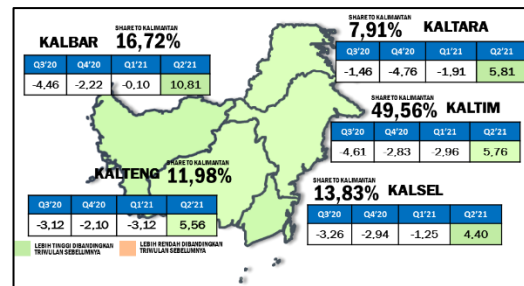
1.1 Gambaran Umum

Kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan II 2021 kembali melanjutkan tren perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2021 tercatat positif, yaitu 5,76% (yoy), setelah selama empat triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, termasuk pada triwulan sebelumnya yang tercatat -2,96% (yoy). Sejalan dengan Kaltim, laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan juga melanjutkan tren perbaikan, yang masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 7,07% (yoy) dan 6,28% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat -0,74% (yoy) dan -2,23% (yoy) (Grafik I.1). Secara spasial, seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian. Berdasarkan pangsaanya, Kaltim masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 49,56% terhadap total perekonomian Kalimantan (Gambar I.1).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.1 Pertumbuhan Tahunan Ekonomi Kaltim, Kalimantan & Nasional



Sumber: BPS, diolah

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Tiap Provinsi di Kalimantan

Mayoritas lapangan usaha mengalami perbaikan dengan pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sumber utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kaltim. Lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami perbaikan yang didorong oleh produksi batu bara yang tumbuh meningkat, baik perusahaan PKP2B maupun IUP. Kinerja produksi batu bara yang meningkat didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, penambahan kuota produksi yang telah ditetapkan Pemerintah pada bulan April 2021, sehingga mendorong berbagai perusahaan batu bara untuk melakukan revisi RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) dan mengejar peningkatan target produksi. Kedua, peningkatan target produksi ini didukung pula oleh permintaan yang cukup solid baik dari negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok dan India, maupun permintaan domestik sejalan dengan semakin berlanjutnya perbaikan ekonomi nasional. Ketiga, selain permintaan global dan domestik yang solid, harga batu bara yang terus membaik juga mendorong peningkatan produksi, terutama untuk tambang jenis IUP

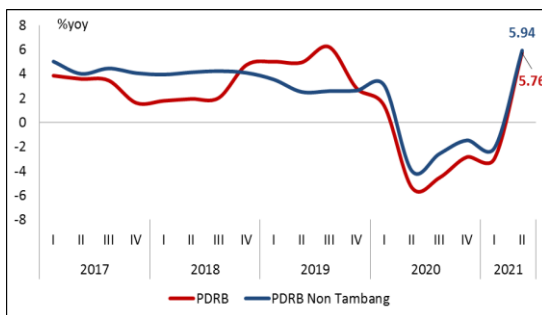
(Izin Usaha Pertambangan) yang relatif lebih elastis terhadap pergerakan harga komoditas. Keempat, cuaca yang lebih kondusif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan juga mengalami perbaikan yang didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, kinerja produksi industri pengolahan utama Kaltim yang membaik, seperti pupuk, kimia anorganik, dan migas yang ditopang oleh permintaan global yang solid. Kedua, perbaikan harga yang terus berlanjut pada seluruh komoditas industri utama Kaltim. Perbaikan ekonomi Kaltim juga turut ditopang oleh membaiknya kinerja lapangan usaha perdagangan sejalan dengan harga komoditas utama sebagai *source of income* yang masih berada pada level tinggi dan mobilitas masyarakat yang membaik. Namun demikian, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh kontraksi yang lebih dalam pada lapangan usaha konstruksi (Grafik I.2).

Perbaikan kinerja juga terjadi pada seluruh komponen PDRB sisi penggunaan dengan ekspor dan investasi sebagai sumber utama perbaikan ekonomi Kaltim. Kinerja ekspor tercatat tumbuh positif setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Perbaikan kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya permintaan batu bara dari sejumlah negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok, ASEAN, dan India. Sementara itu, kinerja investasi (PMTB) melanjutkan pertumbuhan positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik I.3). Meningkatnya kinerja investasi tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan investasi pada industri kimia dasar sejalan dengan sejumlah pembangunan dan perluasan pabrik (seperti ammonium nitrat dan biodiesel) dan pada sektor pertambangan.



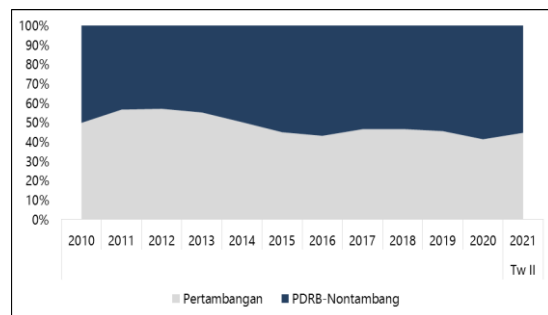
pertumbuhan positif sebesar 5,94% (yoy), jauh membaik dibandingkan dengan pada triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,08% (yoy) (Grafik I.4). Berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian Kaltim tanpa pertambangan bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan, pertanian, transportasi, dan mayoritas sektor tersier lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa pertambangan seringkali tercatat lebih baik dibandingkan dengan laju perekonomian Kaltim dengan pertambangan dalam beberapa periode terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dari pergerakan harga batu bara dan migas yang lebih ber gejolak dan *natural declining* sektor migas yang terjadi pada beberapa tahun terakhir.

Dominasi sektor pertambangan yang sempat menurun, kembali meningkat dalam beberapa triwulan terakhir seiring meningkatnya harga batu bara internasional. Sejak triwulan I 2010 hingga triwulan III 2019 tercatat sektor pertambangan selalu memiliki porsi di atas 45% terhadap perekonomian Kaltim (Grafik I.5). Namun demikian, semenjak triwulan IV 2019 hingga triwulan III 2020, porsi sektor pertambangan tercatat mengalami penurunan secara berangsur hingga ke level sekitar 39,3%. Hal tersebut menandakan bahwa semangat transformasi ekonomi Kaltim yang terus digulirkan oleh pemerintah daerah mulai terwujud; yaitu transformasi yang ditujukan agar perekonomian Kaltim secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan memajukan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bernilai tambah lebih tinggi. Hanya saja, seiring dengan harga batu bara internasional yang meningkat signifikan, pada tiga triwulan terakhir porsi sektor pertambangan kembali naik secara berangsur hingga ke level 44,7%.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Nontambang



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.5 Pangsa Pertambangan dan Nontambang

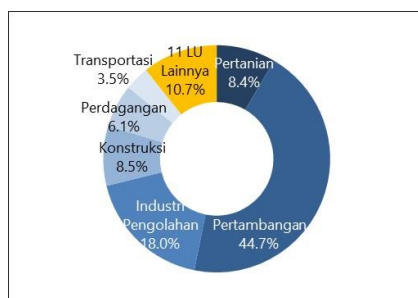
1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Berlanjutnya tren perbaikan perekonomian Kaltim pada triwulan II 2021 terutama didorong oleh perbaikan di sisi produksi dan permintaan pada lapangan usaha utama yang memiliki *share* tinggi terhadap perekonomian. Lapangan usaha utama ekonomi Kaltim yakni pertambangan dan industri pengolahan mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya. Selain itu, lapangan usaha pendukung seperti perdagangan dan pertanian juga mencatat perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, tren perbaikan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja lapangan usaha pendukung lainnya yakni konstruksi yang mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel I.1). Berdasarkan pangsaanya, ekonomi Kaltim pada triwulan II 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan. Lapangan usaha pertambangan mempunyai pangsa sebesar 44,74%. Sementara itu, industri pengolahan mempunyai pangsa sebesar 18,01% (Grafik I.6).

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

Komponen PDRB	2018				2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
PDRB TOTAL	1.79	1.95	2.05	4.74	5.02	4.95	6.23	2.82	1.38	-5.35	-4.54	-2.83	-2.96	5.76
Berdasarkan Lapangan Usaha														
Pertanian	5.84	6.45	7.08	5.48	6.04	4.18	3.00	2.49	1.97	-2.33	-2.52	-1.62	-3.27	0.37
Pertambangan	-0.50	-0.41	-0.39	5.47	6.65	7.69	10.45	3.02	-0.43	-6.82	-6.67	-4.35	-3.93	5.58
Industri Pengolahan	0.27	0.43	0.67	0.42	-1.36	0.69	0.52	0.27	3.48	-7.55	-5.13	-1.82	-3.98	8.48
Listrik dan Gas	12.40	11.32	9.20	6.52	8.39	8.99	8.04	9.25	9.88	9.13	14.88	12.34	0.36	-5.44
Air	4.28	1.93	1.41	3.35	5.72	7.24	4.64	1.92	2.53	5.16	6.58	6.82	5.31	2.66
Konstruksi	3.97	3.83	10.66	13.68	14.87	6.05	2.34	0.92	0.86	0.84	-2.49	-4.09	-0.46	-0.83
Perdagangan	9.97	10.01	5.28	3.90	3.65	3.33	6.91	7.11	5.82	-1.11	-0.47	-0.32	-0.29	5.29
Transportasi dan Pergudangan	8.23	8.58	3.93	2.35	1.25	1.29	3.28	3.56	2.10	-16.72	-4.30	-3.20	-6.57	17.04
Akomodasi dan Makan Minum	9.06	11.29	7.37	7.19	7.10	4.76	6.38	7.27	5.86	-12.66	-6.71	-7.43	-8.90	12.19
Informasi dan Komunikasi	6.28	3.27	4.27	3.78	6.13	8.80	6.70	5.85	5.36	6.07	6.99	9.37	8.75	6.74
Jasa Keuangan	2.56	2.07	3.58	5.67	6.89	-2.91	-0.35	9.09	3.28	5.79	0.37	0.68	-2.97	3.69
Real Estate	6.96	6.59	3.53	2.35	1.09	0.15	3.74	3.52	3.38	1.49	0.01	-1.61	-2.60	-1.42
Jasa Perusahaan	7.51	9.56	1.32	1.64	-0.56	-3.18	6.65	5.46	2.52	-4.21	-4.72	-4.13	-4.59	6.29
Adm. Pemerintahan	7.14	5.80	3.30	3.85	3.82	-0.02	4.60	7.23	0.04	-1.98	-4.12	-9.24	-2.90	11.31
Jasa Pendidikan	8.54	9.27	6.49	4.43	5.00	2.56	3.13	4.46	0.32	1.03	5.65	5.11	8.07	7.19
Jasa Kesehatan dan Sosial	8.18	9.08	8.11	6.63	6.10	6.17	6.43	6.99	10.81	15.34	24.63	27.36	22.93	17.21
Jasa lainnya	6.76	10.56	10.41	10.45	9.69	7.04	7.09	7.93	5.39	-8.40	-4.38	-4.51	-3.80	8.03

Sumber: BPS, diolah



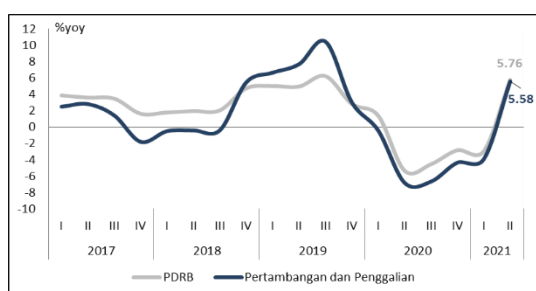
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.6 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan II 2021 Berdasarkan Lapangan Usaha*)

*pangsa diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II 2021

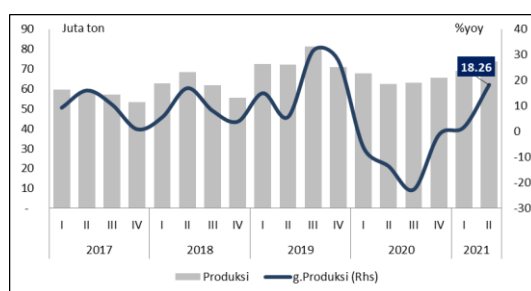
Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kaltim pada triwulan II 2021 melanjutkan tren perbaikan yang didorong oleh peningkatan kinerja produksi dan permintaan batu bara. Secara tahunan, pertumbuhan lapangan usaha pertambangan triwulan II 2021 tercatat sebesar 5,58% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,93% (yoy) (Grafik I.7). Dengan pangsa sebesar 44,74%, lapangan usaha pertambangan memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,49% (yoy) terhadap ekonomi Kaltim triwulan II 2021. Perbaikan kinerja lapangan usaha pertambangan tersebut didorong oleh produksi batu bara Kaltim yang tercatat tumbuh 18,26% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,75% (yoy) (Grafik I.8).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.7 PDRB - LU Pertambangan



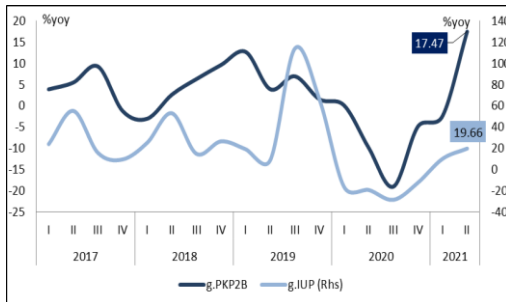
Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.8 Produksi Batu Bara Kaltim

Meningkatnya kinerja produksi batu bara Kaltim bersumber dari kinerja perusahaan PKP2B dan IUP. Pada triwulan II 2021, produksi perusahaan PKP2B tercatat tumbuh sebesar 17,47% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,42% (yoy). Perbaikan produksi perusahaan PKP2B tersebut memiliki dampak yang cukup besar pada kinerja produksi batu bara Kaltim secara keseluruhan mengingat pangsa produksi PKP2B terhadap produksi batu bara Kaltim pada triwulan laporan ini mencapai 63,9%. Selain produksi PKP2B, produksi perusahaan IUP juga tercatat tumbuh sekitar 19,66% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,99% (yoy) (Grafik I.9).

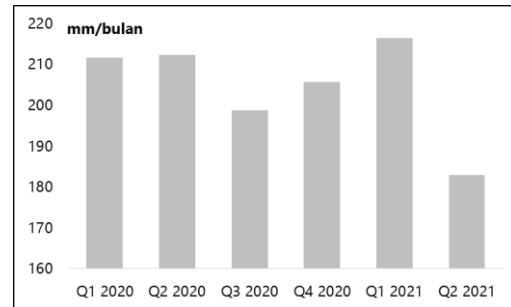
Meningkatnya produksi batu bara Kaltim pada triwulan II 2021 seiring dengan meningkatnya kuota produksi batu bara dan cuaca yang lebih kondusif. Sebagaimana diketahui, pada bulan April 2021 Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 menambah kuota produksi batu bara nasional selama tahun 2021 sebanyak 75 juta ton, atau naik dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton. Kenaikan ini mendorong berbagai perusahaan batu bara untuk melakukan penyesuaian RKAB (Rencana

Kerja Anggaran Belanja) dan meningkatkan intensitas pertambangan untuk mengejar peningkatan target produksi. Selain itu, peningkatan kinerja produksi juga didorong oleh cuaca pada triwulan II 2021 yang lebih kondusif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rerata curah hujan Kaltim pada triwulan II 2021 mencapai 182,9 mm/bulan, atau lebih kondusif dibandingkan dengan pada triwulan I 2021 yang mencapai 216,3 mm/bulan (Grafik I.10)



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.9 Pertumbuhan Produksi Batu Bara Perusahaan PKP2B dan IUP di Kaltim

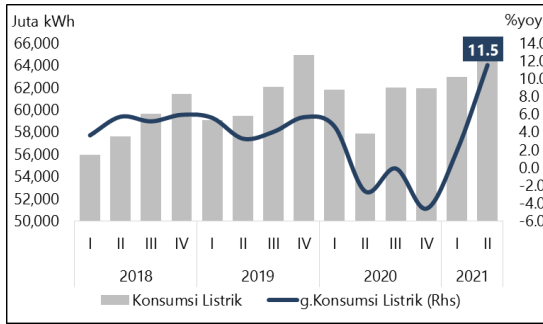


Sumber: BMKG, diolah

Grafik I.10 Rerata Bulanan Curah Hujan Kaltim

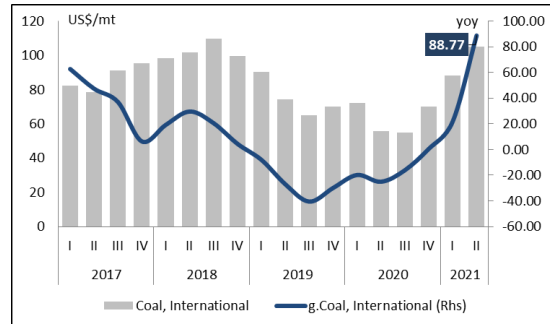
Dari sisi permintaan, meningkatnya produksi batu bara Kaltim didorong oleh permintaan global dan nasional yang cukup solid di tengah harga yang masih tinggi. Pada triwulan II 2021, permintaan batu bara dari negara tujuan utama juga mengalami perbaikan. Ekspor batu bara ke Tiongkok sebagai tujuan ekspor batu bara terbesar Kaltim tumbuh 15,03% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,81% (yoy). Hal serupa juga terjadi pada ekspor batu bara Kaltim ke India yang tumbuh 38,22% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 19,50% (yoy). Dari sisi domestik, permintaan batu bara juga solid, sebagaimana tercermin dari konsumsi listrik nasional yang terus tumbuh meningkat (Grafik I.11). Konsumsi listrik nasional yang tumbuh meningkat tentunya akan mendorong permintaan batu bara mengingat porsi batu bara mencapai 63,52%² dari total bauran energi untuk pembangkit listrik nasional. Selain itu, peningkatan permintaan juga didorong harga batu bara yang masih berada pada level yang tinggi. Pada triwulan II 2021, rata-rata harga batu bara internasional tercatat berada pada level 105.10 dolar AS per mt atau tumbuh 88,77% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,83% (yoy) atau berada di level 88.13 dolar AS per mt (Grafik I.12).

² Data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sebagaimana dikutip dalam laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210608172422-4-251527/ini-alasan-pltu-batu-bara-masih-jadi-andalan-ri>



Sumber: PLN, diolah

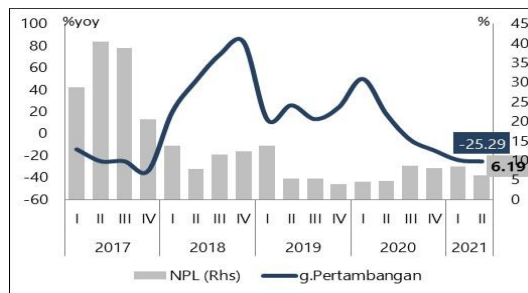
Grafik I.11 Konsumsi Listrik Nasional



Sumber: World Bank, diolah

Grafik I.12 Harga Batu Bara Internasional

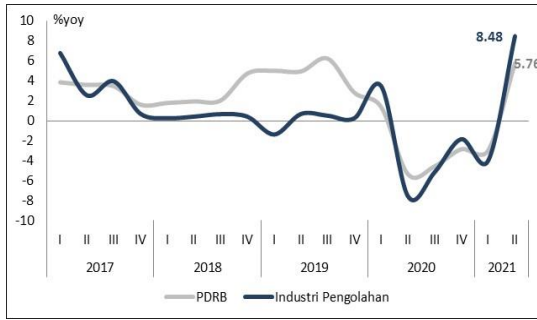
Dari sisi keuangan, penyaluran kredit kepada lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi yang lebih dalam namun dengan NPL (*Non Performing Loan*) yang membaik. Kredit sektor pertambangan pada triwulan II 2021 terkontraksi sebesar 25,29% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 24,05% (yoy) (Grafik I.13). Namun demikian, di tengah menurunnya pertumbuhan penyaluran kredit tersebut, risiko kredit (NPL) mengalami perbaikan yakni sebesar 6,19% atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,38%.



Grafik I.13 Kredit dan NPL Pertambangan Kaltim

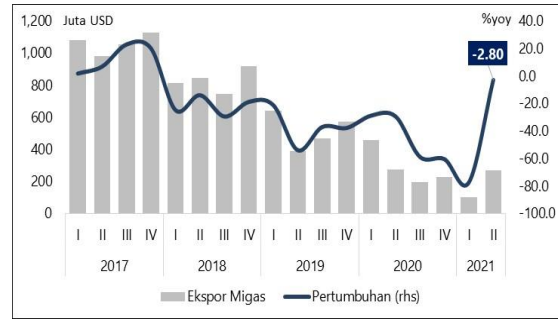
Industri Pengolahan

Kinerja industri pengolahan Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat mengalami perbaikan, utamanya didorong oleh perbaikan kinerja ekspor migas. Pada triwulan II 2021 industri pengolahan mencatat pertumbuhan 8,48% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 3,98% (yoy) (Grafik I.14). Perbaikan kinerja industri pengolahan didorong oleh perbaikan industri pengolahan migas sebagaimana tercermin pada permintaan ekspor migas yang juga mengalami perbaikan. Ekspor migas Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat senilai 268.76 juta dolar AS, atau terkontraksi 2,80% (yoy). Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 77,38% (yoy) (Grafik I.15). Industri pengolahan migas sendiri merupakan sub sektor industri pengolahan Kaltim yang memiliki pangsa terbesar, yaitu mencapai 56,4% terhadap total PDRB industri pengolahan di Kaltim (Grafik I.16).



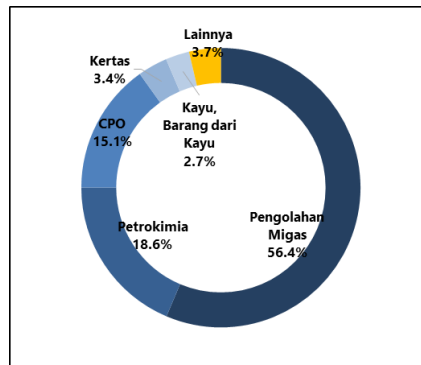
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.14 PDRB - LU Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah

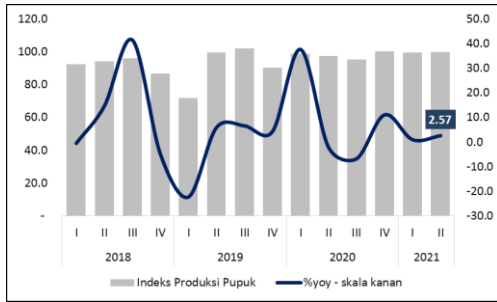
Grafik I.15 Perkembangan Ekspor Migas Kaltim



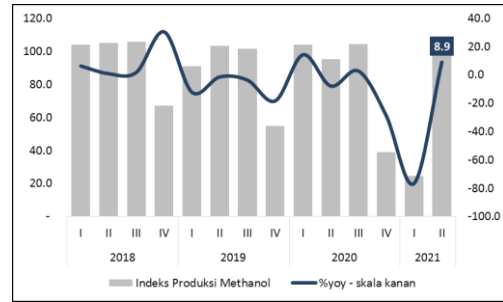
Sumber: BPS, diolah (rhs)

Grafik I.16 Pangsa PDRB Industri Pengolahan Kaltim berdasarkan sub kategori

Selain didorong oleh industri pengolahan migas, perbaikan kinerja industri pengolahan Kaltim juga ditopang oleh membaiknya kinerja industri petrokimia. Indeks produksi pupuk di Kaltim tercatat mengalami pertumbuhan 2,57% (yoy) pada triwulan II 2021, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,94% (yoy) (Grafik I.17). Sementara itu, indeks produksi methanol di Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat tumbuh sebesar 8,94% (yoy), jauh membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 76,6% (yoy) (Grafik I.18). Meningkatnya kinerja industri petrokimia disebabkan oleh berangsur pulihnya proses produksi methanol sejak Maret 2021 pasca mengalami *shutdown* di salah satu *plant* sehubungan dengan adanya perbaikan nonrutin terutama pada Februari 2021.

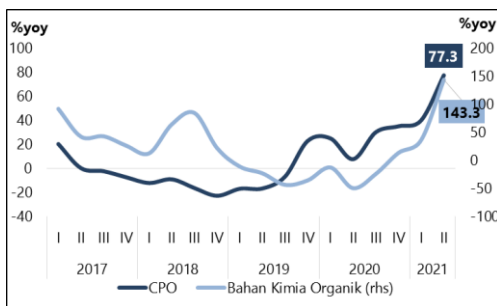


Grafik I.17 Indeks Produksi Pupuk Kaltim



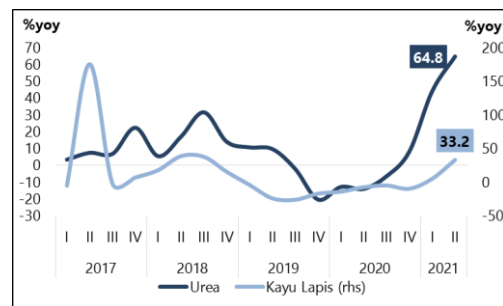
Grafik I.18 Indeks Produksi Methanol Kaltim

Perbaikan kinerja industri pengolahan Kaltim juga didorong oleh perbaikan kinerja harga seluruh komoditas industri pengolahan utama Kaltim. Harga CPO internasional pada triwulan II 2021 mencapai 1,083.84 dolar AS per mt atau tumbuh 77,26% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,013.56 dolar AS per mt atau tumbuh 39,86% (yoy) didorong oleh ketatnya suplai dunia terutama dari Malaysia yang kembali melakukan pembatasan aktivitas dan mobilitas saat menghadapi gelombang kedua COVID-19 sejak pertengahan April 2021. Sejalan dengan harga CPO, indeks harga ekspor bahan kimia organik (yang mayoritas merupakan turunan kelapa sawit) juga mengalami akselerasi pertumbuhan dari 36,03% (yoy) pada triwulan I 2021, menjadi 143,31% (yoy) pada triwulan II 2021 (Grafik I.19). Sementara itu, harga Urea Internasional dan indeks harga ekspor kayu lapis Kaltim juga mencatat hal yang sama. Harga Urea internasional pada triwulan II 2021 mencapai 350.9 dolar AS per mt atau tumbuh 64,81% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang tercatat 317.6 dolar AS per mt atau tumbuh 44,18% (yoy). Indeks harga kayu lapis juga tumbuh membaik dari 5,13% (yoy) pada triwulan I 2021, menjadi 33,23% (yoy) pada triwulan II 2021 (Grafik I.20).



Sumber: World Bank, Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.19 Pertumbuhan Harga CPO Internasional dan Bahan Kimia Organik

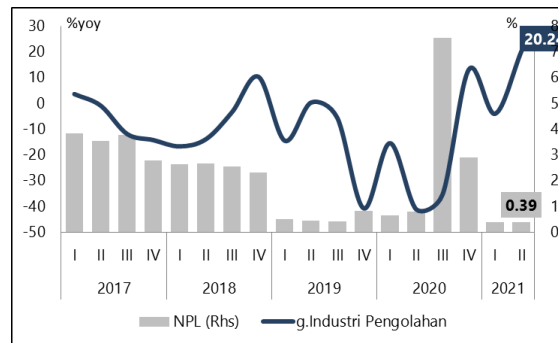


Sumber: World Bank, Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.20 Pertumbuhan Harga Urea Internasional dan Kayu Lapis

Sejalan dengan perbaikan kinerja produksinya, penyaluran kredit kepada lapangan usaha industri pengolahan mengalami perbaikan setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi, diiringi dengan kualitas kredit yang juga membaik. Penyaluran kredit industri

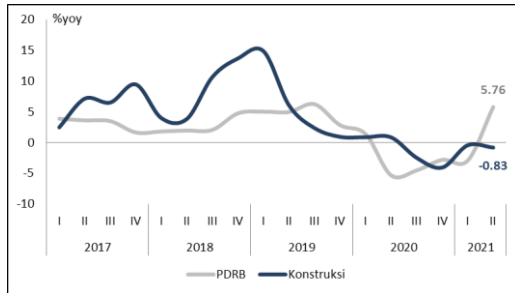
pengolahan pada triwulan II 2021 tumbuh sebesar 20,24% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi -4,00% (yoy) (Grafik I.21). Perbaikan penyaluran kredit industri pengolahan tersebut juga diiringi oleh penurunan tingkat risiko (*Non Performing Loan – NPL*) dari 0,41% pada triwulan sebelumnya, menjadi 0,39%, dan masih berada di bawah *threshold* 5%. Penurunan NPL tersebut sejalan dengan membaiknya kinerja industri pengolahan sehingga meningkatkan *repayment capacity*, di tengah berakhirnya isu kredit bermasalah di sektor industri kayu lapis yang terjadi pada tiga triwulan sebelumnya di sektor industri *plywood*.



Grafik I.21 Kredit dan NPL Industri Pengolahan

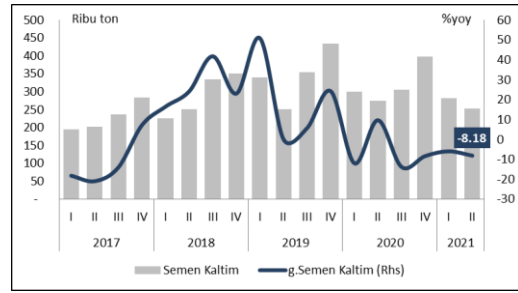
Konstruksi

Perbaikan kinerja lapangan usaha konstruksi Kaltim triwulan II 2021 tertahan, sejalan dengan kembali melambatnya intensitas konstruksi, terutama proyek-proyek pemerintah pusat. Secara tahunan kinerja lapangan usaha konstruksi tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,83% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,46% (yoy) (Grafik I.22). Tertahannya perbaikan kinerja lapangan usaha konstruksi masih didorong oleh telah berlalunya *peak period* pembangunan sejumlah proyek strategis seperti Seksi 1 dan Seksi 5 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang ditargetkan diresmikan pada bulan Agustus 2021. Kontraksi juga didorong oleh banyaknya hari libur pada triwulan II termasuk periode Ramadhan – Idul Fitri yang berdampak pada menurunnya intensitas konstruksi. Kedua hal tersebut juga tercermin dari realisasi belanja modal pemerintah pusat (APBN) di Kaltim yang mengalami perlambatan. Belanja modal pemerintah pusat (APBN) di Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat Rp468,6 miliar atau tumbuh 6,76% (yoy), jauh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 138,46% (yoy). Tertahannya kinerja lapangan usaha konstruksi tercermin juga dari penurunan kinerja pengadaan semen di Kaltim dari -6,00% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi -8,18% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik I.23).



Sumber: BPS, diolah

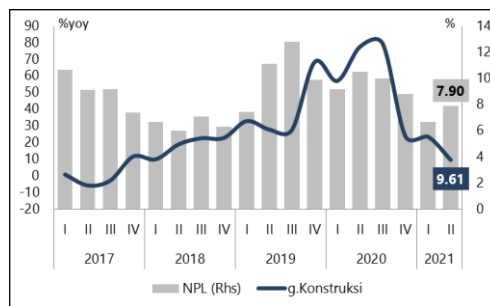
Grafik I.22 PDRB – LU Konstruksi



Sumber: ASI, diolah

Grafik I.23 Pengadaan Semen Kaltim

Sejalan dengan memburuknya kinerja sektoralnya, penyaluran kredit di sektor konstruksi juga melambat meski masih tumbuh positif, di tengah risiko kredit yang meningkat. Kredit konstruksi tercatat tumbuh sebesar 9,61% (yoy) pada triwulan II 2021, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,46% (yoy) (Grafik I.24). Akibat perlambatan ini, untuk pertama kalinya sejak triwulan II 2018 pertumbuhan penyaluran kredit di lapangan usaha konstruksi tidak mencapai *double digit*. Perlambatan juga diiringi oleh risiko kredit yang meningkat. Rasio NPL lapangan usaha konstruksi tercatat mengalami kenaikan dari 6,64% pada triwulan sebelumnya, menjadi 7,90%. Rasio NPL pada lapangan usaha konstruksi tersebut menempati peringkat kedua tertinggi setelah rasio NPL pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan.

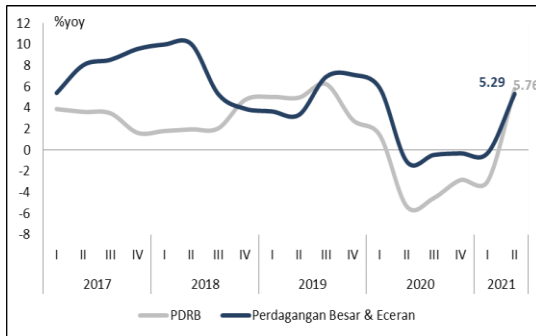


Grafik I.24 Kredit dan NPL Konstruksi Kaltim

Lapangan Usaha Tersier

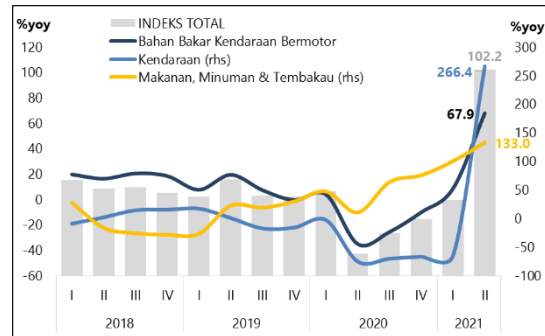
Kinerja lapangan usaha tersier pada triwulan II 2021 melanjutkan perbaikan terutama ditopang oleh membaiknya kinerja lapangan usaha perdagangan seiring dengan membaiknya mobilitas dan adanya momen Ramadhan – HBKN Idul Fitri. Pada triwulan II 2021, laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mencatat pertumbuhan 5,29% (yoy), membaik signifikan setelah pada triwulan mengalami kontraksi 0,29% (yoy) (Grafik I.25). Perbaikan tersebut juga tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim yang memperlihatkan peningkatan pertumbuhan Indeks Penjualan

Eceran (IPE). IPE Kaltim triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan 102,2% (yoy). Pencapaian ini membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -0,7% (yoy). Adapun peningkatan tersebut bersumber dari semakin membaiknya kinerja sub komponen: (i) bahan bakar kendaraan bermotor, (ii) makanan, minuman, dan tembakau, dan (iii) kendaraan (Grafik I.26).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.25 PDRB – LU Perdagangan

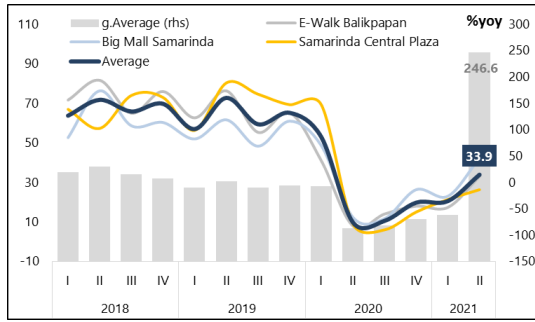


Sumber: Survei Bank Indonesia diolah

Grafik I.26 Suvei Penjualan Eceran Kaltim

Perbaikan pada lapangan usaha perdagangan juga tercermin dari membaiknya gambaran yang ditunjukkan Indeks Google Trends pada sejumlah pusat perbelanjaan di Kaltim. Google Trends menggambarkan pencarian terhadap *keywords* tertentu di internet. Pencarian di internet ini dapat menggambarkan ketertarikan masyarakat terhadap suatu topik/tempat tertentu, yang menjadi indikasi awal dari *spending*. Pada triwulan II 2021, Google Trends terhadap tiga sampel pusat perbelanjaan di Kaltim menunjukkan indeks sebesar 33,9 atau tumbuh 246,6% (yoy), membaik dibandingkan dengan indeks triwulan I 2021 yang tercatat sebesar 20,6 (Grafik I.27).

Perbaikan lapangan usaha perdagangan pada triwulan II 2021 juga diikuti oleh membaiknya pertumbuhan dan kualitas kreditnya. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan tercatat tumbuh 5,07% (yoy) pada triwulan II 2021, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,05% (yoy). Penyaluran kredit yang membaik tersebut juga diikuti dengan penurunan rasio NPL lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dari 6,95% pada triwulan sebelumnya menjadi 6,94%. (Grafik I.28).

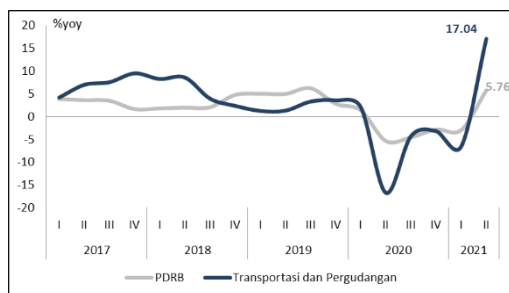


Sumber: Google Trends, diolah
Grafik I.27 Google Trends Tiga Pusat Perbelanjaan di Kaltim

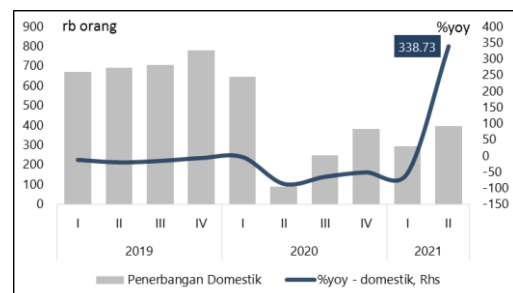


Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik I.28 Kredit dan NPL Sektor Perdagangan

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan II 2021 melanjutkan perbaikan yang didorong oleh membaiknya mobilitas sejalan dengan kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tengah larangan mudik pada periode Idul Fitri. Pada triwulan II 2021 lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 17,04% (yoy), jauh membaik dibandingkan dengan pada triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 6,57% (yoy) (Grafik I.29). Meningkatnya kinerja pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan tersebut disebabkan oleh pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kaltim dari yang bersifat luas (Kaltim “*Silent*”) menjadi lebih bersifat mikro sejalan dengan kasus COVID-19 yang menurun. Meskipun terdapat larangan mudik di sekitar HBKN Idul Fitri, yaitu pada 6 – 17 Mei 2021, pada praktiknya kebijakan tersebut lebih “memindahkan” periode mudik menjadi sebelum dan setelah periode larangan tersebut. Meningkatnya kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga tercermin dari jumlah penumpang pesawat domestik yang tumbuh meningkat dari -54,46% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 338,73% (yoy) (Grafik I.30).



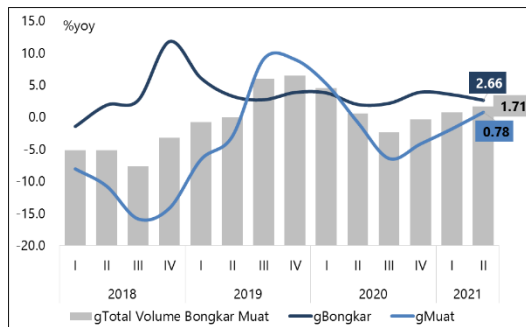
Sumber: BPS, diolah
Grafik I.29 PDRB – LU Transportasi dan Pergudangan



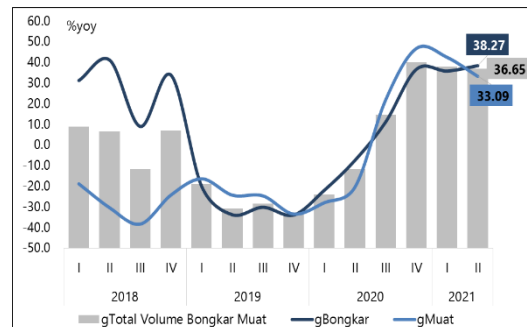
Sumber: BPS, diolah
Grafik I.30 Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik Intra-Antar Kaltim

Perbaikan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga tercermin dari peningkatan aktivitas bongkar muat barang di Kaltim selama triwulan II 2021. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan utama di Kaltim tercatat tumbuh meningkat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya, dari 0,79% (yoy) menjadi 1,71% (yoy) (Grafik I.31). Sementara itu, aktivitas bongkar di bandara juga tercatat tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari 35,67% (yoy) menjadi 38,27% (yoy) (Grafik I.32).

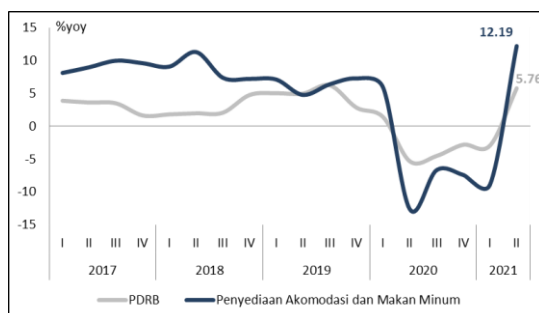


Sumber: BPS, diolah
Grafik I.31 Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan utama Kaltim

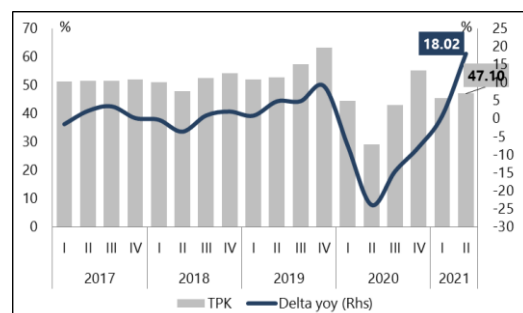


Sumber: BPS, diolah
Grafik I.32 Aktivitas Bongkar Muat di Bandara

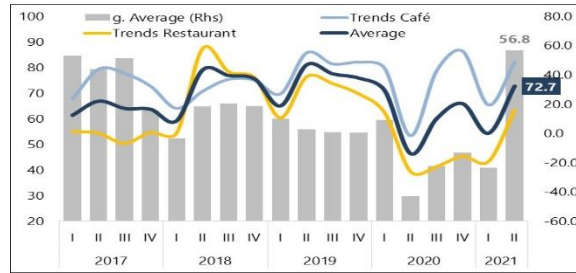
Kinerja lapangan usaha akomodasi, makan, dan minum (akmamin) pada triwulan II 2021 juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ditopang oleh membaiknya mobilitas luar rumah sejalan dengan kasus COVID-19 yang lebih terkendali. Pada triwulan II 2021 lapangan usaha akomodasi, makan, dan minum mencatat pertumbuhan 12,19% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,90% (yoy) (Grafik I.33). Membaiknya kinerja lapangan usaha akmamin terkonfirmasi oleh Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kaltim yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 45,39% menjadi 47,10% (Grafik I.34). Lebih lanjut, membaiknya kinerja lapangan usaha ini juga tercermin dari Indeks Google Trends untuk *café* dan restoran. Pada triwulan II 2021, Google Trends *café* dan restoran di Kaltim menunjukkan indeks sebesar 72,7 atau tumbuh 56,8% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang tercatat sebesar 54,3 (Grafik I.35).



Sumber: BPS, diolah
Grafik I.33 PDRB – LU Penyedia Akomodasi dan Makan Minum



Sumber: BPS, diolah
Grafik I.34 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Kaltim



Sumber: Google Trends, diolah
Grafik I.35 Google Trends Café & Restoran di Kaltim

1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

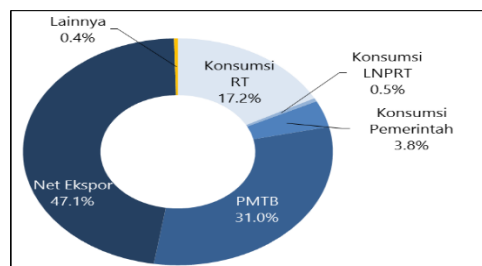
Dari sisi pengeluaran, berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian Kaltim triwulan II 2021 bersumber dari perbaikan hampir seluruh komponen PDRB, terutama ekspor dan investasi (PMTB). Peningkatan kinerja ekspor utamanya disebabkan oleh membaiknya permintaan negara tujuan ekspor, khususnya untuk komoditas batu bara, pupuk, dan bahan kimia organik. Meningkatnya kinerja investasi didorong oleh meningkatnya pertumbuhan investasi pada industri kimia dasar sejalan dengan sejumlah pembangunan dan perluasan pabrik (seperti ammonium nitrat dan biodiesel) dan pada sektor pertambangan (Tabel I.2). Berdasarkan pangasanya, net ekspor dan investasi masih menjadi komponen penyusun terbesar PDRB Kaltim, yang masing-masing sebesar 47,11% dan 31,03% (Grafik I.36).

Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Penggunaan (yoy)

Komponen PDRB	2018				2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
PDRB TOTAL	1.79	1.95	2.05	4.74	5.02	4.95	6.23	2.82	1.38	-5.35	-4.54	-2.83	-2.96	5.76
<i>Berdasarkan Penggunaan</i>														
Konsumsi Rumah Tangga	2.63	3.13	3.05	3.71	4.03	3.37	3.13	2.09	1.65	-2.34	-0.58	-0.46	-0.49	4.49
Konsumsi LNPRT	9.51	7.23	12.47	8.56	8.53	7.51	7.77	3.33	-4.88	-3.12	-0.19	3.18	-0.02	0.12
Konsumsi Pemerintah	2.99	-0.34	21.11	8.04	5.15	-3.16	10.89	13.60	8.53	-0.85	1.77	-9.10	-0.33	12.39
PMTB	5.07	16.64	2.19	6.83	9.87	-1.29	5.89	5.22	0.62	0.84	0.32	-7.28	11.19	12.41
Ekspor*)					4.99	7.06	6.25	2.66	2.26	-6.30	-5.87	1.13	-8.19	8.91
Impor*)					6.97	4.96	5.26	3.99	3.12	-2.78	-2.94	3.42	-6.48	15.12

Sumber: BPS, diolah

*Nilai ekspor- impor yang digunakan mencakup ekspor-impor antar daerah dan luar negeri.

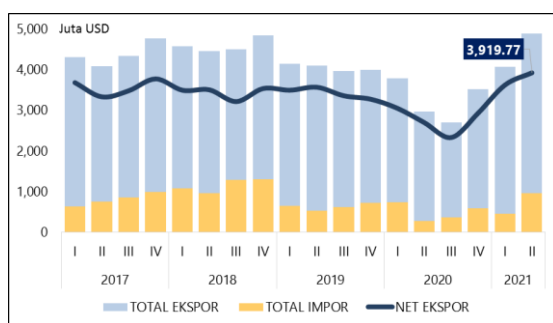


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.36 Pangsa PDRB Kaltim Triwulan II 2021 Berdasarkan Penggunaan

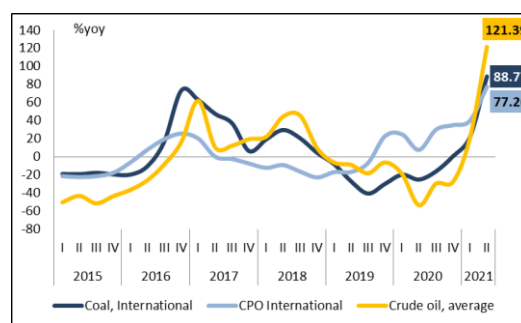
Perdagangan Luar Negeri – Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan (migas dan nonmigas) Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat surplus dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh berlanjutnya peningkatan harga komoditas ekspor utama. Surplus neraca perdagangan Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 3,92 miliar dolar AS, lebih tinggi dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 3,62 miliar dolar AS. Nilai ekspor Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 4,88 miliar dolar AS atau tumbuh 64,76% (yoy), membaik signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,66% (yoy) dan tercatat sebesar 4,07 miliar dolar AS (Grafik I.37). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan harga komoditas ekspor utama Kaltim yakni batu bara, CPO, dan migas. Harga ketiga komoditas tersebut tercatat mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 88,77% (yoy), 77,26% (yoy), dan 121,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 21,83% (yoy), 39,86% (yoy), dan 20,87% (yoy) (Grafik I.38).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.37 Neraca Perdagangan Kaltim



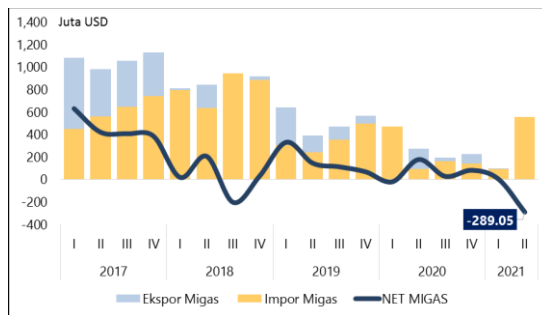
Sumber: Worldbank, diolah

Grafik I.38 Pertumbuhan Harga Komoditas Ekspor Kaltim

Setelah selama empat triwulan sebelumnya selalu mencatat surplus, neraca perdagangan luar negeri migas Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat mengalami defisit yang utamanya bersumber dari kenaikan ekspor migas yang tidak setinggi kenaikan impor migas. Ekspor migas Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat meningkat menjadi sebesar 0,27 miliar dolar AS atau terkontraksi 2,80% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berada pada level 0,10 miliar dolar AS atau terkontraksi 77,38% (yoy). Dari sisi impor, nilai impor migas Kaltim pada triwulan II 2021 juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya sebesar 0,09 miliar dolar AS atau terkontraksi 79,72% (yoy), menjadi 0,56 miliar dolar AS atau tumbuh 475,54% (yoy) (Grafik I.39). Peningkatan tersebut bersumber dari impor baik minyak mentah maupun hasil minyak yang mengalami kenaikan. Impor minyak mentah meningkat dari 0,05 miliar dolar AS atau terkontraksi 88,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 0,55 miliar dolar AS atau tumbuh 790,36% (yoy). Lebih lanjut, impor hasil minyak juga meningkat dari 0,05 miliar dolar AS atau

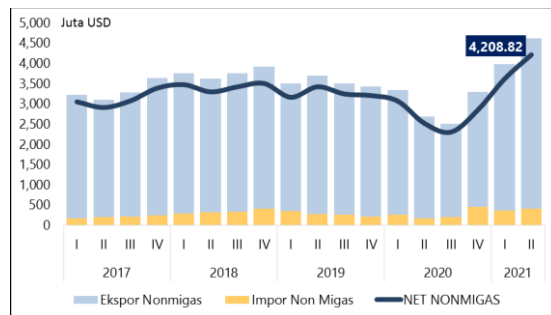
terkontraksi 32,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 0,11 miliar dolar AS atau tumbuh 136,03% (yoy).

Sementara itu, neraca perdagangan luar negeri nonmigas Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat surplus dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya disebabkan peningkatan ekspor nonmigas yang lebih tinggi dibandingkan dengan meningkatnya impor nonmigas. Ekspor nonmigas Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat meningkat menjadi sebesar 4,61 miliar dolar AS atau tumbuh 71,71% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada level 3,97 miliar dolar AS atau tumbuh 19,19% (yoy). Hal tersebut lebih didorong oleh tingginya tingkat harga komoditas utama dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan perbaikan permintaan terhadap batu bara Kaltim. Di sisi lain, impor nonmigas juga mengalami kenaikan, yang pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 0,40 miliar dolar AS atau tumbuh positif sebesar 135,13% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berada pada level 0,36 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 34,13% (yoy) (Grafik I.40).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.39 Neraca Perdagangan Migas Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.40 Neraca Perdagangan Non Migas Kaltim

Ekspor luar negeri Kaltim sampai triwulan II 2021 tercatat masih didominasi oleh komoditas batu bara dan migas, serta minyak kelapa sawit dengan Tiongkok dan India yang menjadi negara tujuan utama. Berdasarkan nilainya, komoditas batu bara dan migas memiliki pangsa terbesar, yaitu 78,41% terhadap ekspor Kaltim, diikuti oleh minyak kelapa sawit dengan pangsa 13,69% (Tabel I.3). Sementara itu, berdasarkan negara tujuan, Tiongkok dan India tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor nonmigas dengan pangsa masing-masing sebesar 37,30% dan 14,67%. Di sisi lain, Tiongkok dan Taiwan menjadi negara tujuan utama ekspor migas dengan pangsa masing-masing sebesar 56,98% dan 21,54%. (Tabel I.4)

Tabel I.3 Perkembangan Komoditas Ekspor Kaltim Jan–Jun’21

Komoditas Ekspor Utama	Pangsa (%)
Bahan Bakar Mineral - Batubara dan Migas	78.41
Minyak Kelapa Sawit	13.69
Pupuk	2.95
Bahan Kimia Anorganik	2.62
Asam Lemak Lainnya	0.85
Total 5 Komoditas	98.51

Sumber: BPS, diolah

Tabel I.4 Perkembangan Ekspor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan Jan-Jun’21

No	Negara Tujuan Utama Ekspor Migas	Pangsa (%)	No	Negara Tujuan Utama Ekspor Non Migas	Pangsa (%)
1	Tiongkok	56.98	1	Tiongkok	37.30
2	Taiwan	21.54	2	India	14.67
3	Jepang	9.82	3	Malaysia	7.63
4	Bangladesh	5.19	4	Filipina	7.13
5	Korea Selatan	5.08	5	Korea Selatan	5.10
	Total 5 Negara	98.61		Total 5 Negara	71.84

Sumber: BPS, diolah

Sementara itu, impor luar negeri Kaltim sampai triwulan II 2021 didominasi oleh komoditas migas dan permesinan dengan Azerbaijan dan Korea Selatan sebagai masing-masing negara asal utama impor migas dan nonmigas. Berdasarkan komoditasnya, komoditas migas tercatat memiliki pangsa sebesar 46,16% terhadap impor luar negeri Kaltim, diikuti komoditas ketel dan mesin sebesar 31,72% (Tabel I.5). Sementara itu, Azerbaijan dan Nigeria tercatat menjadi negara asal utama impor migas Kaltim dengan pangsa masing-masing sebesar 25,99% dan 25,47%. Di sisi lain, Korea Selatan dan Eropa menjadi negara asal utama impor nonmigas Kaltim dengan pangsa sebesar 24,81% dan 24,12% (Tabel I.6)

Tabel I.5 Perkembangan Komoditas Impor Kaltim Jan-Jun’21

No	Komoditas Impor Utama	Pangsa (%)
1	Bahan Bakar Mineral - Migas	46.16
2	Ketel dan Mesin	31.72
3	Mesin dan Perlengkapan Elektrik	6.35
4	Barang dari Besi/Baja	4.46
5	Karet dan Barang dari Karet	2.41
	Total 5 Komoditas	91.10

Sumber: BPS, diolah

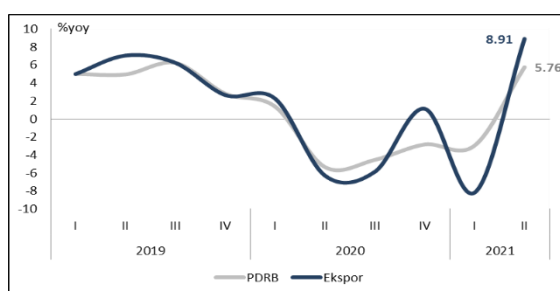
Tabel I.6 Perkembangan Impor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan Jan-Jun’21

No	Negara Asal Utama Impor Migas	Pangsa (%)	No	Negara Asal Utama Impor non Migas	Pangsa (%)
1	Azerbaijan	25.99	1	Korea Selatan	24.81
2	Nigeria	25.47	2	Eropa	24.12
3	Malaysia	16.93	3	Singapura	22.17
4	Angola	8.66	4	UAE	12.78
5	Korea Selatan	7.24	5	Jepang	3.47
	Total 5 Negara	84.29		Total 5 Negara	87.34

Sumber: BPS, diolah

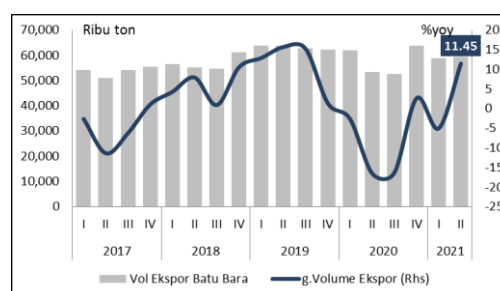
Ekspor

Kinerja ekspor Kaltim pada triwulan II 2021 membaik, ditopang oleh solidnya permintaan ekspor batu bara, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Pada triwulan II 2021, kinerja ekspor Kaltim tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 8,91% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 8,19% (yoy) (Grafik I.41). Perbaikan kinerja ekspor tersebut didorong oleh perbaikan volume ekspor nonmigas sejalan dengan kinerja ekspor batu bara yang juga menguat. Volume ekspor batu bara Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat tumbuh sebesar 11,45% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 5,06% (yoy) (Grafik I.42).



Sumber: BPS, diolah

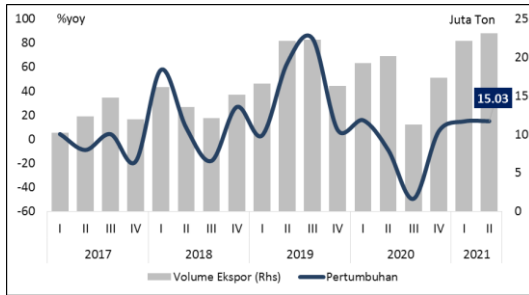
Grafik I.41 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Ekspor



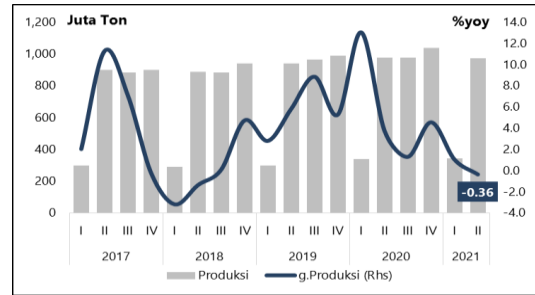
Sumber: Ditjen Bea Cukai diolah

Grafik I.42 Volume Ekspor Batu Bara Kaltim

Mengkuatnya kinerja ekspor batu bara didorong oleh meningkatnya permintaan terutama dari Tiongkok sejalan dengan terganggunya produksi domestik. Ekspor batu bara Kaltim ke Tiongkok pada triwulan II 2021 mencapai 23,15 juta ton atau tumbuh sebesar 15,03% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang tercatat 22,10 juta ton atau tumbuh 14,81% (yoy) (Grafik I.43). Meningkatnya pertumbuhan volume ekspor batu bara Kaltim ke Tiongkok disebabkan oleh terganggunya produksi batu bara domestik Tiongkok. Hal ini tercermin dari produksi batu bara Tiongkok triwulan II 2021 yang terkontraksi 0,36% (yoy), setelah pada sebelumnya masih tumbuh positif 1,04% (yoy) (Grafik I.44). Gangguan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain tingginya curah hujan di wilayah sentra pertambangan dan terjadinya serangkaian kecelakaan pertambangan yang cukup fatal. Gangguan ini terjadi di tengah tingginya kebutuhan impor batu bara Tiongkok sejalan dengan *stock hoarding* untuk persiapan selebrasi akbar peringatan 100 tahun partai komunis dan pencabutan pembatasan impor batu bara untuk beberapa provinsi oleh otoritas bea cukai setempat. Selain itu, tensi diplomatik antara Tiongkok dan Australia yang telah berlangsung lebih dari 9 (sembilan) bulan terakhir menyebabkan penyerapan Tiongkok terhadap batu bara Australia menurun drastis.

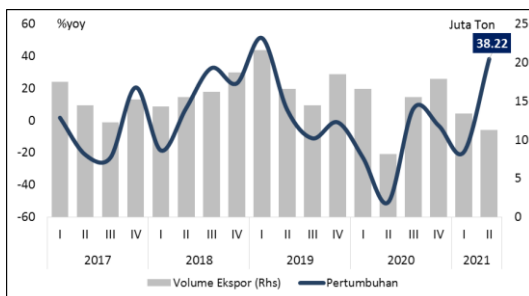


Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.43 Eksport Batu Bara Kaltim ke Tiongkok

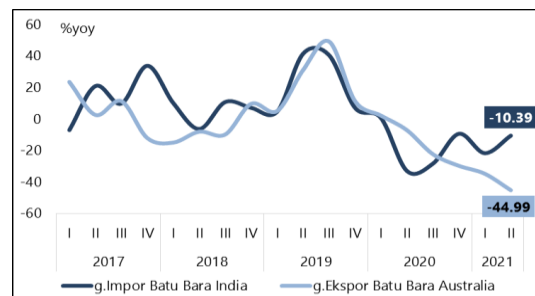


Sumber: NBS China, CEIC, diolah
Grafik I.44 Produksi Batu Bara Tiongkok

Meningkatnya kinerja ekspor batu bara juga ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan volume ekspor ke India sejalan dengan *stock hoarding* puncak musim panas. Ekspor batu bara Kaltim ke India pada triwulan II 2021 tumbuh sebesar 38,22% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 19,50% (yoy) (Grafik I.45). Meningkatnya kinerja ekspor batu bara Kaltim ke India didorong oleh *stock hoarding* dalam mengantisipasi musim panas. Pada musim panas, konsumsi listrik akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan pendingin ruangan. Hal ini tercermin dari impor batu bara India pada triwulan II 2021 yang terkontraksi 10,39% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 21,47% (yoy) (Grafik I.46). Menguatnya kinerja ekspor batu bara Kaltim ke India juga disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor batu bara Australia. Sebagaimana diketahui, sejak meningkatnya tensi diplomatik Tiongkok dan Australia, ekspor batu bara Australia banyak dialihkan ke India. Akibatnya, Australia menggeser pangsa Indonesia dan Afrika Selatan dalam impor batu bara India. Namun, sejalan dengan prioritas pemenuhan kebutuhan domestik Australia dalam menyambut musim dingin (yang meningkatkan konsumsi listrik untuk penggunaan penghangat ruangan), ekspor batu bara Australia pada triwulan II 2021 terkontraksi 44,99% (yoy), merosot dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 34,53% (yoy) (Grafik I.46).

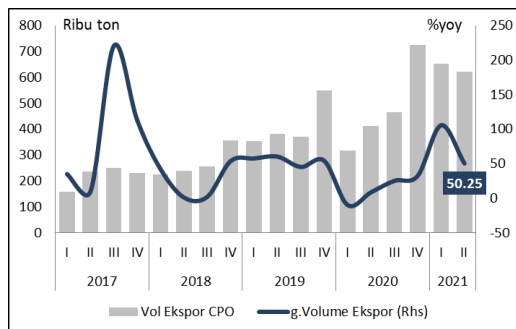


Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.45 Ekspor Batu Bara Kaltim ke India

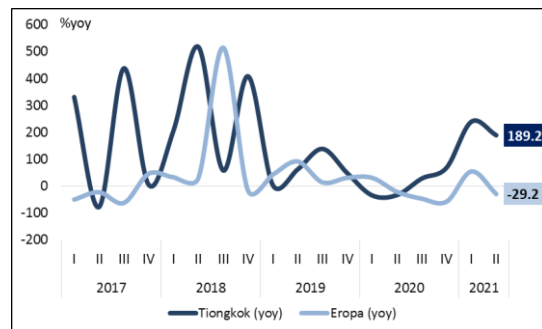


Sumber: MoCI India, Australian Bureau of Statistics, CEIC, diolah
Grafik I.46 Pertumbuhan Impor Batu Bara India dan Ekspor Batu Bara Australia

Meningkatnya kinerja ekspor yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja ekspor CPO terutama ke Tiongkok dan Eropa. Volume ekspor CPO Kaltim pada triwulan laporan tercatat 620,33 ribu ton atau tumbuh sebesar 50,25% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 105,57% (yoy) (Grafik I.47). Melambatnya pertumbuhan volume ekspor CPO tersebut utamanya bersumber dari melambatnya ekspor CPO ke Tiongkok yang memiliki pangsa mencapai 47% terhadap total ekspor CPO Kaltim. Pada triwulan II 2021 volume ekspor CPO ke Tiongkok tercatat tumbuh 189,24% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 239,70% (yoy) (Grafik I.48). Melambatnya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh berlalunya puncak permintaan CPO untuk berbagai kegiatan *Chinese Lunar New Year* pada triwulan I 2021. Selain Tiongkok, volume ekspor CPO ke Eropa juga mengalami penurunan kinerja dari triwulan sebelumnya, yakni dari 54,70% (yoy) menjadi -29,17% (yoy). Penurunan kinerja ekspor CPO ke Eropa disebabkan oleh pengetatan kembali aktivitas dan mobilitas secara parsial dalam rangka pengendalian *third wave* COVID-19 terutama di Belanda, Jerman, dan Perancis pada awal April hingga pertengahan Mei 2021.



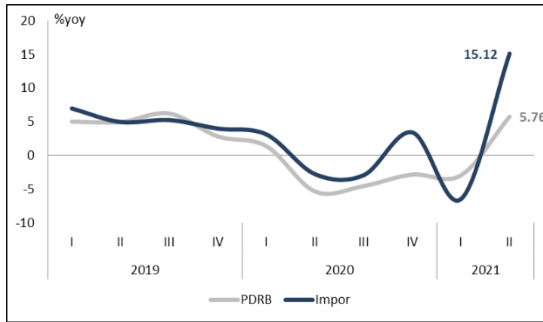
Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.47 Volume Ekspor CPO Kaltim



Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.48 Pertumbuhan Volume Ekspor CPO Ke Tiongkok dan Eropa

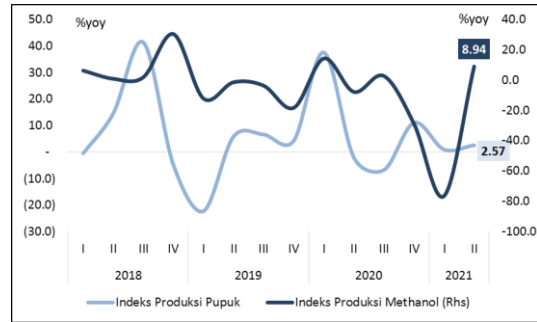
Impor

Kinerja impor Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya kinerja industri pengolahan. Pada triwulan II 2021 impor Kaltim tercatat tumbuh sebesar 15,12% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 6,48% (yoy) (Grafik I.49). Kontraksi kinerja impor didorong oleh peningkatan kinerja industri sebagaimana tercermin dari peningkatan kinerja produksi pupuk dan methanol. Pada triwulan II 2021, produksi pupuk dan methanol mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,57% (yoy) dan 8,94% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing 0,94% (yoy) dan -76,6% (yoy) (Grafik I.50).



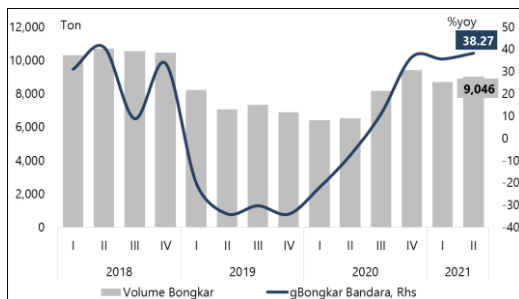
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.49 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Impor



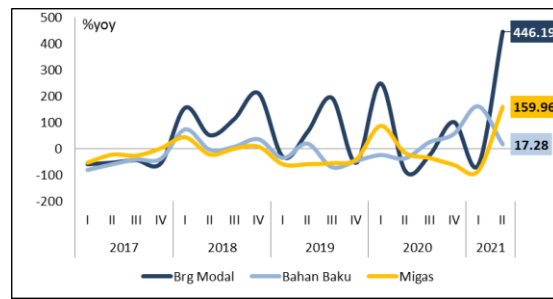
Grafik I.50 Pertumbuhan Indeks Produksi Pupuk dan Methanol

Kenaikan kinerja impor juga tercermin dari pertumbuhan aktivitas bongkar barang yang meningkat, terutama di bandar udara utama didorong oleh impor migas dan barang modal. Pada triwulan II 2021, aktivitas bongkar barang di bandara tercatat tumbuh sebesar 38,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat 35,67% (yoy) (Grafik I.51). Berdasarkan karakteristiknya, impor barang modal dan migas tercatat mengalami peningkatan masing-masing 446,19% (yoy) dan 159,96% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya masing-masing terkontraksi 61,09% (yoy) dan 83,22% (yoy). Namun demikian, kenaikan kinerja impor yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja impor bahan baku nonmigas yang tumbuh 17,28% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 162,22% (yoy) (Grafik I.52).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.51 Pertumbuhan Bongkar Bandar Udara



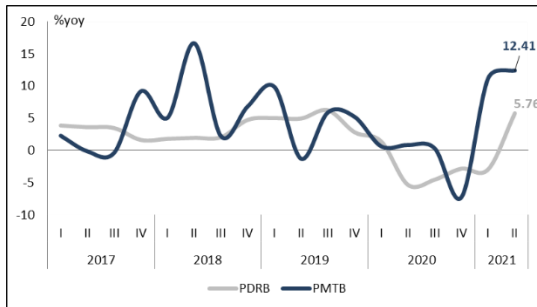
Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah

Grafik I.52 Volume Impor Barang Modal, Bahan Baku, dan Migas

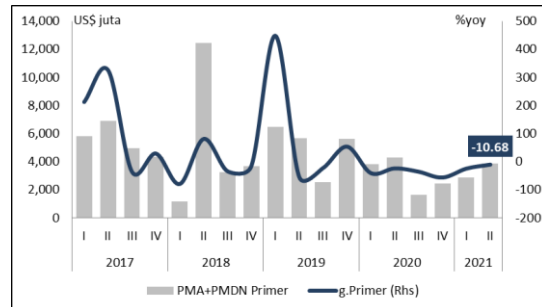
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

Kinerja PMTB (investasi) Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami perbaikan sejalan dengan peningkatan kinerja dan pembangunan instalasi pengolahan di sejumlah lapangan usaha utama. Kinerja Investasi Kaltim triwulan II 2021 tercatat tumbuh sebesar 12,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,19% (yoy) (Grafik I.53). Perbaikan tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan penanaman modal di sektor primer sejalan dengan sejumlah perluasan *pit* untuk meningkatkan produksi tambang

batu bara (Grafik I.54). Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal juga didorong oleh pembangunan dan perluasan sejumlah pabrik/instalasi pengolahan, antara lain pabrik semen di Kutai Timur, pabrik ammonium nitrat di Bontang, pabrik biodiesel di Balikpapan, serta pengembangan kilang minyak di Balikpapan (RDMP). Dengan pangsa sebesar 31,03% dari PDRB Kaltim, investasi memberikan andil 3,85% (yoy) terhadap pertumbuhan PDRB Kaltim triwulan II 2021.

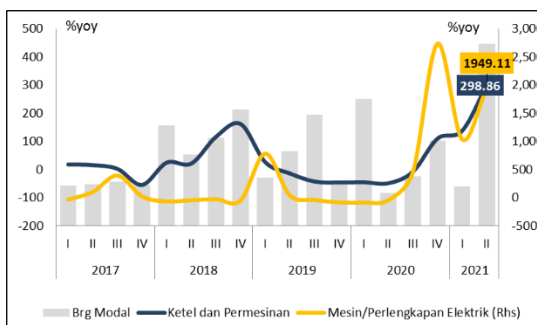


Sumber: BPS, diolah
Grafik I.53 Perkembangan PDRB - Investasi

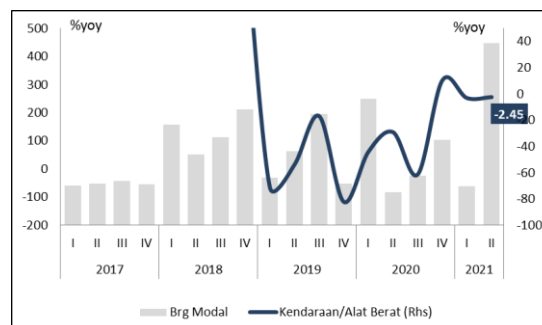


Sumber: BKPM, diolah
Grafik I.54 Penanaman Modal di Sektor Primer

Membbaiknya kinerja PMTB (investasi) pada triwulan II 2021 juga tercermin dari meningkatnya kinerja impor barang modal. Pada triwulan II 2021, volume impor barang modal Kaltim tercatat sebesar 29,40 ribu ton atau tumbuh sebesar 446,19% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 20,96 ribu ton atau mengalami kontraksi sebesar 61,09% (yoy). Meningkatnya kinerja impor barang modal didorong oleh membaiknya kinerja impor ketel dan permesinan, kendaraan (termasuk alat berat), dan mesin/perengkapan elektrik (Grafik I.55). Kebutuhan pembangunan sejumlah pabrik/instalasi pengolahan mendorong meningkatnya kinerja impor ketel, permesinan, dan perlengkapan elektrik. Di sisi lain, peningkatan intensitas dan perluasan area pertambangan juga mendorong kebutuhan terhadap kendaraan pengangkut dan alat berat (Grafik I.56).

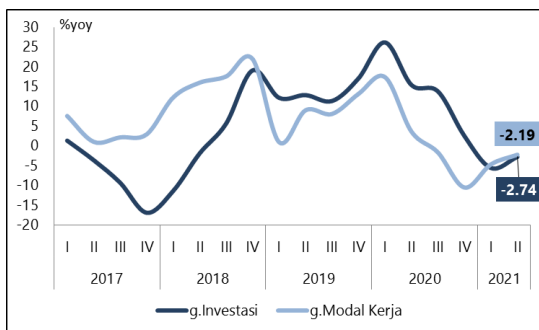


Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah
Grafik I.55 Impor Barang Modal, Ketel-Permesinan, dan Mesin-Perlengkapan Elektrik Kaltim

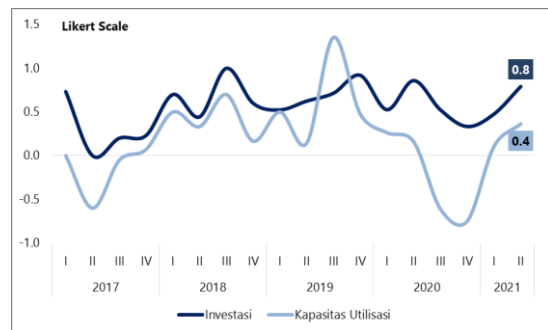


Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah
Grafik I.56 Impor Barang Modal dan Kendaraan/Alat Berat Kaltim

Membbaiknya kinerja PMTB (investasi) juga tercermin dari meningkatnya pertumbuhan baik kredit investasi maupun kredit modal kerja, serta membaiknya *Likert Scale Liaison Bank Indonesia*. Kredit investasi berdasarkan lokasi proyek di Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami kontraksi sebesar 2,74% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,54% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit modal kerja juga mengalami perbaikan, dari -4,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi -2,19% (yoy) (Grafik I.57). Membbaiknya kredit investasi dan modal kerja terjadi pada perusahaan di berbagai sektor, seperti pertanian dan perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan akomodasi-makanan minuman. Selain itu, perbaikan kinerja PMTB juga terkonfirmasi dari *Likert Scale* (LS) investasi dan kapasitas utilisasi dari hasil Liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur. LS investasi pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 0,8 (skala 5,00) dan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,5 (skala 5,00). LS kapasitas utilisasi pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 0,4 (skala 5,00) dan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,1 (skala 5,00) (Grafik I.58).



Grafik I.57 Perkembangan Kredit Investasi dan Modal Kerja Berdasarkan Lokasi Proyek di Kaltim

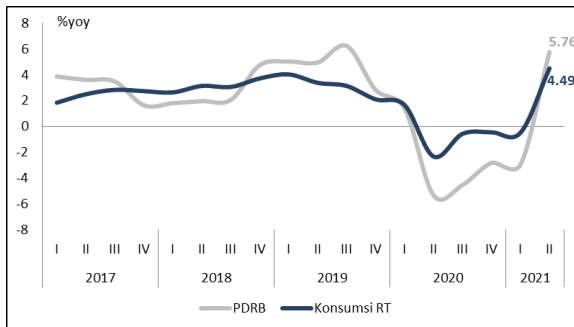


Grafik I.58 LS Investasi dan LS Kapasitas Utilisasi Liaison Bank Indonesia Kaltim

Konsumsi Rumah Tangga

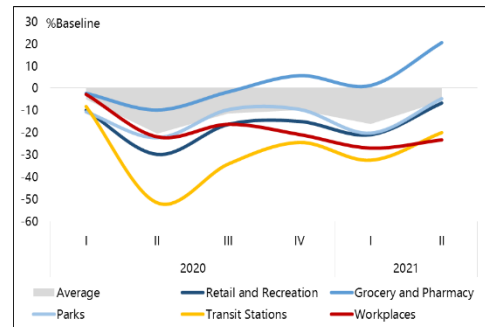
Konsumsi rumah tangga (RT) pada triwulan II 2021 melanjutkan tren perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Pada triwulan II 2021, konsumsi Rumah Tangga (RT) mencatat pertumbuhan sebesar 4,49% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,49% (yoy) (Grafik I.59). Perbaikan kinerja konsumsi RT didorong oleh perbaikan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terkonfirmasi dari data *Google Mobility Report* di Kaltim. Data tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas masyarakat di luar rumah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perubahan pendekatan penanganan pandemi dari PPKM “Kaltim *Silent*” yang bersifat menyeluruh, menjadi PPKM berbasis mikro, yang diikuti dengan tren penurunan kasus harian. Aktivitas masyarakat di tempat perbelanjaan seperti *grocery and pharmacies* serta *retail*

& *recreation* mengalami peningkatan dari masing-masing sebesar 1,16% dan -21,01% menjadi 20,43% dan -6,75% (Grafik I.60).



Sumber: BPS, diolah

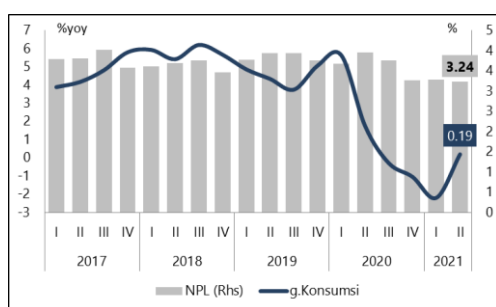
Grafik I.59 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi RT



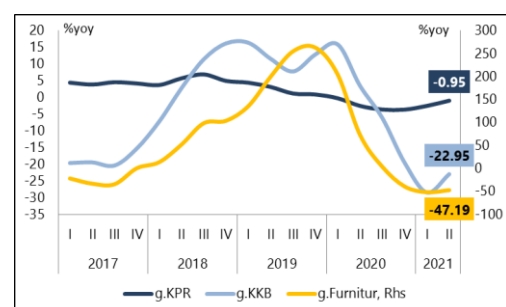
Sumber: Google, diolah dari baseline awal sebelum C-19

Grafik I.60 Google Mobility Report

Berlanjutnya tren perbaikan kinerja konsumsi RT pada triwulan II 2021 tercermin oleh membaiknya pertumbuhan kredit dan kualitas kredit konsumsi. Di sisi keuangan, kredit konsumsi mencatat pertumbuhan sebesar 0,19% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -2,20% (yoy) (Grafik I.61). Perbaikan kredit konsumsi tersebut diiringi oleh perbaikan rasio NPL dari 3,28% menjadi 3,24%. Berdasarkan disagregasinya, membaiknya pertumbuhan kredit konsumsi bersumber dari membaiknya pertumbuhan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit *furniture (durable goods)*. Baik KPR, KKB, maupun kredit *furniture* tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,95% (yoy), 22,95% (yoy), dan 47,19% (yoy). Namun demikian, pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing terkontraksi sebesar 2,51% (yoy), 28,44% (yoy), dan 51,70% (yoy) (Grafik I.62).



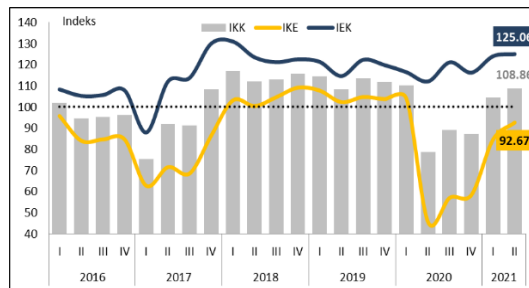
Grafik I.61 Kredit Konsumsi Kaltim



Grafik I.62 KPR, KKB dan Kredit Furnitur Kaltim

Perbaikan kinerja konsumsi RT pada triwulan II 2021 juga tercermin oleh meningkatnya keyakinan konsumen. Survei Konsumen yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kaltim pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 108,86, meningkat dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 104,33. Peningkatan keyakinan konsumen ini bersumber dari

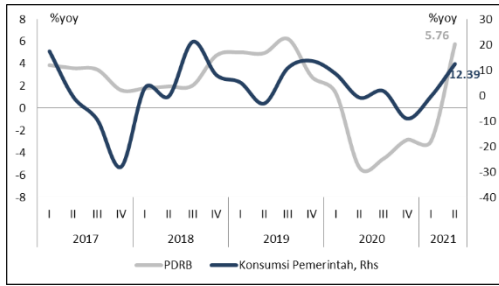
peningkatan dua indeks penyusunnya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 92,67, meningkat dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 84,61. Meski mengalami peningkatan, secara umum angka indeks yang berada di bawah 100 menandakan konsumen masih berada di level pesimis. Sementara itu, IEK pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 125,06, meningkat dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya yang tercatat 124,06 (Grafik I.63).



Grafik I.63 Indeks Keyakinan Konsumen Kalimantan Timur

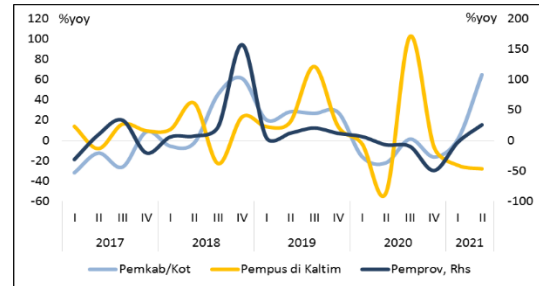
Konsumsi Pemerintah

Sejalan dengan tren perbaikan di konsumsi Rumah Tangga, kinerja Konsumsi Pemerintah di Kaltim pada triwulan II 2021 juga melanjutkan tren perbaikan terutama didorong perbaikan belanja operasional dan transfer. Pada triwulan II 2021 pertumbuhan konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 12,39% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,33% (yoy) (Grafik I.64). Membaiknya kinerja konsumsi pemerintah utamanya didorong oleh membaiknya pertumbuhan belanja APBD, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertumbuhan belanja Pemerintah Provinsi pada triwulan II 2021 tercatat 25,57% (yoy), membaik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,89% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan belanja Pemerintah Kab/Kota tercatat 64,75% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 1,29% (yoy). Adapun pertumbuhan belanja Pemerintah Pusat di Kaltim pada triwulan laporan terkontraksi 27,98% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,55% (yoy) (Grafik I.65). Berdasarkan fungsinya, perbaikan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan utamanya didorong oleh belanja operasional dan transfer yang tumbuh 63,52% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,13% (yoy).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.64 PDRB-Konsumsi Pemerintah



Sumber: Pemprov Kaltim, Pemkab/Kota, Kemenkeu, diolah

Grafik I.65 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kaltim, Pemprov, dan Pemkab/Kot se-Kaltim

BOKS I.1

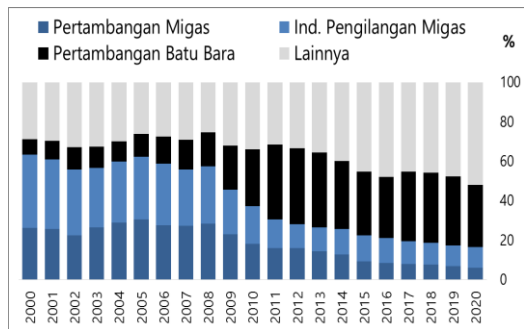
“Kelapa Sawit Sebagai The Rising Star Ekonomi Kaltim: Peluang dan Tantangan”

Transformasi Ekonomi Kaltim Dahulu, Kini, dan Nanti

Transformasi ekonomi Kalimantan Timur terus bergulir dari waktu ke waktu, mulai dari era *logging*, era migas, hingga era batu bara. Dekade 70 hingga akhir 80-an Kaltim terkenal dengan sumber kayunya. Aktivitas *logging* (penebangan kayu) menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kaltim pada masa tersebut. “Kayu Kalimantan” sangat terkenal terutama karena sumber daya *feedstock* yang cukup melimpah dan kekuatan serta *durability* dari kayu Kalimantan. Pada era tersebut, kayu Kalimantan dianggap tidak akan lapuk dan justru lebih kuat/tahan lama apabila terkena air. Selanjutnya, pada dekade 80-an era *logging* mulai berangsur beralih ke era migas. Kaltim menjadi salah satu *backbone* migas nasional, terutama gas. Migas menjadi penopang ekonomi Kaltim hingga tahun 2000. BPS mencatat bahwa pada tahun tersebut migas setidaknya menopang sekitar 63,3% perekonomian Kaltim, dengan rincian 26,4% ditopang oleh subsektor pertambangan migas dan 36,94% ditopang oleh subsektor industri pengolahan migas. Sejalan dengan *natural declining* di sektor migas, sejak 2010 secara “resmi” era migas tergantikan dengan era batu bara. BPS mencatat bahwa pada tahun tersebut pangsa subsektor pertambangan batu bara telah “menggesser” pangsa subsektor pertambangan migas, yaitu 26,72% berbanding 20,22%. Hingga tahun 2020, pertambangan batu bara menopang sekitar 31,5% ekonomi Kaltim, jauh meninggalkan migas yang menopang sekitar 16,7% ekonomi Kaltim (pertambangan dan industri pengolahan migas) (Grafik BOKS I.1. 1).

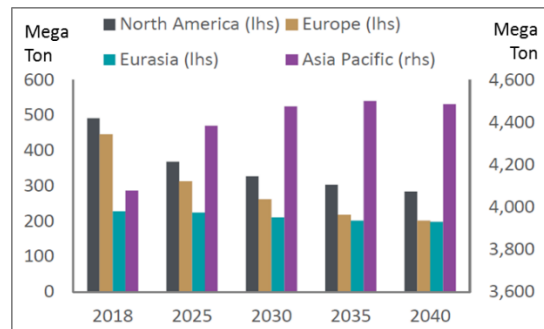
Sejalan dengan tren “*green energy*” dunia, bukan mustahil bahwa era batu bara di Kaltim juga suatu saat akan berakhir. International Energy Agency (IEA) merilis peta jalan untuk mewujudkan *net-zero carbon/emission* pada tahun 2050. Pada peta jalan tersebut, terdapat sejumlah hal penting terkait “*green energy*”. Pertama, perlunya membangun instalasi energi listrik terbarukan 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang dipasang pada saat ini. Kedua, dunia perlu menghentikan penggunaan bahan bakar fosil yang dimulai dari negara-negara maju. Di saat yang sama, negara berkembang dianggap masih relatif sulit meninggalkan bahan bakar fosil. IEA juga memperkirakan bahwa permintaan batu bara Amerika bagian utara dan Eropa akan berangsur menurun hingga pada 2040 berada pada

level setengah dari permintaan saat ini. Sementara itu, meskipun masih meningkat, IEA juga memperkirakan permintaan batu bara Asia Pasifik diperkirakan akan mulai stagnan sejak 2030 (Grafik BOKS I.1. 2). Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan bahwa sejak tahun 2025 tidak akan lagi mengizinkan pembangunan PLTU dan akan berangsur meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.



Sumber: BPS, diolah

Grafik BOKS I.1. 1 Pangsa Migas dan Batu Bara dalam Perekonomian Kaltim



Sumber: IEA (2020)

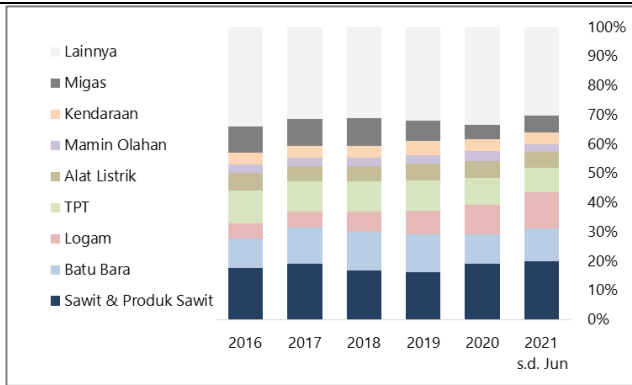
Grafik BOKS I.1. 2 Proyeksi Demand Batu Bara Dunia

Potensi dan Peluang Kelapa Sawit

Seiring dengan peran komoditas Batu Bara yang akan menurun, upaya untuk mentransformasi perekonomian Kaltim perlu segera dilakukan. Transformasi tidak hanya menemukan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan, namun juga meningkatkan nilai tambah sumber pertumbuhan yang telah ada, agar tumbuh lebih tinggi dan inklusif. Era *logging* memang menjadi *sunset*, namun tren *packaging* belanja *online*, tisu, dan *fiberboard* untuk *furniture* terus berkembang. Era migas memang sedang berlalu, namun tren plastik dan polikarbonat untuk berbagai *durable & electronic goods*, termasuk *gadget*, terus berkembang. Era batu bara juga suatu saat akan berakhir, namun tren bahan bakar rumah tangga dan transportasi dari campuran *methanol* akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

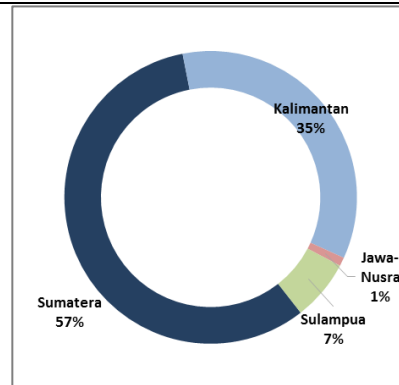
Di antara berbagai alternatif sumber pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi, produk-produk hilir kelapa sawit bisa menjadi salah satu "rising star" baik bagi Indonesia maupun Kaltim. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa kelapa sawit di Indonesia mulai ditanam pada 1848 dan dibudidayakan secara komersil pada 1910. Meski sudah dibudidayakan secara komersil sejak lama, perkembangan kelapa sawit baru mulai pesat mulai dekade 80-an. Hingga kini, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama dunia dan menyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia. LMC International Ltd mencatat bahwa minyak sawit menempati pangsa terbesar konsumsi minyak nabati dunia sebesar 36% dan berada dalam tren yang terus meningkat. Peringkat

kedua ditempati oleh minyak biji kedelai dengan pangsa 26%, diikuti oleh minyak kanola 15%, dan minyak bunga mahari 9%. Kabar baiknya, Oil World mencatat bahwa Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia dengan pangsa 53%, diikuti Malaysia 32%, Thailand 3%, dan Kolumbia 2%. Hingga bulan Juni 2021, kelapa sawit menyumbang hampir 20% devisa ekspor Indonesia, diikuti logam sebesar 12,3%, batu bara 11,3%, tekstil 8,5%, dan migas 5,7% (Grafik BOKS I.1. 3). Sekitar 57% produksi kelapa sawit Indonesia ditopang oleh Sumatera, diikuti oleh Kalimantan sebesar 35%. Sebanyak 8%, sisanya tersebar di Nusa Tenggara dan kawasan timur Indonesia (Grafik BOKS I.1. 4). Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, kelapa sawit mulai dikembangkan di Kaltim sejak tahun 1982. Sejak saat itu, peran kelapa sawit dalam menopang perekonomian Kaltim semakin membesar. Pada tahun 2010, misalnya, kelapa sawit diperkirakan menyumbang sekitar 3,57% PDRB Kaltim, dan terus meningkat hingga pada 2020 diperkirakan menyumbang sekitar 7,8% PDRB Kaltim (Grafik BOKS I.1. 5). Berkaca pada pertambangan batu bara yang menopang 7,9% PDRB Kaltim pada tahun 2000 dan 20 tahun kemudian (tahun 2020) telah mencapai 31,5% PDRB Kaltim, bukan tidak mungkin kelapa sawit juga akan menopang lebih dari 30% PDRB Kaltim 20 tahun lagi.



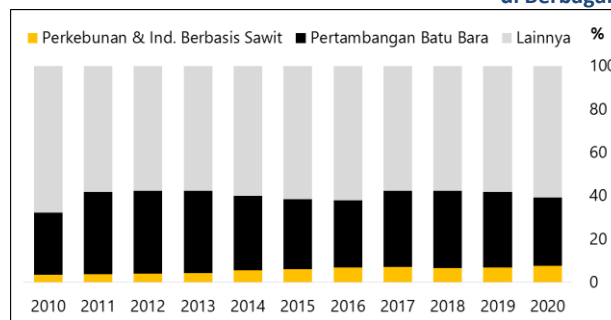
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik BOKS I.1. 3 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Indonesia



Sumber: BPS, diolah

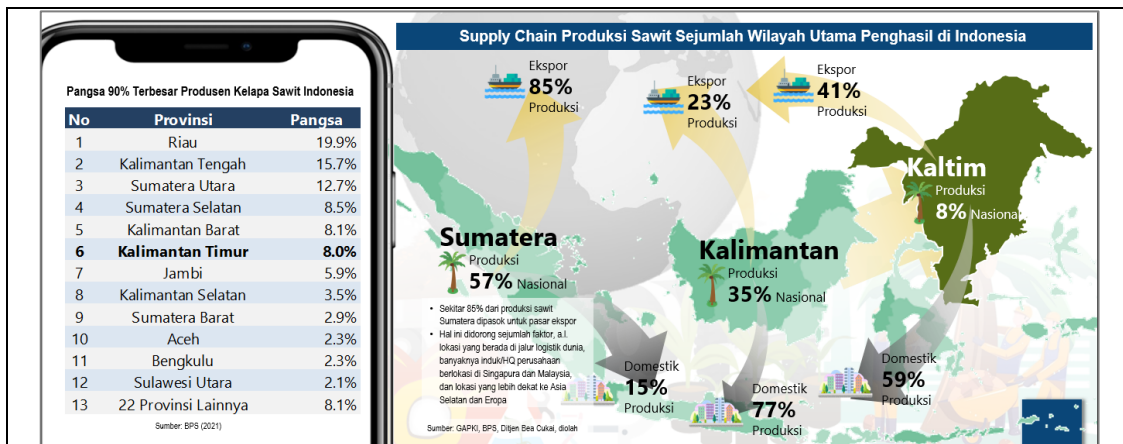
Grafik BOKS I.1. 4 Pangsa Produksi Sawit di Berbagai Wilayah Indonesia



Sumber: BPS diolah

Grafik BOKS I.1. 5 Pangsa Batu Bara & Kelapa Sawit dalam Perekonomian Kaltim

Kalimantan Timur termasuk ke dalam 10 besar provinsi produsen kelapa sawit di Indonesia dan mayoritas produksinya digunakan untuk menopang permintaan domestik. BPS mencatat bahwa hampir 92% produksi kelapa sawit nasional berasal dari hanya 12 provinsi. Kalimantan Timur menempati urutan ke-6 provinsi penghasil sawit terbesar dengan pangsa sekitar 8%, setelah Kalimantan Barat dengan pangsa 8,1%. Provinsi penghasil sawit berikutnya setelah Kalimantan Timur adalah Jambi, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat dengan pangsa masing-masing 5,9%, 3,5%, dan 2,9%. Untuk Pulau Kalimantan sendiri, produksi sawit terbesar berasal dari Kalimantan Tengah yang berada di urutan ke-2 nasional dengan pangsa 15,7%. Sementara dari segi rantai suplai, mayoritas (sekitar 59%) produksi sawit Kaltim ditujukan untuk menopang permintaan domestik, terutama untuk Pulau Jawa. Sisanya, sekitar 41% produksi sawit Kaltim ditujukan untuk pasar ekspor, terutama Tiongkok, Eropa, Malaysia, India, Pakistan, dan lainnya. Sejalan dengan Kaltim, mayoritas (sekitar 77%) produksi sawit se-Kalimantan juga ditujukan untuk menopang permintaan domestik. Namun demikian, kondisi berbeda terjadi di Sumatera yang mayoritas (sekitar 85%) produksinya ditujukan untuk pasar ekspor (Gambar BOKS I.1. 1).

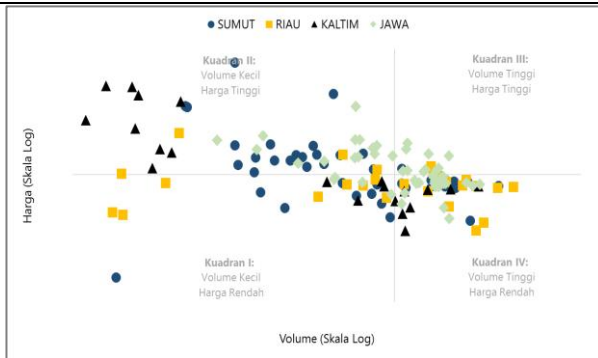


Sumber: GAPKI, BPS, Ditjen Bea Cukai, diolah

Gambar BOKS I.1. 1 Produksi dan Rantai Pasok Kelapa Sawit Provinsi-Provinsi di Indonesia

De-Hilirisasi Kelapa Sawit: Tantangan di Tengah Tingginya Harga CPO

Salah satu tantangan utama adalah mendorong hilirisasi kelapa sawit di Kaltim pada produk hilir bervolume besar. Asesmen Bank Indonesia Provinsi Kaltim menemukan bahwa berdasarkan SITC (Standard International Trade Classification), jumlah produk berbasis kelapa sawit di Kaltim mencapai 21 jenis, mulai dari *upstream* (hulu), *midstream*, maupun *downstream* (hilir). Jumlah tersebut hanya terpaud sedikit di bawah provinsi sawit terdepan seperti Riau yang mempunyai 26 jenis (Grafik BOKS I.1. 6). Namun, angka tersebut sangat jauh di bawah wilayah hilir sawit terdepan seperti Pulau Jawa dan Sumatera Utara, yang masing-masing mempunyai 48 jenis produk berbasis kelapa sawit. Dari 21 jenis produk berbasis sawit yang dihasilkan di Kaltim, sekitar 67% atau 14 jenis merupakan produk *midstream* dan sekitar 29% atau 6 jenis merupakan produk *downstream*. Apabila ditinjau dari volumenya, di antara 14 jenis produk *midstream* sawit Kaltim, 50% di antaranya diproduksi dalam volume yang cukup besar. Namun, di antara 6 jenis produk *downstream* sawit Kaltim, 100% masih diproduksi dalam volume kecil. Sebagai perbandingan, 52% dari 23 jenis produk *midstream* dan 67% dari 3 jenis produk *downstream* sawit di Riau diproduksi dalam volume yang besar. Pulau Jawa sebagai daerah hilir sawit terdepan tentu lebih *advance* di mana 66% dari 32 jenis produk *midstream* dan 60% dari 15 jenis produk *downstream* diproduksi dalam volume yang besar (Tabel BOKS I.1. 1).



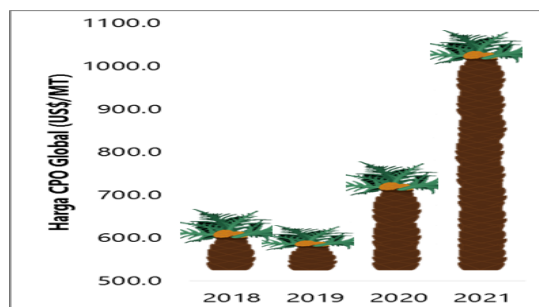
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah
Grafik BOKS I.1. 6 Kuadran Produk Berbasis CPO Kaltim vs Wilayah Sawit Terdepan

Tabel BOKS I.1. 1 Pangsa Produk Midstream dan Downstream Berdasarkan Skala

Wilayah	Skala Produksi	Mid stream	Down stream
Sumut	Vol Besar	43%	27%
	Vol Kecil	57%	73%
Riau	Vol Besar	52%	67%
	Vol Kecil	48%	33%
Kaltim	Vol Besar	50%	0%
	Vol Kecil	50%	100%
Jawa	Vol Besar	66%	60%
	Vol Kecil	34%	40%

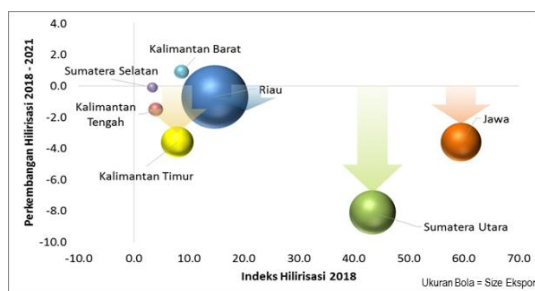
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Tantangan utama lainnya adalah melonjaknya harga CPO dunia 3 tahun terakhir yang justru menjadi disinsentif bagi hilirisasi sawit Indonesia, termasuk di Kaltim. Sampai dengan bulan Juli, rerata harga CPO internasional pada 2021 mencapai 1.048 dolar AS per MT. Harga tersebut merupakan yang tertinggi setelah 2011 mencapai 1.193 dolar AS per MT, dan pernah menyentuh harga terendah pada 2019, yaitu 601 dolar AS per MT (Grafik BOKS I.1. 7). Tingginya harga CPO internasional ini tentunya merupakan kabar baik bagi pelaku usaha sawit nasional. Namun di sisi lain, kenaikan harga sawit ini membawa suatu tantangan tersendiri bagi upaya transformasi ekonomi Indonesia, termasuk Kaltim, yaitu indikasi adanya fenomena *de-hilirisasi*. Indikasi ini dapat menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang ada belum efektif mendorong hilirisasi dan harga CPO yang tinggi sangat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memfokuskan produksi dan penjualannya pada produk *upstream* s.d. *early midstream*. Tidak menutup kemungkinan juga, faktor pandemi di seluruh belahan dunia yang mendorong *refocusing* permintaan masyarakat dunia kepada *basic needs/basic foods* sehingga produk-produk tersier seperti kosmetik, sabun, parfum, biskuit, es krim, dan lainnya yang menggunakan bahan kimia organik dari sawit menurun permintaannya.

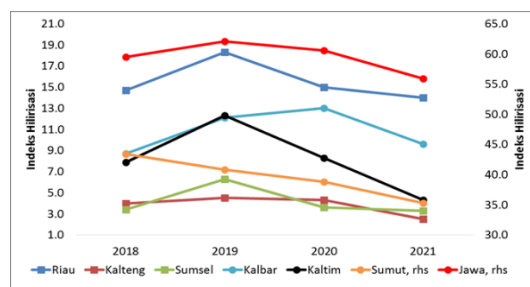


Sumber: World Bank, diolah
Grafik BOKS I.1. 7 Perkembangan Harga Sawit Dunia

Indikasi dehilirisasi industri kelapa sawit dalam dua tahun ke belakang ini terlihat dari semakin sedikit jenis dan mengecilnya volume produksi produk *midstream* dan *downstream* di sejumlah Provinsi termasuk di Kaltim. Pada sejumlah wilayah juga terjadi peningkatan jenis dan membesarnya produksi produk *upstream* sampai dengan *early upstream*. Sebagai contoh, terdapat 15 jenis produk *midstream* – *downstream* kelapa sawit di Sumatera Utara yang diekspor pada 2018, namun tidak ditemukan lagi hingga Semester I – 2021, di antaranya *solid fractions of unrefined palm oil*, *RBD palm stearin with an iodine*, produk/preparat *cream* pencuci permukaan kulit, bahan preparat aktif cair untuk mencuci, gliserol, gliserol air, gliserol alkali, dan politetrametilen eter glikol. Di Kaltim sendiri setidaknya terdapat 4 jenis produk *midstream* – *downstream* kelapa sawit yang pada 2018 pernah diekspor, namun tidak lagi hingga Semester I – 2021, yaitu bahan preparat aktif yang dilapisi sabun/deterjen, bahan preparat aktif yang dilapisi sabun/deterjen untuk campuran obat-obatan, asam lemak monokarboksilat untuk industri, dan asam lemak monokarboksilat non-industri. Indikasi dehilirisasi ini juga terjadi di wilayah sawit maupun hilir sawit utama lainnya, seperti Riau, Kalteng, dan Pulau Jawa (Grafik BOKS I.1. 8 dan Grafik BOKS I.1. 9). Dehilirisasi menjadi perhatian penting karena nilai tambah produk berbasis kelapa sawit yang dihasilkan terdegradasi, yang juga membawa dampak pada penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga. Selain itu, dehilirisasi juga berpotensi menyebabkan penurunan *backward* maupun *forward linkage* pada berbagai sektor ekonomi lainnya. Produk-produk yang bersifat *upstream* juga lebih rentan terhadap gejolak harga di tingkat global, dan sebaliknya, produk yang lebih *downstream* lebih tahan terhadap gejolak harga.



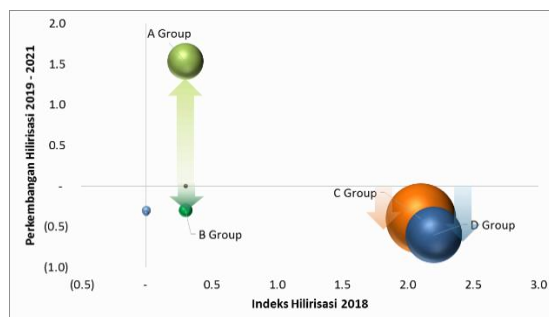
Sumber: Ditjen Bea Cukai, BPS, diolah
Grafik BOKS I.1. 8 Pemetaan Wilayah Produsen Hilirisasi Berbasis Sawit



Sumber: Ditjen Bea Cukai, BPS, diolah
Grafik BOKS I.1. 9 Perkembangan Hilirisasi Berbasis Sawit Berbagai Wilayah

Pada level korporasi/grup korporasi, dehilirisasi kelapa sawit di Kaltim terjadi pada sebagian besar grup korporasi besar. Dehilirisasi di Kaltim ini terjadi pada 4 dari 5 grup korporasi besar. Sebagai gambaran, salah satu grup korporasi sawit Kaltim yang berkantor pusat di kawasan Eropa mengalami penurunan jenis maupun mengecilnya volume produksi

sejumlah produk *mid-downstream*. Misalnya, minyak sawit olahan padat yang mengandung yodium, minyak sawit olahan cair yang mengandung yodium, minyak kernel sawit mentah, dan PFAD asam lemak monokarboksilat industri. Adapun tiga grup korporasi lain yang juga mengalami dehilirisasi masing-masing berkantor pusat di kawasan Eropa, Malaysia, dan Singapura. Grup ini juga mengalami penurunan jenis maupun mengecilnya volume produksi sejumlah produk *mid-downstream*, seperti bahan preparat aktif yang dilapisi sabun/deterjen, bahan preparat aktif yang dilapisi sabun/deterjen untuk campuran obat-obatan, dan asam lemak monokarboksilat non-industri. Namun demikian, terdapat satu grup korporasi sawit Kaltim yang berkantor pusat di Singapura yang justru mengalami peningkatan nilai tambah hilirisasi yang cukup signifikan (Grafik BOKS I.1. 10).



Sumber: Ditjen Bea Cukai, BPS, diolah

Grafik BOKS I.1. 10 Pemetaan Grup Korporasi Sawit Kaltim, yang Sebagian Mengalami De-hilirisasi

Upaya yang Diperlukan ke Depan

Mengembangkan berbagai produk hilir berbasis kelapa sawit yang efisien, berkesinambungan, dan bervolume besar membutuhkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan ekosistem yang mendukung. Semakin hilir suatu produk, semakin meningkat nilai tambah dan kompleksitasnya. Produk hulu (*upstream*) sawit tentu membutuhkan bahan baku/penolong yang lebih sedikit, teknologi yang relatif sederhana, kebutuhan tenaga kerja terampil yang lebih sedikit sementara tenaga kerja *low skill* lebih banyak, dan biaya produksi yang relatif lebih murah. Ketika suatu industri mengolah produk *intermediate/midstream*, terjadi peningkatan kebutuhan bahan baku dan penolong dengan teknologi yang semakin kompleks dan biaya produksi yang lebih tinggi. Selain itu, kebutuhan terhadap tenaga terampil dengan keahlian khusus sesuai spesifikasi produk semakin tinggi. Lebih lanjut, ketika industri memproduksi produk di kategori hilir/*downstream*, kebutuhan bahan baku dan penolongnya sangat banyak dan sangat variatif. Kebutuhan teknologi yang dipakai juga dituntut untuk dapat dimodifikasi (*custom specification*) yang tentunya berdampak pada biaya produksi yang lebih mahal, dengan kebutuhan tenaga kerja terampil

dan *distinctive*. Infrastruktur fisik dibutuhkan, untuk mendapatkan faktor produksi yang efisien, sehingga biaya bahan baku/penolong, biaya teknologi, dan biaya produksi bisa ditekan. Selain itu, juga dibutuhkan infrastruktur sosial yang akan mendukung ketersediaan tenaga kerja terampil.


Mengembangkan berbagai produk hilir berbasis kelapa sawit yang efisien, berkesinambungan dan bervolume besar membutuhkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) serta beberapa faktor penting lainnya. *Concern* konsumen pada produk hulu (*upstream*) lebih bersifat masal dan berfungsi dasar. Sebagai contoh, minyak goreng kelapa sawit, yang di Indonesia tersedia dalam berbagai merk dan ukuran, serta berfungsi dasar: digunakan pada hampir seluruh jenis makanan olahan. Sementara itu, pada produk *intermediate/midstream*, *concern* konsumen lebih bervariasi dan cenderung bersifat sekunder. Sebagai contoh, bahan campuran dari lemak sawit untuk membuat cokelat dan es krim, yang keduanya berbeda dan tidak semua orang membutuhkan. Adapun pada produk hilir/*downstream*, *concern* konsumen lebih *personalized/customized* dan fungsinya lebih tersier. Sebagai contoh, sabun dan kosmetik. Ada konsumen yang ingin sabun yang mengurangi minyak di wajah, ada pula yang ingin membuat wajah terlihat lebih cerah, ada pula yang menjaga kelembapan wajah, mengurangi penuaan kulit, dan berbagai kebutuhan personal lainnya. Lagipula, barang-barang seperti itu jauh lebih tersier dan dibutuhkan oleh orang-orang tertentu (yang memang *concern* terhadap hal tersebut). Sehingga untuk menghasilkan produk hilir yang mempunyai keunggulan kompetitif, *positioning* sebuah produk, potensi *demand* dan *market size* menjadi penting. Produk hilir yang dapat diproduksi dengan sangat efisien tentunya tidak akan berkembang apabila tidak ditopang oleh *demand* yang juga besar, maupun fungsi yang lebih unggul dibandingkan dengan produk substitusinya.

Tercapainya hilirisasi kelapa sawit dapat dioptimalkan melalui kerjasama antarpihak dengan dukungan kebijakan yang menjadi katalisator percepatan hilirisasi. Untuk mendukung keunggulan komparatif dalam pengembangan hilirisasi sawit, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu menempuh beberapa hal. **Pertama**, kebijakan dan stimulus yang konsisten, terutama terkait dengan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, insentif pajak dan sewa lahan di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, kepastian keberlanjutan program biodiesel (B30 atau B40, dst), peningkatan stimulus dan pendampingan untuk peremajaan sawit milik petani/plasma, serta kepastian perpanjangan atau penghentian moratorium pembukaan lahan sawit yang berlaku hingga akhir tahun 2021 ini. **Kedua**,

pembenahan infrastruktur, terutama yang menghubungkan sentra perkebunan dengan kawasan industri, pelabuhan, dan alur pelayaran domestik – ekspor. Untuk itu, kualitas jalan yang baik, ketersediaan listrik, pelabuhan yang dikelola dengan baik, serta dukungan infrastruktur lainnya menjadi penting. **Ketiga**, pembenahan aspek hukum terkait kepastian tata ruang dan lahan. Industri kelapa sawit di Kaltim, terutama yang mempunyai hak pengelolaan lahan perkebunan, seringkali didapati bahwa lahan yang telah memiliki izin tidak benar-benar *clean* di lapangan. Sehingga, kerap kali perusahaan harus berhadapan dengan masyarakat. **Keempat**, mendukung penataan *value chain (backward-forward)*, seperti mendukung pengembangan industri pakan ternak dari bungkil dan pelepah sawit, mendukung pengembangan pembangkit listrik dari biomass dan limbah cair sawit, mendukung pengembangan desentralisasi industri makanan olahan seperti biskuit, coklat, es krim. Selain itu, perlu dukungan yang lebih besar untuk pengembangan hilirisasi *coal to methanol* di Kaltim sehingga suplai metanol dalam negeri bertambah. Methanol adalah salah satu bahan tambahan pembuatan bahan bakar nabati (BBN) yang akan dicampur dengan solar menjadi biodiesel/biosolar. Untuk mendukung keunggulan komparatif ini, lembaga penelitian juga perlu terlibat aktif dalam mengembangkan *prototype* produk hilir sawit yang baru dan model kerjasama pengembangan kurikulum dengan dunia usaha. Selain itu, asosiasi dan dunia usaha juga perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, agar implementasi kebijakan di lapangan dapat berjalan lebih optimal. Sebagai tambahan, dunia usaha juga perlu mendukung *scaling up prototype* produk hilir yang diinisiasi lembaga penelitian. Dunia usaha juga perlu senantiasa melakukan inovasi dan efisiensi pada proses produksi. Pendampingan terhadap petani/plasma di hulu juga perlu ditingkatkan agar terlaksana *good agricultural practices* terutama di perkebunan rakyat.

Aspek	Produk Dasar/Hulu	Produk Menengah/ Intermediate	Produk Advance/ Hilir
Tujuan: Nilai Tambah	Rendah	Menengah	Tinggi
Kompleksitas Produk	Rendah	Menengah	Tinggi
Kebutuhan Bahan Baku/ Penolong	Sedikit	Banyak	Banyak dan Variatif
Kebutuhan Teknologi	Sederhana	Mulai Rumit	Need for Custom Specification
Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil	Rendah dan Melimpah	Menengah dan Selected	Tinggi dan Distinctive
Biaya produksi	Rendah	Menengah	Tinggi
Concern Konsumen	Masal	Bervarian	Lebih Personal/ Customized
Fungsi	Dasar	Sekunder	Tersier

Hilirisasi Sebagai Bagian dari Global Value Chain




Ekspor Oleochemical dari Sawit Indonesia ke Eropa. Digunakan untuk Berbagai Jenis Kosmetik

Lesson Learned:

- Kemampuan untuk menciptakan produk hilir secara efisien penting.
- Memastikan produk tersebut "laku" juga tidak kalah penting, produk yang lebih *advance* cenderung dapat terserap di negara yang *high income*.
- Hilirisasi juga merupakan bagian dari dinamika Global Value Chain (GVC) yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis perusahaan induk.

Policy Implications

Comparative Advantage: Efficiency Matters



Competitive Advantage: Positioning, Demand, and Market Size Matters

Pemerintah pusat dan daerah:

- Kebijakan dan stimulus yang konsisten (B30, export levy)
- Kebijakan pembentukan demand (B30, green fuel, dsb)
- Diplomasi luar negeri
- Penataan value chain (backward-forward)
- Pembenahan infrastruktur
- Kepastian tata ruang & lahan
- Mengurangi persaingan lokal vs impor
- Implementasi & pengawasan

Lembaga penelitian:

- Mengembangkan produk hilir baru
- Kerja sama kurikulum

Asosiasi & Pelaku Usaha:

- Komunikasi & koordinasi
- Scaling up produk hilir
- Inovasi dan efisiensi
- Pendampingan di hulu

Gambar BOKS I.1. 2 Upaya yang Diperlukan untuk Mendukung Hilirisasi Sawit

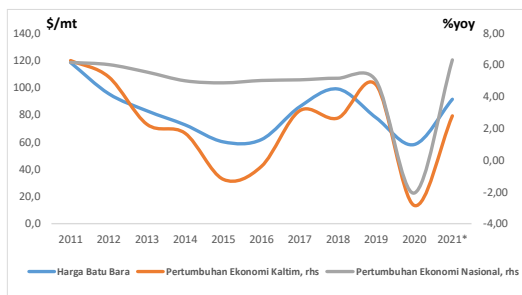
Lebih lanjut, sejumlah upaya di tingkat nasional juga perlu ditempuh untuk meningkatkan daya saing bagi produk hilir sawit. Pertama, kebijakan pembentukan *demand*. Agar produk hilir dapat senantiasa diproduksi secara berkesinambungan, pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk mendukung *demand* terhadap produk hilir tersebut. Keberlanjutan program pencampuran BBN-Solar perlu dipastikan. Selama ini, pemerintah baru menetapkan produksi dan kuota produksi BBN setiap triwulan IV (biasanya pada bulan Oktober). Untuk memberikan kepastian, perlu ditetapkan sebuah prognosa produksi dan kuota produksi BBN untuk lima tahun ke depan sehingga dunia usaha memiliki keyakinan untuk berinvestasi membangun pabrik BBN biodiesel. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kepastian terkait pengembangan EV (*Electric Vehicle*). Pasalnya, hal tersebut dapat bersifat kontraproduktif terhadap kepastian pengembangan biodiesel ke depan. Termasuk, perlu ditetapkan alternatif penyerapan BBN ke depan apabila kendaraan listrik benar-benar diproduksi secara masal, misal untuk *green avtur*, *green diesel* kendaraan bertonase besar (seperti *truck*), dan sebagainya. Kebijakan pembentukan *demand* ini pada dasarnya cukup umum dilakukan di berbagai negara dengan berbagai dalih. Misal, kebijakan Uni Eropa untuk melarang penggunaan biodiesel berbahan dasar sawit. Hal ini tentu bukan semata-mata karena faktor lingkungan, karena di balik hal tersebut, seperti dua sisi koin, terdapat kebijakan pembentukan *demand* terhadap minyak bunga matahari (*sunflower oil*) sebagai BBN campuran biodiesel. **Kedua,** diplomasi luar negeri. Diplomasi luar negeri ditujukan agar keberterimaan produk berbasis sawit lebih luas di masyarakat global. Sejumlah aktivis di Eropa sangat aktif melakukan kegiatan kampanye anti sawit. Kegiatan tersebut, salah satunya, mengkampanyekan dan membuat daftar berbagai produk (makanan & non-makanan) yang tidak mengandung sawit, atau biasa dikenal dengan "*palm free*". Hal ini tentu menjadi tantangan bagi upaya diplomasi. Selain itu, diplomasi juga dapat ditujukan pada perusahaan induk maupun *headquarter* untuk menambah fasilitas produksi hilir sawit di Indonesia. Diplomasi juga diperlukan karena hilirisasi juga merupakan bagian dari dinamika Global Value Chain (GVC) yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis perusahaan induk.

BOKS I.2

“Optimalisasi Pengembangan Kawasan Ekonomi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Kaltim yang Tinggi, Berkelanjutan, dan Inklusif”

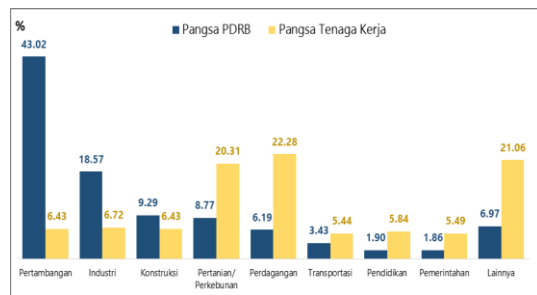
Overview KEK dan KI Kaltim

Ekonomi Kaltim masih banyak bertumpu pada sektor primer terutama batu bara sehingga tantangan terbesar adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Sektor primer masih menopang perekonomian Kaltim dan memiliki porsi sekitar 50% dari PDRB Kaltim di tahun 2020. Struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor primer, terutama pertambangan, menjadikan Kaltim rentan terhadap dinamika pasar global, relatif terbatas dalam menyerap tenaga kerja, dan sulit untuk bisa tumbuh tinggi. Selama batu bara mendominasi perekonomian Kaltim dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (Grafik BOKS I.2.1)



Sumber: BPS, olah

Grafik BOKS I.2. 1 Perkembangan HBA dan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim-Nasional



Sumber: BPS, olah

Grafik BOKS I.2. 2 Pangsa PDRB & Tenaga Kerja Kaltim

Salah satu langkah yang perlu ditempuh oleh Kaltim guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif adalah melalui percepatan transformasi berupa hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang didukung oleh pengembangan Kawasan Industri (KI)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui hilirisasi, dapat dihasilkan produk olahan SDA dengan nilai tambah komoditas yang optimal sekaligus dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi. Hilirisasi juga memberikan Kaltim peran yang lebih strategis dalam perekonomian nasional dan *Global Value Chain* (GVC). Sebagai bagian transformasi tersebut, *debottlenecking* permasalahan kawasan perlu dilakukan, dengan harapan kawasan-kawasan ini dapat menarik investasi pembangunan industri hilir sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tinggi dan berkelanjutan di Kaltim. Pembangunan

kawasan ekonomi dapat memberikan daya saing yang lebih baik antara lain karena adanya kepastian peruntukan lokasi sesuai tata ruang dan kepemilikan lahan, mempermudah pengawasan dampak lingkungan dari aktivitas industri, mempermudah penyediaan mekanisme *reward and punishment* serta meningkatkan efisiensi biaya akibat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur dan fasilitas yang terintegrasi.

Kalimantan Timur memiliki keunggulan geografis karena lebih dekat dengan negara tujuan ekspor utama khususnya Tiongkok, sehingga mendukung daya saing KI/KEK. Posisi Kaltim berada di jalur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan lalu lintas perdagangan yang ramai, sehingga Kaltim berpotensi sebagai lokasi pengembangan kawasan ekonomi yang berdaya saing. Hingga saat ini, telah terdapat Kawasan Ekonomi di Kaltim yang ditetapkan dan dibangun baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, antara lain 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK dan 3 (tiga) Kawasan Industri atau KI yang terdaftar sebagai anggota Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang terangkum pada Tabel 1. Selbihnya, masing-masing Kabupaten/Kota memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai RTRW Provinsi sebagai lokasi usaha perusahaan baru dan eksisting yang berpeluang untuk di-*upgrade* menjadi KI/KEK.

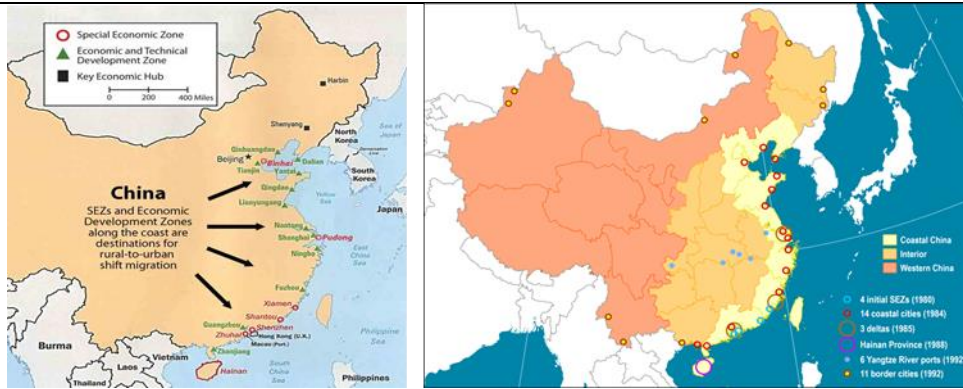
Tabel BOKS I.2. 1 Daftar KEK dan KI di Kalimantan Timur

No.	Lokasi	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Status*
1.	Bontang	Kaltim Industrial Estate	PT. Kaltim Industrial Estate	SO
2.	Balikpapan	Kawasan Industri Kariangau	Perusda Manuntung Sukses	BO
3.	Kutai Timur	Kawasan Industri Muara Wahau	PT. Etam Sukses Sejahtera	BO
4.	Kutai Timur	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK)	Perusda Melati Bhakti Satya	BO

Sumber: Himpunan Kawasan Industri dan Kementerian Investasi/BKPM RI

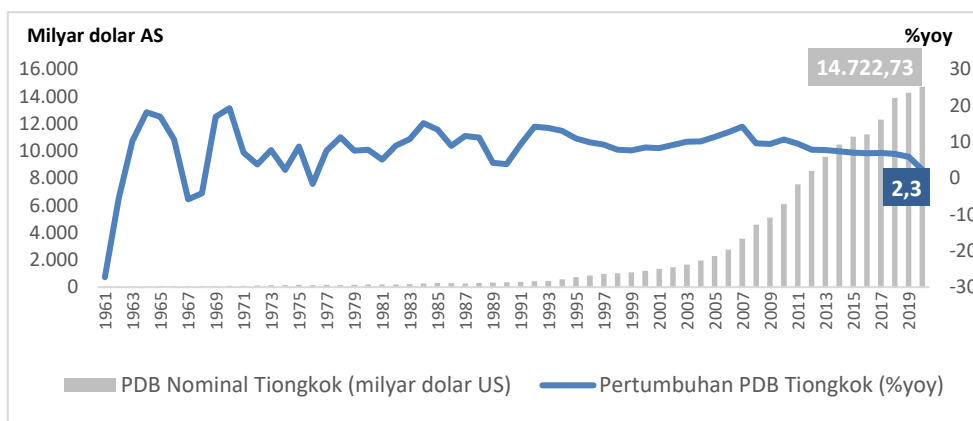
* SO = Sudah Operasional;

BO = Belum Operasional



Sumber: *Global Village Space (2020) & World Bank (2009)*

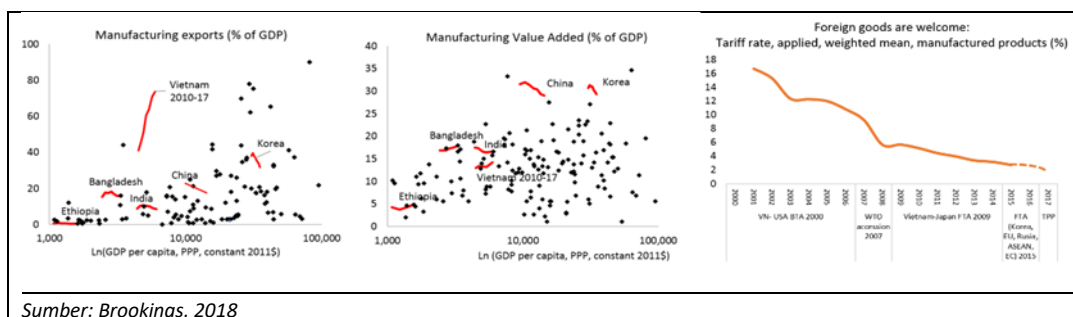
Gambar BOKS I.2. 2 Perkembangan Kawasan Ekonomi Tiongkok pada Masa Reformasi Ekonomi pada Tahun 1978 – 1990-an



Grafik BOKS I.2. 3 Dinamika PDB Tiongkok 1961-2020

Kunci keberhasilan Tiongkok mengembangkan KEK dan KI terutama karena komitmen reformasi struktural oleh Pemerintah di berbagai sektor serta dukungan dan sinergi dari berbagai pihak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam pengembangan KEK dan KI, Tiongkok mengawali dengan dasar komitmen yang kuat dari Pemerintah yang didukung oleh fasilitasi negara yang aktif dan pragmatis dari pimpinan puncak serta partisipasi proaktif pemerintah terutama terhadap Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Foreign Direct Investment / PMA*, dan penanaman modal dari diaspora (Zeng, 2011). Pemerintah Tiongkok juga memiliki tujuan pembangunan KEK/KI yang jelas, mendukung kompetisi, rantai nilai bisnis, dan jejaring sosial yang luas serta melakukan pembelajaran dan peningkatan teknologi yang berkelanjutan di samping menjamin ketersediaan tenaga kerja murah, kepastian lahan, dan insentif pajak seperti pengurangan pajak korporasi, kebijakan cukai bahan baku impor 0% untuk produk olahan *re-export*, dan pengecualian pajak pendapatan tenaga ahli luar negeri.

Komitmen yang kuat dan kebijakan struktural berorientasi pada pasar juga dilakukan oleh Vietnam melalui “Đổi Mới” sejak tahun 1986. Dalam kebijakannya, Vietnam melakukan deregulasi birokrasi dengan memberikan fasilitas kemudahan penanaman modal PMA dan membentuk iklim usaha yang pro-investor dan tidak koruptif serta mendukung perdagangan terbuka. Akibatnya, kepastian bisnis lebih jelas, *cost of doing business* dapat ditekan, dan terjadi penurunan tarif dagang yang secara dramatis berdampak pada arus investasi masuk lebih dari 10.000 perusahaan asing terutama pemain global seperti Samsung, Intel, dan LG. Perkembangan KEK dan KI Vietnam sangat pesat, di mana terdapat 260 KI aktif yang terbagi dalam 3 (tiga) zona ekonomi kunci (BW Industrial, 2021). Vietnam juga telah menjadi eksportir pakaian terbesar di ASEAN dan eksportir elektronik kedua terbesar setelah Singapura pada tahun 2017 (Financial Times, 2018). Pasca keterbukaan ekonomi dan restrukturisasi iklim berusaha, PDB per kapita Vietnam berhasil tumbuh 10 kali lipat dalam kurun waktu 30 tahun (1986-2016). Selain itu, rasio *manufacturing exports* dan *value added* juga turut meningkat yang berarti produk *Made in Vietnam* lebih dikenal di pasar global. Peringkat kemudahan berusaha di Vietnam juga meningkat secara signifikan pada tahun 2018 (Brookings, 2018). Dari Tiongkok dan Vietnam, Kaltim dapat belajar bahwa Kawasan Ekonomi yang dikembangkan dengan baik akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.



Grafik BOKS I.2. 4 **Manufacturing Exports & Value Added (%PDB) dan Penurunan Tarif Barang Pasca Reformasi Dagang Vietnam**

Tantangan dan Peluang pengembangan KEK/KI di Kaltim

Tantangan utama KEK dan KI di Kaltim terkait kepastian dan insentif penyediaan lahan serta pelabuhan sudah mulai dapat diatasi. Kesiapan lahan yang *clear and clean* terbukti telah menjadi daya tarik utama Kawasan Ekonomi di Indonesia, seperti yang terlihat pada Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang. Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Timur No. 16 Tahun 2021 yang merevisi peraturan sebelumnya berhasil menurunkan harga sewa lahan secara signifikan dan memberikan masa tenggang bebas sewa (*grace period*) yang lebih

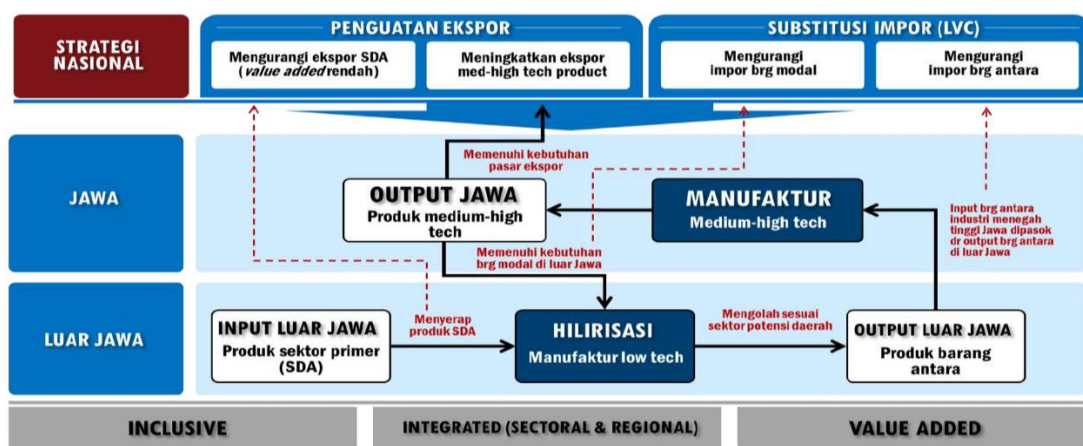
menarik sehingga menjadikan KEK Maloy lebih kompetitif. Sesuai Perbup tersebut, *grace period* bertambah dari 2 (dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Harga sewa tahunan juga diturunkan dari Rp 33.895 – Rp 101.685 per meter persegi menjadi Rp 1.750 per meter persegi dengan jangka waktu 20 tahun dan tarif sewa ditinjau setiap 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, pembangunan dan proses *commissioning test* Pelabuhan KEK MBTK juga telah diselesaikan, namun masih perlu segera disepakati terkait pengelolaan pelabuhan agar dapat segera memberikan signal positif bagi calon investor.

Komitmen kuat Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang pro-investasi hilirisasi dan profesionalitas dalam pengelolaan kawasan juga menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi. Sebagai tambahan, daya tarik kawasan perlu dilengkapi pula dengan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal sebagai *sweetener* sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok dan Vietnam. Beberapa insentif tersebut seperti kemudahan konektivitas multimoda, pengelola kawasan yang profesional dan suplai tenaga kerja yang kompeten dengan upah kompetitif. Selain itu, pengelola kawasan juga perlu menyediakan infrastruktur dasar yang terintegrasi, berbiaya rendah, dan kompetitif (sewa/jual, utilitas dan lainnya), serta fasilitasi perizinan yang mudah dan cepat tersedia *on-site* di kawasan. Pengelola kawasan dapat berkolaborasi dengan mitra strategis dalam pengelolaan KEK/KI untuk dapat membuka akses dukungan investor dan pembiayaan, jaringan bisnis dan pasar, teknologi, serta dapat berbagi resiko dan kompetensi yang saling menguntungkan.

Peluang untuk mempercepat realisasi hilirisasi di KI/ KEK semakin terbuka dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan *Online Single Submission* berbasis resiko (OSS-RBA), yang disertai dengan penguatan koordinasi/ komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta penguatan fungsi *investor relation* yang responsif dan ramah investasi. Penguatan regulasi sebagai turunan UUCK perlu disiapkan, seperti terkait dengan Perda Provinsi Kaltim No. 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, peraturan Gubernur Kaltim No. 53 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan di KEK MBTK serta Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk mendorong perusahaan kelapa sawit mengembangkan ke bisnis produk turunan di Kaltim. Penguatan regulasi tersebut perlu disertai dengan penguatan komunikasi/ koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi investasi produk-produk hilir. Selain penguatan komunikasi

di antara otoritas, Pemerintah juga perlu memperkuat fungsi *investor relation* yang responsif sebagai *monitoring unit* dan *one stop contact service* yang mensinergikan *stakeholders* terkait dalam menerima *concern* calon investor/*tenant* serta dapat segera menindaklanjuti berbagai hambatan di lapangan.

Selanjutnya, agar penguatan fungsi kawasan di Kaltim lebih efektif dan selaras dengan strategi nasional untuk penguatan ekspor dan substitusi impor, maka kawasan di Kaltim harus terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan lain di Indonesia. Dalam rangka penguatan ekspor, pengembangan hilirisasi produk-produk SDA Kaltim seperti migas, batubara, dan kelapa sawit perlu untuk terus didorong seiring dengan permintaan global yang masih tinggi terhadap berbagai macam produk turunan yang dapat dihasilkan dari SDA Kaltim seperti methanol, pupuk, LNG serta berbagai bahan kimia lainnya. Pengembangan industri manufaktur berbasis SDA / manufaktur *low technology* juga perlu didukung penyediaan barang modalnya dari Pulau Jawa dan sekitarnya yang memang telah mampu untuk menciptakan produk dengan kapasitas *medium-high technology* sehingga mampu menekan impor barang modal. Melalui dukungan tersebut, diharapkan Kaltim mampu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan berbagai macam produk barang antara seperti produk *crude palm oil* dan methanol yang nantinya akan diolah lebih lanjut di pulau Jawa menjadi produk-produk yang bernilai lebih tinggi seperti minyak goreng, peralatan kosmetik, hingga bahan pendukung industri plastik sehingga berkontribusi untuk menekan impor barang antara. Pada akhirnya, penguatan ekspor dan substitusi impor melalui pembentukan nasional *value chain*, dapat menciptakan ekonomi Indonesia maupun Kaltim untuk dapat tumbuh tinggi dan berkelanjutan.



Gambar BOKS I.2. 3 Integrasi Ekonomi Antar Wilayah Untuk Memperkuat Fungsi Kawasan



Foto: Peresmian Tol Balikpapan-Samarinda, Kota Balikpapan

Sumber: Biro Pers Pemprov Kaltim

BAB. II KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Secara umum, pagu pendapatan dan belanja APBD 2021 di tingkat Provinsi mengalami peningkatan, namun pagu pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Pada triwulan II 2021, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dari sisi realisasi pendapatan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, seiring dengan menurunnya pendapatan transfer yang didorong pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat. Demikian juga, kinerja belanja Pemprov Kaltim turut mencatatkan penurunan, realisasi belanja modal dan belanja operasional sebagai dampak refocusing anggaran. Sejalan dengan realisasi APBD Pemprov Kaltim, realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota juga menurun, seiring dengan terbatasnya aktivitas pembangunan daerah yang dapat dilakukan selama pandemi COVID-19.

II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Gambaran Umum

Pagu APBD Pendapatan

Pagu pendapatan pemprov Kaltim pada tahun 2021 mengalami peningkatan 9,44% (yoy), lebih besar dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2020, terutama disebabkan oleh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat. Jika ditinjau berdasarkan nominal pagu, pada tahun 2021 pendapatan Pemprov Kaltim sebesar Rp9,59 triliun. Pagu ini meningkat sekitar Rp827 miliar atau 9,44% (yoy) dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2020 (Rp8,76 triliun). Peningkatan pagu pendapatan utamanya didorong oleh penerimaan pajak daerah yang tumbuh 42,01% (yoy) dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2020. Namun demikian, peningkatan pagu pendapatan yang lebih besar tertahan oleh pagu pendapatan transfer yang menurun sebesar Rp4,1 triliun pada tahun 2021 atau lebih rendah 9,8% (yoy) dibandingkan dengan pagu pendapatan transfer tahun 2020 (Tabel II.1).

Tabel II.1 APBD-P Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 & 2021

	2020	2021	% Perubahan (yoy)
	APBD-P Rp. juta	APBD-P Rp. juta	
PENDAPATAN (I+II+III)	8.763.477	9.590.400	9,44
I. PAD	4.116.573	5.396.943	31,10
Pajak daerah	3.009.790	4.274.201	42,01
Retribusi daerah	16.951	17.841	5,26
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	135.155	243.642	80,27
Lain-lain PAD yang sah	954.678	861.258	-9,79
II. Pendapatan Transfer (a+b)	4.634.484	4.180.730	-9,79
a. Dana Perimbangan	4.564.974	4.143.276	-9,24
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi Umum/Khusus	4.564.974	4.143.276	-9,24
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	69.510	37.454	-46,12
Dana Penyesuaian	69.510	37.454	-46,12
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.420	12.727	2,47
Pendapatan Hibah	12.420	12.727	2,47
Pendapatan Lainnya	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Berbeda dengan pagu pendapatan Pemprov Kalimantan Timur, pagu pendapatan pemerintah kota/kabupaten di Kalimantan Timur pada tahun 2021 menurun dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2020 terutama karena penurunan pagu di Kab. Kutai Kartanegara. Pagu pendapatan pemerintah Kabupaten/KotaKota menjadi sekitar Rp.21.138 triliun, turun sekitar Rp3,2 triliun atau 13,08% (yoy). Penurunan ini utamanya terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara, yaitu menjadi sebesar Rp3,64 triliun atau menurun 36,05% (yoy) dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2020 sebesar Rp5,69 triliun. Selain itu, penurunan pagu pendapatan juga terjadi pada Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu masing-masing sebesar 27,25% (yoy) dan 23,26% (yoy). Namun demikian, penurunan pagu pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan yang terjadi pada Kota Balikpapan dan

Kota Bontang dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 16,60% (yoy) dan 16,38% (yoy) dibandingkan dengan pagu pendapatan tahun 2020 (Tabel II.2).

Tabel II.2 Pagu Pendapatan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	PENDAPATAN		% Perubahan (yoy)
	2020	2021	
	APBD-P Rp Miliar	APBD-P Rp Miliar	
Kota Samarinda	2.051,53	2.228,56	8,63
Kota Balikpapan	1.868,97	2.179,15	16,60
Kota Bontang	1.124,64	1.308,80	16,38
Kab. Kutai Kartanegara	5.698,94	3.644,45	(36,05)
Kab. Kutai Barat	2.234,11	2.254,93	0,93
Kab. Kutai Timur	3.628,60	2.849,28	(21,48)
Kab. Paser	2.381,79	1.720,79	(27,75)
Kab. Penajam Paser Utara	1.623,07	1.790,03	10,29
Kab. Berau	1.998,36	1.850,40	(7,40)
Kab. Mahakam Ulu	1.708,62	1.311,17	(23,26)
Total Kab/Kota Kaltim	24.318,62	21.137,57	(13,08)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Pagu APBD Belanja

Dibandingkan dengan peningkatan pagu pendapatan yang hanya sebesar 9,44%, pagu anggaran belanja Pemprov Kaltim pada 2021 meningkat hingga 26,06% (yoy) terutama bersumber dari komponen belanja modal yang meningkat hampir 2 kali lipat. Jika ditinjau dari nominal pagu, pada 2021 belanja Pemprov Kaltim sebesar Rp11,6 triliun. Pagu ini meningkat sekitar Rp2,4 triliun atau lebih besar 26,06% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan APBD belanja pemprov pada tahun 2021 ini didorong oleh meningkatnya pagu belanja modal hingga Rp1,98 triliun, meningkat 98,83% (yoy) dibandingkan dengan pagu belanja modal tahun 2020 sebesar Rp998,3 miliar. Belanja modal bangunan dan gedung serta belanja jalan, irigasi, serta jaringan menjadi komponen utama pendorong meningkatnya belanja modal pemprov Kaltim. Namun demikian, peningkatan pagu anggaran belanja yang lebih besar tertahan oleh komponen belanja operasional dan belanja tidak terduga yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 10,7% (yoy) dan 49,61% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2020 (Tabel II.3).

Tabel II.3 Pagu Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2020 & 2021

	2020	2021	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	APBD-P	
	Rp juta	Rp Juta	
BELANJA (I+II+III+IV)	9.214.806	11.616.186	26,06
I. Belanja Operasional	6.050.116	5.435.044	(10,17)
Belanja Pegawai	1.964.413	2.331.962	18,71
Belanja Barang	2.442.351	2.811.884	15,13
Belanja Hibah	798.025	274.679	(65,58)
Belanja Bantuan sosial	9.775	16.518	68,99
Belanja Bantuan Keuangan	835.552	1.704.242	103,97
II. Belanja Modal	998.337	1.984.967	98,83
Belanja Tanah	-	38.956	100,00
Belanja Peralatan Mesin	335.772	492.840	46,78
Belanja Bangunan dan Gedung	247.637	681.717	175,29
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	382.958	757.752	97,87
Belanja Aset Tetap Lainnya	31.970	13.702	(57,14)
III. Belanja tidak terduga	500.000	251.933	(49,61)
Belanja tidak terduga	500.000	251.933	(49,61)
IV. Transfer	1.666.353	2.240.000	34,43
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	1.666.353	2.240.000	34,43

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Sebagaimana penurunan di pagu pendapatan pemerintah, pagu anggaran belanja pemerintah Kabupaten/KotaKota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 secara keseluruhan juga mengalami penurunan hingga sekitar Rp3,6 triliun atau 13,57% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2020 terutama karena penurunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana di pagu pendapatan, penurunan pagu anggaran belanja pemerintah Kabupaten/KotaKota Provinsi Kalimantan Timur utamanya juga terjadi pada Kabupaten Kutai Kertanegara dengan penurunan sebesar 31,99% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran belanja tahun 2020. Selain itu, penurunan juga terjadi pada Kabupaten Berau, Paser, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Namun demikian, penurunan pagu anggaran belanja lebih dalam tertahan oleh peningkatan yang terjadi terutama pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencatatkan pagu anggaran belanja 2021 sebesar Rp1,83 triliun atau meningkat 19,71% (yoy) dibandingkan dengan pagu anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp1,53 triliun. Peningkatan pagu juga terjadi pada beberapa daerah lain seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Mahakam Ulu (Tabel II.4).

Tabel II.4 Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	BELANJA		% Perubahan (yoy)
	2020	2021	
	APBD-P Rp Miliar	APBD-P Rp Miliar	
Kota Samarinda	2.509,53	2.591,83	3,28
Kota Balikpapan	2.182,80	2.283,79	4,63
Kota Bontang	1.274,64	1.313,58	3,06
Kab. Kutai Kartanegara	6.093,94	4.144,45	(31,99)
Kab. Kutai Barat	2.307,63	2.241,84	(2,85)
Kab. Kutai Timur	3.612,10	2.844,28	(21,26)
Kab. Paser	2.545,29	1.909,29	(24,99)
Kab. Penajam Paser Utara	1.535,85	1.838,50	19,71
Kab. Berau	2.602,13	1.850,40	(28,89)
Kab. Mahakam Ulu	1.830,59	1.881,03	2,76
Total Kab/Kota Kaltim	26.494,49	22.899,00	(13,57)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

2.2 APBD Pemerintah Provinsi

Gambaran Umum Realisasi APBD Pemprov Kaltim

Realisasi pendapatan dan belanja APBD Pemprov Kaltim sampai dengan triwulan II 2021 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan triwulan II tahun 2021 mencapai Rp3,61 triliun atau menurun 24,26% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2020. Penurunan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II 2021 utamanya bersumber dari berkurangnya pendapatan transfer seiring dengan pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat. Secara nominal, realisasi pendapatan APBD Pemprov sampai dengan triwulan II 2021 mencapai Rp3,61, masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian realisasi pada triwulan II tahun 2020 sebesar Rp4,77 triliun (Tabel II.5). Sementara itu, realisasi belanja APBD Pemprov Kaltim sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp2,80 triliun atau menurun 3,05% (yoy) dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan II 2020 yang mencapai Rp2,89 triliun. Penurunan realisasi belanja utamanya disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja operasional sampai dengan triwulan II 2021.

Tabel II.5 Realisasi APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021

	2020		2021		Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II	APBD	Realisasi Tw-II		
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
PENDAPATAN (I+II+III)	8.763.477	4.772.187	9.590.400	3.614.252	(1.157.935)	-24,26
I. PAD	4.116.573	2.454.617	5.396.943	2.264.938	(189.680)	-7,73
II. Pendapatan Transfer	4.634.484	2.312.091	4.180.730	1.342.656	(969.435)	-41,93
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.420	5.479	12.727	6.659	1.180	21,53
	2020		2021		Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II	APBD	Realisasi Tw-II		
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
BELANJA (I+II+III+IV)	9.214.806	2.893.039	11.616.186	2.804.667	(88.372)	-3,05
I. Belanja Operasional	6.050.116	1.898.392	5.435.044	1.447.249	(451.143)	-23,76
II. Belanja Modal	998.337	166.539	1.984.967	57.358	(109.181)	-65,56
III. Belanja tidak terduga	500.000	59.962	251.933	151.094	91.131	151,98
IV. Transfer	1.666.353	768.145	2.240.000	1.148.966	380.820	49,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama karena pendapatan transfer yang menurun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, realisasi pendapatan triwulan II tahun 2021 mencapai Rp3,6 triliun atau menurun 24,26% (yoy) (Tabel II.6). Penurunan realisasi pendapatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh lebih rendahnya pendapatan transfer khususnya komponen dana perimbangan. Penurunan juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada komponen lain-lain PAD yang sah dan retribusi daerah yang masing-masing menurun hingga 75,83% (yoy) dan 52,16% (yoy). Disisi lain realisasi pendapatan pajak daerah pada triwulan II 2021 meningkat dari Rp1,97 triliun menjadi Rp2,06 triliun. Penurunan realisasi pendapatan APBD pemprov Kaltim yang lebih dalam tertahan oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah di mana pada triwulan II tahun 2021 realisasinya telah mencapai 52,32%, meningkat dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya 44,12%.

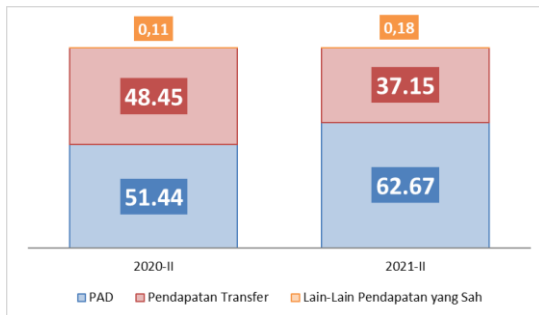
Tabel II.6 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021

	2020			2021			Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II		APBD-P	Realisasi Tw-II			
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%		
PENDAPATAN (I+II+III)	8.763.477	4.772.187	54,46	9.590.400	3.614.252	37,69	(1.157.935)	-24,26
I. PAD	4.116.573	2.454.617	59,63	5.396.943	2.264.938	41,97	(189.680)	-7,73
Pajak daerah	3.009.790	1.973.489	65,57	4.274.201	2.066.050	48,34	92.562	4,69
Retribusi daerah	16.951	5.793	34,18	17.841	2.771	15,53	(3.022)	-52,16
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	135.155	93.039	68,84	243.642	103.738	42,58	10.699	11,50
Lain-lain PAD yang sah	954.678	382.296	40,04	861.258	92.378	10,73	(289.919)	-75,84
II. Pendapatan Transfer (a+b)	4.634.484	2.312.091	49,89	4.180.730	1.342.656	32,12	(969.435)	-41,93
a. Dana Perimbangan	4.564.974	2.275.807	49,85	4.143.276	1.323.929	31,95	(951.879)	-41,83
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak & Dana Alokasi Umum/Khusus	4.564.974	2.275.807	49,85	4.143.276	1.323.929	31,95	(951.878)	-41,83
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	69.510	-	36,284	37.454	18.727	50	18.727	0,00
Dana Penyesuaian	69.510	-	36,284	37.454	18.727	50	18.727	0,00
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.420	5.479	44,12	12.727	6.659	52,32	1.180	21,53
Pendapatan Hibah	12.420	5.472	44,06	12.727	6.659	52,32	1.187	21,68
Pendapatan Lainnya	-	7	-	-	-	-	(7)	-100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

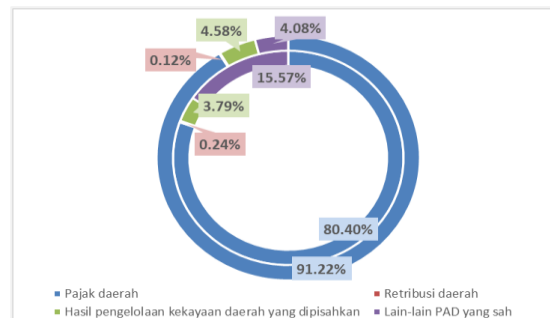
Berdasarkan komponen APBD, penurunan pendapatan transfer menyebabkan pangsa PAD dalam menyusun pendapatan APBD Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami peningkatan. Sampai dengan triwulan II 2021, pangsa pendapatan transfer Pemprov Kaltim terhadap total pendapatan mencapai 37,15%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik II.1). Menurunnya pangsa pendapatan transfer tersebut disebabkan oleh komponen dana perimbangan yang menurun. Sementara itu, pangsa pendapatan PAD mengalami peningkatan dari 51,44% pada triwulan II 2020, menjadi 62,67% pada triwulan II 2021. Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan pada komponen pajak daerah dengan pangsa mencapai 91,22% dari total PAD triwulan II 2021 (Grafik II.2). Pada saat yang sama, pangsa lain-lain pendapatan yang sah Pemprov mengalami

sedikit peningkatan dari 0,11% pada triwulan II 2020, menjadi 0,18% pada triwulan II 2021 seiring dengan meningkatnya pendapatan hibah pada periode laporan.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

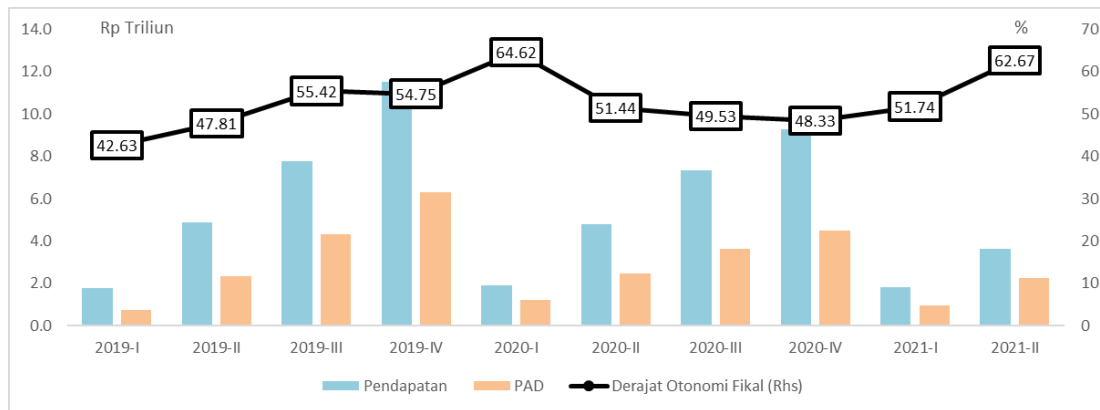
Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim (dalam %)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

Grafik II.2 Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021 (dalam %)

Peningkatan PAD menyebabkan tingkat kemandirian fiskal Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, yang tercermin dari Derajat Otonomi Fiskal (DOF). DOF Provinsi Kaltim pada triwulan II 2021 62,67%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang 51,44% (Grafik II.3). DOF merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mencari pendapatan yang bersumber dari daerahnya masing-masing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Peningkatan DOF pada periode laporan utamanya disebabkan oleh menurunnya total pendapatan pada triwulan II 2021 sehingga secara natural membuat rasio PAD terhadap total pendapatan mengalami peningkatan. Selain itu, terdapat peningkatan realisasi dari sisi pendapatan pajak daerah sebesar 4,69% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang menjadi penyebab meningkatnya DOF Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim

Realisasi Belanja

Sejalan dengan turunnya realisasi pendapatan, realisasi belanja Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021 juga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena rendahnya realisasi belanja operasional. Realisasi belanja Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021 sebesar Rp2,80 triliun, menurun sebesar 3,05% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,89triliun. Penurunan tersebut terutama bersumber dari menurunnya realisasi belanja operasional dan belanja modal yang masing-masing sebesar Rp1,44 triliun & Rp57,35 miliar, menurun 21,76% (yoy) dan 65,56% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp1,89 triliun & Rp166,53 miliar. Penurunan realisasi belanja operasional umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya belanja hibah dan belanja barang yang dilakukan sebagai dampak dari adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi yang terlihat dari peningkatan realisasi belanja tak terduga dan belanja transfer. Selain itu, rendahnya realisasi belanja juga disebabkan oleh realisasi komponen belanja modal yang hingga triwulan II 2021 hanya mencapai Rp57,35 miliar, sementara pada periode yang sama tahun 2020 tingkat realisasinya telah mencapai Rp166,54 miliar. Penurunan realisasi belanja modal utamanya disebabkan oleh rendahnya belanja peralatan mesin, bangunan & gedung (Tabel II.7). Di sisi lain, penurunan realisasi belanja yang lebih dalam lagi pada triwulan II 2021 masih tertahan oleh komponen belanja tidak terduga dan belanja transfer yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 151,98% (yoy) dan 49,58% (yoy).

Tabel II.7 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021

	2020			2021			Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II		APBD-P	Realisasi Tw-II			
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%		
BELANJA (I+II+III+IV)	9.214.806	2.893.039	31,40	11.616.186	2.804.667	24,14	(88.372)	-3,05
I. Belanja Operasional	6.050.116	1.898.392	31,38	5.435.044	1.447.249	26,63	(451.143)	-23,76
Belanja Pegawai	1.964.413	754.265	38,40	2.331.962	878.408	37,67	124.142	16,46
Belanja Barang	2.442.351	663.817	27,18	2.811.884	523.059	18,60	(140.758)	-21,20
Belanja Hibah	798.025	62.534	7,84	274.679	45.782	16,67	(16.751)	-26,79
Belanja Bantuan sosial	9.775	-	-	16.518	-	-	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	835.552	417.776	24,51	1.704.242	-	-	(417.776)	-100,00
II. Belanja Modal	998.337	166.539	16,68	1.984.967	57.358	2,89	(109.181)	-65,56
Belanja Tanah	-	-	-	38.956	-	-	-	0,00
Belanja Peralatan Mesin	335.772	70.603	21,03	492.840	20.537	4,17	(50.066)	-70,91
Belanja Bangunan dan Gedung	247.637	59.316	23,95	681.717	21.704	3,18	(37.612)	-63,41
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	382.958	34.348	8,97	757.752	15.049	1,99	(19.298)	-56,19
Belanja Aset Tetap Lainnya	31.970	2.272	7,11	13.702	68	0,50	(2.204)	-96,99
III. Belanja tidak terduga	500.000	59.962	11,99	251.933	151.094	59,97	91.131	151,98
Belanja tidak terduga	500.000	59.962	11,99	251.933	151.094	59,97	91.131	151,98
IV. Transfer	1.666.353	768.145	46,10	2.240.000	1.148.966	51,29	380.820	49,58
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	1.666.353	768.145	46,10	2.240.000	1.148.966	51,29	380.820	49,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

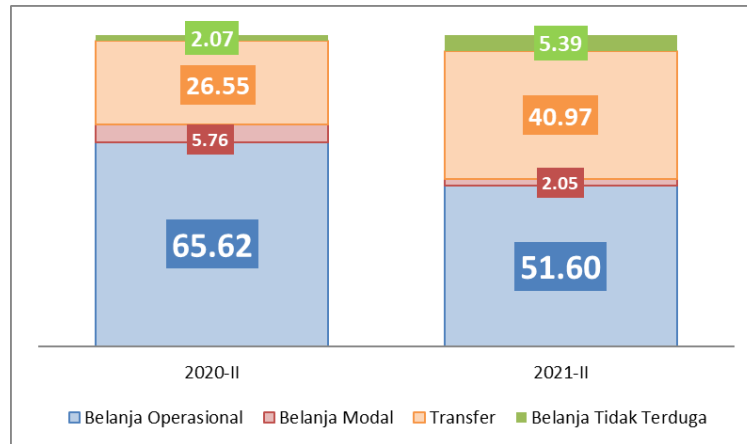
Realisasi belanja Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021 terutama bersumber dari realisasi belanja operasional yang rendah, karena intensitas belanja hibah yang menurun dan realisasi belanja bantuan keuangan yang belum ada. Realisasi belanja operasional hingga triwulan II 2021 sebesar Rp1,44 triliun. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja operasional pada periode yang sama tahun 2020 yang sebesar Rp1,89 triliun. Penurunan ini terutama didorong tidak adanya realisasi belanja bantuan keuangan hingga triwulan II 2021. Selain itu, penurunan juga bersumber dari rendahnya realisasi komponen belanja barang yang hanya sebesar Rp523 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp663,8 miliar. Namun demikian, penurunan lebih dalam pada belanja operasional tertahan oleh meningkatnya belanja pegawai pada triwulan II 2021 sebesar Rp878,4 miliar atau tumbuh 16,46% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp754,2 miliar.

Penurunan realisasi juga terjadi pada belanja modal Pemprov Kaltim sampai dengan triwulan II 2021 terutama bersumber dari masih rendahnya belanja peralatan mesin, bangunan dan gedung. Realisasi belanja modal triwulan II tahun 2021 sebesar Rp57,35 miliar atau menurun 65,56% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp166,53 miliar. Penurunan belanja modal pada triwulan II 2021 disebabkan oleh rendahnya realisasi seluruh komponen belanja modal khususnya belanja peralatan mesin, bangunan dan gedung yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan adanya penyesuaian pagu anggaran akibat dari upaya *refocusing* anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Penurunan tersebut juga merupakan cerminan dari adanya penundaan dalam proses

penyelesaian pembangunan jalan dan irigasi akibat adanya pembatasan sosial serta anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Di sisi lain, realisasi transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota/Desa dan belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan II 2021 seiring dengan relokasi anggaran untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tingkat Kabupaten/Kota. Pada triwulan II 2021, realisasi bagi hasil pajak (*transfer*) ke kabupaten dan kota sebesar Rp1,14 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp768,14 miliar. Peningkatan realisasi tersebut diperkirakan karena meningkatnya bagi hasil pajak yang dilakukan Pemprov Kaltim dalam rangka mendorong percepatan pemulihan perekonomian dan upaya pengendalian COVID-19 di Kabupaten/Kota/Desa. Peningkatan realisasi belanja hingga triwulan II 2021 juga terjadi pada komponen belanja tidak terduga. Pada triwulan II 2021, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp151,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II tahun 2020 yang hanya sebesar Rp59,96 miliar.

Berdasarkan komposisi realisasi belanja APBD, maka sejalan dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 dan *refocusing* anggaran di mana pangsa belanja operasional dan modal Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami penurunan sementara transfer maupun biaya tidak terduga mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pangsa komponen belanja operasional Pemprov Kaltim menurun dari 65,62% pada triwulan II tahun 2020 menjadi 51,60% pada triwulan II tahun 2021. Penurunan pangsa belanja operasional tersebut sejalan dengan penurunan pagu anggaran belanja operasional dari tahun sebelumnya. Komponen belanja modal juga turut mencatatkan penurunan pangsa dari 5,76% pada triwulan II tahun 2020 menjadi 2,05% pada triwulan II tahun 2021. Disisi lain, pangsa komponen belanja transfer meningkat menjadi 40,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama pada periode sebelumnya sebesar 26,55%. Pangsa belanja tidak terduga juga meningkat menjadi 5,39% (Grafik II.4).



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

Grafik II.4 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021 (dalam %)

2.3 APBD Kabupaten/Kota

Gambaran Umum Realisasi APBD Pemda Kabupaten/Kota

Sejalan dengan tingkat provinsi, baik realisasi pendapatan maupun belanja APBD Kabupaten/Kota di Kaltim pada triwulan II 2021 turut mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim hanya mencapai Rp7,88 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp8,63 triliun. Rendahnya realisasi pendapatan ini sejalan dengan penurunan pagu pendapatan pada tahun 2021. Di sisi lain, realisasi belanja di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sebesar Rp6,36 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2021 sebesar Rp6,38 triliun (Tabel II.8).

Tabel II.8 Realisasi APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021

	2020		2021		Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II	APBD-P	Realisasi Tw-II		
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar		
PENDAPATAN						
Total Kab/Kota Kaltim	24.319	8.639	21.138	7.887	(752)	-8,70
BELANJA						
Total Kab/Kota Kaltim	26.494	6.387	23.018	6.366	(21)	-0,33

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan 10 Kabupaten/Kota di Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya pagu APBD Pendapatan pada tahun 2021 dan rendahnya pendapatan transfer. Pada triwulan II 2021, realisasi pendapatan 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim telah mencapai Rp7,88 triliun, capaian tersebut menurun 8,7% (yoy) dibandingkan dengan capaian pada triwulan II 2020 sebesar Rp8,63 triliun (Tabel

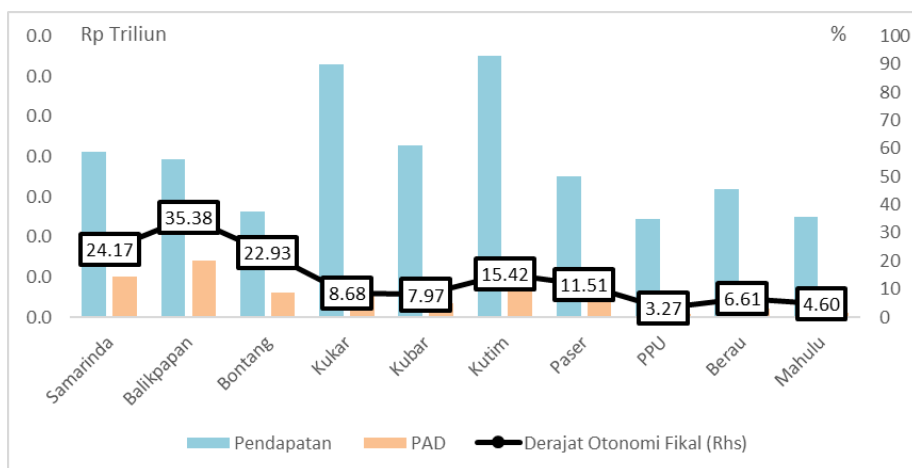
II.9). Penurunan realisasi pendapatan pada triwulan II 2021 juga sejalan dengan besaran dana transfer dari Pemprov Kaltim pada triwulan II 2021. Secara spasial, penurunan realisasi pendapatan terbesar berasal berada pada Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan yang masing-masing menurun sebesar 35,80% (yoy) dan 30,30% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Namun demikian, penurunan realisasi pendapatan APBD Kab/Kota yang lebih dalam tertahan oleh realisasi pendapatan Kabupaten Kutai Kertanegara yang meningkat hingga Rp1,26 triliun atau 295,65% (yoy) lebih besar dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2020 sejalan dengan kinerja tumbuhnya kinerja pertambangan pada periode laporan.

Tabel II.9 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	2020			2021			Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II		APBD-P	Realisasi Tw-II			
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%		
PENDAPATAN								
Kota Samarinda	2.051,53	1.158,49	56,47	2.228,56	824,93	37,02	(333,56)	(28,79)
Kota Balikpapan	1.868,97	1.131,06	60,52	2.179,15	788,40	36,18	(342,66)	(30,30)
Kota Bontang	1.124,64	728,32	64,76	1.308,80	525,15	40,12	(203,17)	(27,90)
Kab. Kutai Kertanegara	5.698,94	318,25	5,58	3.644,45	1.259,16	34,55	940,91	295,65
Kab. Kutai Barat	2.234,11	1.000,56	44,79	2.254,93	857,80	38,04	(142,76)	(14,27)
Kab. Kutai Timur	3.628,60	1.358,16	37,43	2.849,28	1.302,07	45,70	(56,08)	(4,13)
Kab. Paser	2.381,79	973,62	40,88	1.720,79	699,92	40,67	(273,69)	(28,11)
Kab. Penajam Paser Utara	1.623,07	435,56	26,84	1.790,03	488,62	27,30	53,06	12,18
Kab. Berau	1.998,36	995,46	49,81	1.850,40	639,13	34,54	(356,33)	(35,80)
Kab. Mahakam Ulu	1.708,62	539,28	31,56	1.311,17	501,77	38,27	(37,51)	(6,96)
Total Kab/Kota Kaltim	24.318,62	8.638,76	35,52	21.137,57	7.886,98	37,31	(751,78)	(8,70)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

Menurunnya realisasi pendapatan turut mempengaruhi DOF secara spasial yang relatif rendah pada triwulan II 2021 dengan Kota Balikpapan yang memiliki DOF tertinggi pada periode laporan. Realisasi DOF triwulan II 2021 untuk Kota Balikpapan sebesar 35,38%. Sementara itu, Kota Samarinda mencatat realisasi DOF terbesar kedua sebesar 24,17% dan Kota Bontang menempati peringkat ketiga terbesar dengan realisasi DOF sebesar 22,93% (Grafik II.5). Realisasi DOF terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 3,27%. Masih rendahnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara menyebabkan rendahnya PAD sehingga secara umum anggaran kabupaten tersebut masih tergantung pada dana transfer dari pusat. Relatif besarnya perbedaan realisasi DOF antara Kabupaten/KotaKota dipengaruhi juga oleh kinerja ekonomi yang melimpah-sumber daya dan aktivitas ekonomi yang terkait di suatu Kabupaten/KotaKota. Pada triwulan II 2021, harga komoditas seperti batu bara dan CPO cenderung mengalami koreksi setelah meningkat sejak triwulan IV 2020 sehingga relatif menekan PAD di Kabupaten/Kotaseperti Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Berau, dan Kutai Barat sebagai daerah penghasil utama dua komoditas tersebut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grifik II.5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim Triwulan II 2021

Realisasi Belanja

Realisasi belanja seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim menurun pada triwulan II 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan terbatasnya aktivitas pembangunan daerah yang dapat dilakukan selama pandemi COVID-19. Pada triwulan II 2021, realisasi belanja di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sebesar Rp6,36 triliun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2020 sebesar Rp6,38 triliun. Secara spasial, realisasi belanja terendah tercatat pada Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai sebesar Rp243,14 miliar. Pada triwulan II 2021, hampir seluruh daerah mencatatkan penurunan realisasi belanja, hal ini sejalan dengan terbatasnya pembangunan selama masa pandemi yang relatif menahan realisasi belanja pada masing-masing daerah.

Tabel II.10 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	2020			2021			Selisih	% Perubahan (yoy)
	APBD-P	Realisasi Tw-II		APBD-P	Realisasi Tw-II			
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%		
BELANJA								
Kota Samarinda	2.509,53	832,54	33,18	2.591,83	756,50	29,19	(76,04)	(9,13)
Kota Balikpapan	2.182,80	700,22	32,08	2.283,79	504,03	22,07	(196,18)	(28,02)
Kota Bontang	1.274,64	524,59	41,16	1.313,58	449,75	34,24	(74,84)	(14,27)
Kab. Kutai Kartanegara	6.093,94	193,23	3,17	4.144,45	1.414,59	34,13	1.221,37	632,09
Kab. Kutai Barat	2.307,63	743,29	32,21	2.241,84	652,31	29,10	(90,98)	(12,24)
Kab. Kutai Timur	3.612,10	1.304,65	36,12	2.844,28	840,57	29,55	(464,08)	(35,57)
Kab. Paser	2.545,29	704,73	27,69	1.909,29	533,28	27,93	(171,45)	(24,33)
Kab. Penajam Paser Utara	1.535,85	428,30	27,89	1.838,50	399,51	21,73	(28,79)	(6,72)
Kab. Berau	2.602,13	643,02	24,71	1.850,40	572,78	30,95	(70,24)	(10,92)
Kab. Mahakam Ulu	1.830,59	312,71	17,08	1.881,03	243,14	12,93	(69,57)	(22,25)
Total Kab/Kota Kaltim	26.494,49	6.387,27	24,11	22.899,00	6.366,46	27,80	(20,81)	(0,33)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

2.4 APBN di Wilayah Kaltim

Belanja Kementerian dan Lembaga

Meskipun pagu belanja tahunan APBN meningkat, realisasi belanja pada triwulan II 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya baik secara nominal maupun persentase terutama akibat realokasi anggaran dan sudah selesainya proyek strategis seperti pembangunan jembatan pulau Balang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, realisasi belanja APBN wilayah Kaltim pada triwulan II 2021 sebesar Rp966,84. Secara nominal, nilai tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2020 sebesar Rp2,52 triliun. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah proses realokasi/*refocusing* kembali anggaran Kementerian Lembaga (K/L) yang sempat dilakukan pada Januari-Februari 2021 sehingga masih banyaknya proyek yang dalam tahap pelelangan. Selain itu, telah selesainya pembangunan salah satu proyek strategis seperti jembatan pulau balang turut menekan realisasi belanja APBD pada periode laporan. Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim, Kota Samarinda memiliki pagu belanja APBN tertinggi dengan realisasi belanja sampai dengan triwulan II 2021 sebesar Rp315,51 miliar. Pagu belanja APBN tertinggi kedua adalah Kota Balikpapan dengan realisasi sebesar Rp268,02 miliar. Sementara itu, Kota Bontang merupakan daerah dengan nominal realisasi belanja paling rendah yaitu sebesar Rp19,36 miliar. Pada triwulan I 2021, Pemprov Kaltim mampu mencatatkan peningkatan realisasi belanja APBN menjadi sebesar Rp138,06 miliar, menurun dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2020 sebesar Rp561,56 miliar (Tabel II.11).

Tabel II.11 Realisasi Belanja APBN di Wilayah Kaltim Triwulan II 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	2020		2021		Selisih	% Perubahan (yoy)
	PAGU	Realisasi Tw-II	PAGU	Realisasi Tw-II		
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta		
Kota Samarinda	3.634.936	613.360	3.947.042	315.521	(297.839)	-0,49
Kota Balikpapan	2.737.741	651.583	2.704.465	268.026	(383.557)	-0,59
Kota Bontang	180.230	40.683	215.446	19.363	(21.320)	-0,52
Kab. Kutai Kartanegara	588.227	172.660	555.233	31.648	(141.013)	-0,82
Kab. Paser	398.146	85.895	492.548	39.143	(46.752)	-0,54
Kab. Penajam Paser Utara	188.093	40.942	270.934	25.922	(15.020)	-0,37
Kab. Berau	387.847	95.143	471.226	34.497	(60.646)	-0,64
Kab. Kutai Barat	376.816	123.164	387.259	39.669	(83.495)	-0,68
Kab. Kutai Timur	459.855	118.109	495.042	29.247	(88.862)	-0,75
Kab. Mahakam Ulu	137.463	26.564	192.980	25.729	(834)	-0,03
Prov. Kalimantan Timur	2.018.455	561.564	2.731.296	138.064	(423.499)	-0,75
Total Kalimantan Timur	11.107.809	2.529.667	12.463.471	966.841	(1.562.826)	-0,62

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim

Transfer Dana Desa

Meskipun lokasi anggaran dana desa mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun realisasi penyalurannya mengalami penurunan di semua Kota/ Kabupaten. Alokasi dana desa di Kaltim pada tahun 2021 sebesar Rp939,07 miliar untuk 841 desa. Alokasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp899,88 miliar. Realisasi dana desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) sampai dengan tahap II tahun 2021 sebesar Rp341,5 miliar, menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp721,4 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi transfer pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan terutama pada Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp145,64 miliar pada tahap II tahun 2020, menjadi Rp62,14 miliar pada tahap II tahun 2021. Kabupaten Kutai Barat juga mengalami penurunan realisasi yang cukup dalam yakni dari Rp142,67 miliar pada triwulan II 2020 menjadi Rp63,44 miliar pada triwulan II 2021.

Tabel II.12 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahap II 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Desa	2020		2021		Selisih	% Perubahan (yoy)
		Pagu 2020 (Rp Juta)	Realisasi s.d RKUN ke RKD Tahap II	Pagu 2021 (Rp Juta)	Realisasi s.d RKUN ke RKD Tahap II		
Kab. Paser	139	125.217,97	100.726,69	127.719,25	50.288,24	(50.438,46)	-50,1%
Kab. Berau	100	115.138,30	92.011,59	122.237,70	59.547,51	(32.464,07)	-35,3%
Kab. Kutai Barat	190	177.923,48	142.667,32	181.542,43	63.444,36	(79.222,96)	-55,5%
Kab. Kutai Timur	139	181.943,31	145.638,40	194.485,25	62.145,59	(83.492,82)	-57,3%
Kab. Penajam Paser Utara	30	36.490,37	29.309,01	38.775,11	15.206,10	(14.102,91)	-48,1%
Kab. Kutai Kertanegara	193	185.547,78	148.956,96	191.170,93	74.027,52	(74.929,43)	-50,3%
Kab. Mahakam Ulu	50	77.626,28	62.122,64	83.143,36	16.894,00	(45.228,64)	-72,8%
JUMLAH	841	899.887	721.433	939.074	341.553	(379.879)	-52,7%

Sumber: DPMPD Prov Kaltim

Apabila dilihat alokasi realisasinya, Pemerintah memberikan alokasi terbesar ke Non BLT. Pada triwulan II 2021, pemerintah membagi alokasi dana desa sesuai peruntukannya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Non BLT, dan Penanggulangan COVID-19. Realisasi dana desa Non BLT sebesar Rp237,39 miliar atau 25,28% dari total alokasi dana desa, sementara untuk BLT sebesar Rp34,14 miliar atau 3,6% dari total alokasi dana desa, & realisasi dana desa dalam rangka penanggulangan COVID-19 sebesar Rp70,02 miliar atau sekitar 7,46% dari total alokasi.

Tabel II.13 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I 2021

Kabupaten/Kota	Realisasi 2021 Tahap II							
	Non BLT		Penanggulangan COVID-19		BLT		Total	
	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%
Kab. Paser	37,139	29.1%	5,313	4.2%	7,836	6.1%	50,288	39.4%
Kab. Berau	46,349	37.9%	9,779	8.0%	3,419	2.8%	59,548	48.7%
Kab. Kutai Barat	41,955	23.1%	14,432	7.9%	7,058	3.9%	63,444	34.9%
Kab. Kutai Timur	43,692	22.5%	15,450	7.9%	3,003	1.5%	62,146	32.0%
Kab. Penajam Paser Utara	9,888	25.5%	3,102	8.0%	2,216	5.7%	15,206	39.2%
Kab. Kutai Kertanegara	48,661	25.5%	15,294	8.0%	10,073	5.3%	74,028	38.7%
Kab. Mahakam Ulu	9,708	11.7%	6,651	8.0%	535	0.6%	16,894	20.3%
JUMLAH	237,392	25.28%	70,021	7.46%	34,139	3.6%	341,553	36.37%

Sumber: DPMPD Prov Kaltim



Foto: Sidak Pasar TPID Kota Samarinda

BAB. III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

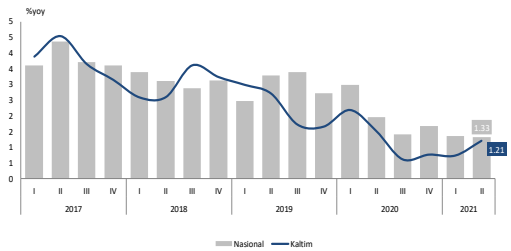
- *Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2021 berada pada level yang terjaga, meskipun lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, angka inflasi tahunan Kaltim pada periode laporan masih di bawah rata-rata Kalimantan dan Nasional.*
- *Kenaikan inflasi tersebut terutama didorong oleh inflasi pada komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat seiring dengan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Namun demikian, deflasi pada komoditas transportasi di Balikpapan yang cukup dalam masih mampu menahan laju inflasi Kaltim sejalan dengan pembatasan PPKM yang terjadi.*
- *Secara spasial, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan mengalami peningkatan laju inflasi pada triwulan ini dengan peningkatan lebih tinggi terjadi di Kota Samarinda.*

III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

3.1 Gambaran Umum

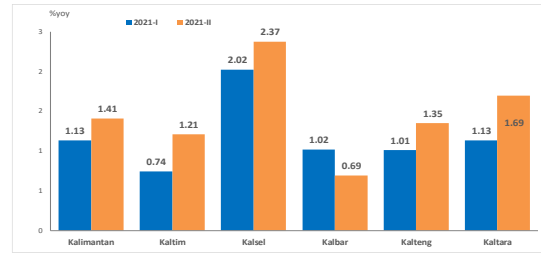
Inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2021 sebesar 1,21% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,74% (yoy), meskipun masih di bawah inflasi nasional dan inflasi Kalimantan. Inflasi Kaltim pada periode ini merupakan yang tertinggi selama pandemi terjadi, setelah empat triwulan terakhir selalu berada di bawah angka 1% (yoy). Walaupun demikian, angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 1,33% (yoy) dan angka inflasi rata-rata Kalimantan sebesar 1,41% (yoy) (Grafik III.1 dan Grafik III.2). Lebih tingginya tingkat inflasi tersebut bersumber dari adanya peningkatan tekanan inflasi pada tiga kelompok barang penyumbang inflasi di Kaltim yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan permintaan dalam rangka momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2021.

Meskipun terjadi peningkatan inflasi, Kalimantan Timur menempati urutan kedua terendah di Kalimantan. Inflasi di Kalimantan Timur masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara yang memiliki angka inflasi berturut-turut sebesar 2,37% (yoy), 0,69% (yoy) 1,35% (yoy) dan 1,69% (yoy) (Grafik III.2). Berdasarkan kota IHK, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan keduanya mengalami peningkatan inflasi pada triwulan ini, meskipun peningkatan lebih tinggi terjadi di Kota Samarinda dari semula 0,87% (yoy) pada triwulan I menjadi 1,60% (yoy) pada triwulan II. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kelompok utama penyumbang inflasi di kedua kota tersebut. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, komponen pangan secara tahunan telah mengalami inflasi sebesar 2,74% (yoy) di tengah masih relatif rendahnya inflasi dari kelompok transportasi. Pergerakan komoditas pangan cukup perlu mendapatkan perhatian karena dalam beberapa triwulan terakhir mengalami laju inflasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya dengan gejala yang masih cukup tinggi di tengah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah selama pandemi COVID-19 (Grafik III.3).



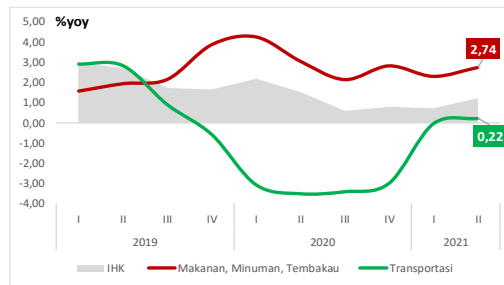
Sumber: BPS, diolah

Grafik III.1 Inflasi Kaltim & Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.2 Perbandingan Inflasi di Kalimantan



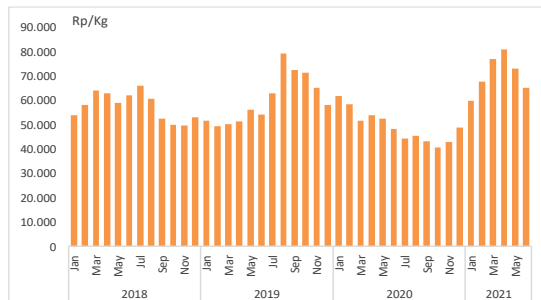
Sumber: BPS, diolah

Grafik III.3 Inflasi Kaltim berdasarkan Disagregasi Kelompok Pangan dan Transportasi

3.1.1 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

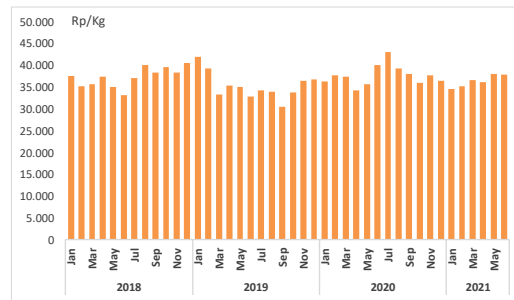
Lebih tingginya tingkat inflasi pada triwulan II 2021 terutama bersumber dari adanya peningkatan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau khususnya komoditas daging ayam ras, ikan layang dan cabai rawit. Pada triwulan II 2021, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,74% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,30% (Tabel III.1). Hal ini utamanya disebabkan oleh aktivitas perekonomian masyarakat selama Ramadhan yang secara historis selalu menunjukkan tren peningkatan khususnya dalam konsumsi bahan makanan. Memasuki bulan Ramadhan, harga sebagian besar bahan pokok utama seperti daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih dan cabai rawit secara historis mengalami kenaikan. Komoditas daging ayam ras pada triwulan ini mengalami inflasi berturut-turut sebesar 18,45% (yoy), 9,16% (yoy), dan 4,12% (yoy) dengan andil yang cukup tinggi di antara komoditas lainnya yaitu 0,32%, 0,17% dan juga 0,09% pada bulan April, Mei, dan Juni 2021 (Tabel III.2). Pada periode ini cabai rawit juga mengalami inflasi yang sangat tinggi berturut-turut sebesar 68,86% (yoy), 44,93% (yoy), dan 54,14% (yoy) dengan andil yang cukup tinggi di antara komoditas lainnya yaitu 0,20%, 0,14% dan juga 0,15% pada bulan April, Mei, dan Juni 2021 (Tabel III.2). Pantauan harga pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) juga menunjukkan gejala

harga daging ayam ras dan cabai rawit di Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik III.4 dan Grafik III.5).



Sumber: hargapangan.id, diolah

Grafik III.4 Perkembangan Harga Cabai Rawit Kaltim



Sumber: hargapangan.id, diolah

Grafik III.5 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras Kaltim

Inflasi Kaltim yang lebih tinggi pada triwulan II 2021 tertahan oleh terjaganya harga beberapa komoditas yang biasanya menyebabkan inflasi seperti bawang putih dan ikan gabus, bahkan keduanya mengalami deflasi cukup dalam. Bawang putih yang pada tahun lalu menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi Kalimantan Timur, saat ini bahkan memiliki andil yang cukup besar pada deflasi Kaltim yaitu sebesar 0,06% dengan deflasi sebesar 22,06% (yoy). Terjaganya stabilitas harga bawang putih ini merupakan salah satu buah upaya TPID Samarinda yang memiliki inisiatif untuk melakukan intervensi melalui Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU). Bentuk intervensi PD PAU adalah dengan melakukan penjualan langsung kepada rumah tangga di 58 kelurahan di Samarinda tanpa melalui pedagang besar atau pengecer. Selain bawang putih, ikan gabus juga mengalami deflasi sebesar 24,12% (yoy) dengan andil deflasi sebesar 0,05% sejalan dengan fenomena alamiah air *bangar* di Sungai Mahakam pada bulan Juni 2021 yang menyebabkan banyak ikan sungai (maupun ikan budidaya di keramba sungai) mengalami “mabuk” bahkan mati sehingga dijual dengan harga yang rendah.

Dua kelompok lain yang juga memiliki laju inflasi cukup tinggi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan II 2021, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi tahunan masing-masing sebesar 2,36% (yoy) dan 3,96% (yoy) (Tabel III.1). Laju inflasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,79% (yoy) dan 3,79% (yoy) (Tabel III.1). Seiring dengan pemberlakuan PPKM, masyarakat cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah terlebih bersamaan dengan momentum Ramadhan. Jika dilihat disagregasinya, komoditas barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin

seperti alat pembersih rumah, detergen, pewangi pakaian menunjukkan tren peningkatan inflasi pada periode ini. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami peningkatan karena di dalamnya menghitung komponen perawatan pribadi dalam rangka menunjang protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19.

Tabel III.1 Inflasi Tahunan Kaltim (yoy)

No	Kelompok Barang	Laju Inflasi	
		Tw I-21	Tw II-21
	UMUM / TOTAL	0.74	1.21
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	2.30	2.74
2	Pakaian Dan Alas Kaki	-5.68	-2.52
3	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.14	0.31
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.79	2.36
5	Kesehatan	1.90	0.93
6	Transportasi	-0.05	0.22
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0.19	0.87
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	0.49	0.42
9	Pendidikan	-0.14	-0.14
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	0.81	0.95
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	3.79	3.96

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Triwulan I 2021 (yoy)

Apr-21			May-21			Jun-21		
Komoditas Inflasi	YOY	andil	Komoditas Inflasi	YOY	andil	Komoditas Inflasi	YOY	andil
DAGING AYAM RAS	18.45	0.32	DAGING AYAM RAS	9.16	0.17	IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL	23.40	0.19
CABAI RAWIT	68.86	0.20	IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL	20.41	0.16	CABAI RAWIT	54.14	0.15
IKAN LAYANG/ IKAN BENGGOL	16.17	0.13	CABAI RAWIT	44.93	0.14	EMAS PERHIASAN	8.21	0.09
ANGKUTAN UDARA	4.63	0.07	BAYAM	58.77	0.07	DAGING AYAM RAS	4.12	0.09
BAYAM	50.14	0.06	KANGKUNG	38.35	0.07	KANGKUNG	43.57	0.08
Komoditas Deflasi	YOY	andil	Komoditas Deflasi	YOY	andil	Komoditas Deflasi	YOY	andil
IKAN GABUS	-23.37	-0.05	JAGUNG MANIS	-19.91	-0.05	IKAN GABUS	-24.12	-0.05
TOMAT	-18.51	-0.05	BAWANG PUTIH	-22.06	-0.06	CELANA PANJANG JEANS PRIA	-27.14	-0.05
AIR KEMASAN	-4.86	-0.06	CELANA PANJANG JEANS PRIA	-34.01	-0.07	AIR KEMASAN	-4.56	-0.06
CELANA PANJANG JEANS PRIA	-32.26	-0.06	AIR KEMASAN	-5.88	-0.07	ANGKUTAN UDARA	-7.88	-0.13
BAWANG PUTIH	-29.43	-0.09	BAWANG MERAH	-35.13	-0.17	BAWANG MERAH	-48.68	-0.29

Sumber: BPS, diolah

Kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok pendidikan masih mengalami deflasi meskipun mulai mengecil saat masuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pemberian subsidi/ bantuan pemerintah untuk menunjang pendidikan juga ikut menyumbang deflasi. Pada triwulan II 2021, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi 2,52% (yoy) lebih rendah jika dibandingkan dengan angka deflasi triwulan sebelumnya yaitu 5,68% (yoy). Deflasi yang mengecil juga sejalan dengan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang meningkat kinerja penjualan eceran pada kelompok komoditas yang sama yang tumbuh sebesar 53,4% (yoy), atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 28,8% (yoy). Responden menyampaikan peningkatan kinerja penjualan eceran didorong meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan/ Idul Fitri dan didukung berbagai program potongan harga. Kelompok pendidikan juga mengalami deflasi khususnya pada kelompok pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemberian

bantuan kuota internet dan yang terkini adalah pemberian subsidi bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp 2,4 juta bagi mahasiswa yang membutuhkan.

3.1.2 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kota IHK

Berdasarkan kota IHK, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan mengalami peningkatan inflasi pada triwulan ini yang didorong oleh tekanan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 1,60% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 0,87% (yoy) (Tabel III.3). Sama halnya dengan yang terjadi pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan inflasi dari semula 0,57% (yoy) menjadi 0,70% (yoy) pada triwulan II 2021 (Tabel III.3). Berdasarkan komoditas peningkatan inflasi di kedua kota tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Di Kota Samarinda, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tumbuh sebesar 2,85% (yoy) dan memiliki andil sebesar 0,76% (yoy) (Tabel III.4). Sementara itu, di Kota Balikpapan, kelompok makanan, minuman dan tembakau tumbuh sebesar 2,61% (yoy) dengan andil sebesar 0,76% (yoy) (Tabel III.4). Peningkatan tingkat inflasi tersebut pada umumnya bersumber dari permintaan komoditas pangan bergejolak yang mengalami peningkatan secara musiman selama perayaan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2021.

Tabel III.3 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk (yoy)

Wilayah	2017				2018				2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kaltim	3.89	4.54	3.65	3.15	2.59	2.60	3.61	3.24	2.99	2.71	1.73	1.66	2.19	1.52	0.62	0.77	0.74	1.21
Samarinda	3.27	4.30	4.31	3.69	2.85	2.63	2.90	3.32	3.01	2.49	1.56	1.49	2.42	1.80	0.99	0.86	0.87	1.60
Balikpapan	4.69	4.86	2.79	2.45	2.24	2.55	2.94	3.13	2.97	3.00	1.94	1.88	1.89	1.16	0.12	0.66	0.57	0.70

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.4 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk Menurut Kelompok Barang (yoy)

Kelompok Barang	Andil Inflasi Samarinda 2021-II		Andil Inflasi Balikpapan 2021-II		Laju Inflasi Samarinda 2021-II		Laju Inflasi Balikpapan 2021-II		Andil Inflasi Samarinda 2021-I		Andil Inflasi Balikpapan 2021-I		Laju Inflasi Samarinda 2021-I		Laju Inflasi Balikpapan 2021-I	
U M U M / T O T A L	1.60	0.70	1.60	0.70	0.87	0.57	0.87	0.57	0.87	0.57	0.87	0.57	0.87	0.57	0.87	0.57
Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.76	0.76	2.85	2.61	0.58	0.67	2.21	2.42	0.67	0.67	2.21	2.42	0.58	0.67	2.21	2.42
Pakaian Dan Alas Kaki	-0.05	-0.05	-1.07	-4.24	-0.24	-0.30	-5.33	-6.10	-0.24	-0.30	-5.33	-6.10	-0.24	-0.30	-5.33	-6.10
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.07	0.07	0.31	0.31	-0.06	0.00	-0.27	0.02	-0.06	0.00	-0.27	0.02	-0.06	0.00	-0.27	0.02
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.13	0.13	3.38	1.21	0.09	0.05	2.46	1.04	0.09	0.05	2.46	1.04	0.09	0.05	2.46	1.04
Kesehatan	0.04	0.04	1.08	0.50	0.10	0.01	2.37	0.62	0.04	0.01	2.37	0.62	0.04	0.01	2.37	0.62
Transportasi	0.22	0.22	1.59	-2.13	0.11	-0.16	0.76	-1.48	0.22	-0.16	0.76	-1.48	0.22	-0.16	0.76	-1.48
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0.08	0.08	1.47	0.20	0.00	0.02	0.01	0.39	0.08	0.02	0.01	0.39	0.08	0.02	0.01	0.39
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	0.01	0.01	0.80	-0.10	0.02	0.00	0.91	-0.10	0.01	0.00	0.91	-0.10	0.01	0.00	0.91	-0.10
Pendidikan	-0.02	-0.02	-0.71	0.67	-0.02	0.02	-0.71	0.67	-0.02	0.02	-0.71	0.67	-0.02	0.02	-0.71	0.67
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	0.16	0.16	1.63	-0.04	0.14	0.00	1.38	-0.04	0.16	0.00	1.38	-0.04	0.16	0.00	1.38	-0.04
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	0.19	0.19	3.68	4.32	0.17	0.25	3.18	4.56	0.19	0.25	3.18	4.56	0.17	0.25	3.18	4.56

Sumber: BPS, diolah

Laju inflasi yang lebih tinggi di Kota Balikpapan pada triwulan II 2021 tertahan oleh deflasi kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok transportasi. Inflasi Balikpapan yang relatif rendah terjadi karena kelompok transportasi masih mengalami deflasi sebesar 2,13% dengan andil yang cukup besar yaitu 0,76% (yoy). Penurunan aktivitas masyarakat seiring

dengan diberlakukannya SE Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 3 Tahun 2021, menjadi salah satu faktor panahan laju inflasi dari sektor transportasi. Pelarangan mudik tersebut berlaku mulai tanggal 6 – 17 Mei 2021 untuk seluruh moda transportasi termasuk transportasi darat dengan adanya pos penyekatan antar kota/kabupaten di Kalimantan Timur yang membuat masyarakat menunda untuk berpergian. Data perkembangan penumpang angkutan udara dan laut juga menunjukkan penurunan khususnya untuk akses transportasi dari dan/atau menuju Kota Balikpapan melalui Pelabuhan Semayang dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang *Airport* (Tabel III.5 dan Tabel III.6).

Tabel III.5 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Semester I 2021

Bandara	Jumlah Penumpang			Kumulatif Jumlah Penumpang		
	Mei 2021	Jun 2021	Perubahan	Jan-Jun 2020	Jan-Jun 2021	Perubahan
	(Orang)	(Orang)	(%)	(Orang)	(Orang)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Dajah Dawai	137	203	48,18	483	751	55,49
2. Melalan	101	117	15,84	6.015	705	-88,28
3. Kalimarau	9.945	14.625	47,06	54.967	63.743	15,97
4. SAMS Sepinggang	63.650	102.851	61,59	513.312	466.688	-9,08
5. APT Pranoto	28.027	36.068	28,69	157.143	159.062	1,22
6. Badak Bontang	218	354	62,39	2.471	941	-61,92
Total	102.078	154.218	51,08	734.391	691.890	-5,79

Sumber: BPS

Tabel III.6 Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Semester I 2021

Pelabuhan	Jumlah Penumpang			Kumulatif Jumlah Penumpang		
	Mei 2021	Jun 2021	Perubahan	Jan-Jun 2020	Jan-Jun 2021	Perubahan
	(Orang)	(Orang)	(%)	(Orang)	(Orang)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Grogot	-	-	-	-	-	-
Tanjung Santan	-	-	-	-	-	-
Kuala Samboja	-	-	-	-	-	-
Sanggata	-	-	-	-	-	-
Sangkulirang	-	-	-	-	-	-
Tanjung Redeb	-	-	-	-	-	-
Semayang	8.659	8.858	2,30	45.226	42.852	-5,25
Samarinda	8.415	11.351	34,89	25.934	51.144	97,21
Bontang (Lok Tuan dan Tanjung Laut)	3.090	4.915	59,06	12.831	11.355	-11,50
Total	20.164	25.124	24,60	83.991	105.351	25,43

Sumber: BPS

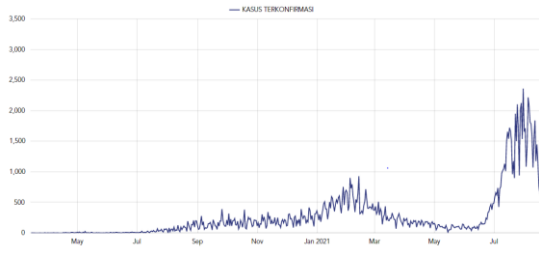
Meningkatnya Laju Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau di Kota Samarinda pada triwulan II 2021 terutama disebabkan oleh inflasi daging ayam ras, tomat, dan ikan layang. Kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan komoditas barang dengan penyumbang inflasi tertinggi pada periode ini yaitu 2,85% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 2,21% (yoy). Berdasarkan agregasinya, beberapa komoditas utama yang menyebabkan inflasi di kelompok ini adalah daging ayam ras, tomat, dan juga ikan layang atau benggol. Namun demikian, inflasi bahan makanan tersebut tertahan dengan adanya deflasi untuk kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok pendidikan. Dua kelompok tersebut secara berturut-turut dalam dua periode terakhir terus mengalami deflasi meskipun menunjukkan tren perlambatan.

3.1.3 Tracking Inflasi Triwulan III 2021

Pada triwulan III 2021, Kalimantan Timur diperkirakan akan mengalami inflasi tahunan yang meningkat secara terbatas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena rendahnya *baseline*, tingginya harga komoditas utama serta potensi hambatan distribusi atau pasokan akibat pembatasan mobilisasi masyarakat melalui PPKM Level 4 di sentra produksi

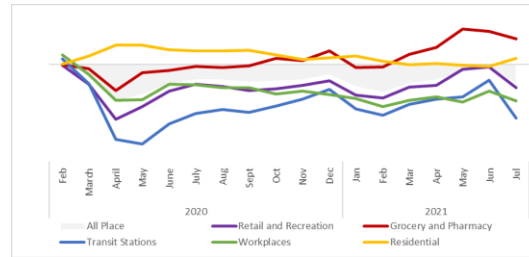
Jawa – Bali. Peningkatan laju inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari komoditas makanan, minuman dan tembakau seiring pembatasan mobilitas melalui PPKM Level 4 di Jawa – Bali. Pembatasan tersebut diperkirakan sedikit berpotensi menghambat distribusi atau pasokan komoditas pangan menuju Kalimantan Timur mengingat beberapa komoditas utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah dan sayuran yang dipasok dari daerah tersebut. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas utama Kalimantan Timur seperti batu bara dan CPO serta peningkatan permintaan global terhadap komoditas batu bara turut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan meningkatnya permintaan. Kenaikan harga global untuk komoditas CPO juga berpotensi menyebabkan tekanan harga minyak goreng. Harga jagung yang masih tinggi juga diperkirakan akan menyebabkan tekanan pada harga pakan ternak sehingga berpotensi mendorong inflasi daging ayam ras. Peningkatan inflasi di periode ini juga tidak terlepas dari rendahnya *baseline* inflasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sementara itu, perkembangan kasus COVID-19 yang terus meningkat di Kalimantan Timur pada triwulan III 2021 (dibandingkan dengan triwulan sebelumnya) diperkirakan menjadi faktor penahan eskalasi tekanan inflasi. Perkembangan kasus COVID-19 yang terus meningkat di Kalimantan Timur seperti yang terlihat pada Grafik III.6 mendorong dikeluarkannya beberapa kebijakan baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada pertengahan Juli 2021, Kalimantan Timur ditetapkan masuk kategori PPKM Level 4 sesuai yang tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021. Melalui instruksi tersebut, delapan Kota/Kabupaten di bawah Kalimantan Timur kecuali Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser, diharuskan mematuhi beberapa peraturan seperti kegiatan pembelajaran dari rumah, pemberlakuan *work from home* (WFH) pada sektor non-esensial sebesar 100%, *café* dan restoran dihimbau untuk memberlakukan *delivery* atau *take away*, pembatasan pengunjung yang hadir di pusat perbelanjaan/pasar tradisional melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Selain itu, moda transportasi udara juga diperketat dengan persyaratan sertifikat vaksinasi setidaknya dosis pertama dan diharuskan *PCR Test* maksimal 2x24 jam. Hal ini tentunya akan menurunkan permintaan masyarakat utamanya pada angkutan udara. Pembatasan ini tercermin pada mobilitas masyarakat pada *retail and recreation, grocery and pharmacy* serta *transit station* yang menunjukkan penurunan signifikan pada Juli 2021 (Grafik III.7).



Sumber: Covid19.go.id

Grafik III.6 Perkembangan Kasus Positif Covid-19 Harian Kalimantan Timur



Sumber: Google, diolah

Grafik III.7 Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Semester I 2021

Pada bulan Juli 2021, Kaltim mengalami deflasi terbatas. Kaltim mengalami deflasi pada bulan Juli 2021 sebesar 0,02% (mtm), setelah di bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm) (Grafik III.9). Deflasi ini salah satunya disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca momen HBKN dan Idul Fitri yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi Juli 2021 sebesar 1,12% (yoy) atau inflasi secara tahun kalender sebesar 1,27% (ytd) (Grafik III.9). Inflasi Kaltim ini lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,52% (yoy) (Grafik III.9). Secara spasial, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan sama-sama mengalami deflasi di bulan ini. Kota Samarinda mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi sebesar 0,28% (mtm). Sementara itu, Kota Balikpapan mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi sebesar 0,47% (mtm).

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, deflasi Juli 2021 di Kalimantan Timur utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,19% (mtm) serta kelompok pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi sebesar 0,88% (mtm). Terjadinya penurunan tersebut sejalan dengan normalisasi permintaan pasca momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Deflasi tersebut utamanya juga didorong oleh momen panen komoditas pangan yang terjadi di wilayah sentra yang secara musiman terjadi pada pertengahan hingga akhir triwulan III 2021. Selain itu, komoditas daging ayam ras juga mengalami deflasi sebesar 3,84% (mtm) dengan andil 0,08% (mtm). Lebih lanjut, deflasi juga bersumber dari penurunan permintaan pada kelompok pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi sebesar 0,88% (mtm), lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,20% (mtm). Hal ini terjadi seiring dengan pembatasan operasional pusat perbelanjaan dengan tutup lebih awal dan hanya mengutamakan toko-toko yang melayani kebutuhan esensial saja. Namun demikian, pada kelompok makanan, minuman dan tembakau terdapat beberapa komoditas yang menyebabkan peningkatan tekanan inflasi seperti komoditas cabai rawit yang mengalami inflasi sebesar 14,29% (mtm) dengan andil inflasi

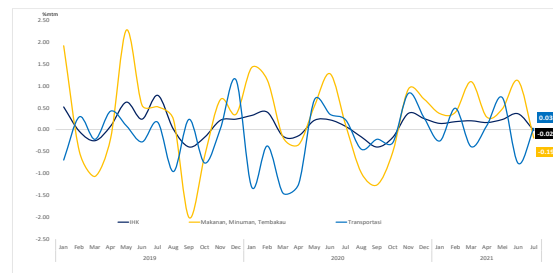
sebesar 0,06% dan juga bawang merah yang mengalami inflasi sebesar 7,16% (mtm) dengan andil sebesar 0,02%

Berbagai stimulus terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, namun tetap dapat terjaga dampak inflasinya. Pada triwulan III 2021, berbagai stimulus dilakukan pemerintah melalui realisasi bansos tunai maupun non tunai yang terus berlanjut. Subsidi tarif listrik rumah tangga untuk kapasitas 450V dan 900VA mencapai 50% juga masih berlanjut pada periode Juli-September 2021. Bantuan pemerintah dalam hal pendidikan khususnya perguruan tinggi juga cukup menahan inflasi pada kelompok pendidikan. Realisasi vaksinasi COVID-19 yang terus dilakukan turut berpotensi mendorong ekspektasi ekonomi dan permintaan masyarakat ke depan. Beberapa pelanggaran terkait vaksinasi seperti rekomendasi vaksin COVID-19 bagi ibu hamil, anak di atas usia 12 tahun, dan juga kemudahan vaksin bagi masyarakat tanpa NIK di fasilitas vertikal Kementerian Kesehatan tentunya juga menjadi berita yang memberikan optimisme bagi masyarakat. Pada bulan Agustus, pemerintah menargetkan untuk melakukan akselerasi program vaksinasi hingga dua juta dosis setiap harinya.



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.8 Inflasi Tahunan Kaltim dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.9 Inflasi Bulanan Kaltim

3.2 Program Pengendalian Inflasi Daerah

TPID Provinsi Kaltim terus berupaya melakukan penguatan dan inovasi kegiatan pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga serta komunikasi efektif). Mengingat hampir semua bahan pangan Kaltim sangat tergantung dengan daerah produsen di luar Kaltim, maka strategi pengendalian inflasi di Kaltim dengan melakukan 4 hal penting. Pertama, upaya peningkatan produksi pangan lokal untuk meningkatkan pasokan. Kedua, penguatan sinergi/koordinasi di internal TPID dan fungsi lembaga penyangga bahan pangan di Kaltim sebagai upaya peningkatan kelancaran distribusi dan pasokan. Ketiga, sinergi lintas TPID antara lain melakukan kerjasama antar daerah dengan wilayah produsen pangan, dengan terlebih dulu melakukan

pemetaan kemampuan produksi bahan pangan lokal serta memetakan kebutuhan bahan pangan di setiap Kota/Kabupaten di Kaltim. Keempat, penguatan komunikasi dengan media massa serta mengoptimalkan portal *laminetam.id* sebagai Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) milik TPID Kaltim untuk memudahkan berbagai instansi dalam melakukan pemantauan harga secara harian hingga ke tingkat pasar di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Kaltim. Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga dapat dilaksanakan dan dipantau dengan lebih efektif.

Selama triwulan II 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah Kaltim terus meningkatkan koordinasi dan kegiatan dalam upaya mengendalikan harga dan menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan barang penting (bapokting) khususnya menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Selama bulan April 2021 setidaknya diselenggarakan enam kali agenda *High Level Meeting* (HLM) yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah dalam rangka koordinasi stok persediaan bahan pangan menjelang Idul Fitri. HLM pertama dilaksanakan oleh TPID Kota Samarinda pada 6 April 2021 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda (Tabel III.7). Selain TPID Kota Samarinda, TPID Provinsi Kalimantan Timur, TPID Kabupaten Penajam Paser Utara, TPID Kabupaten Paser, TPID Kota Balikpapan dan juga TPID Kabupaten Berau telah melaksanakan HLM selama bulan April 2021 dalam rangka memastikan kecukupan stok bahan makanan dan menyusun strategi pengendalian inflasi selama bulan Ramadhan (Tabel III.7). Beberapa agenda HLM tersebut kemudian dipublikasikan melalui media *online*/ sosial dan juga media cetak maupun elektronik sebagai bentuk komunikasi publik untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat berbelanja dengan lebih bijak dan tidak berlebihan sehingga pasokan bahan pangan yang tersedia tetap dapat mengimbangi permintaan masyarakat.

Sejumlah agenda HLM tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan sidak pasar untuk memastikan mekanisme rantai distribusi berjalan secara efisien. Pada tanggal 10 Mei 2021 atau dua hari jelang Idul Fitri, TPID Kota Samarinda melakukan sidak pasar yang dipimpin langsung oleh Walikota Samarinda. Kegiatan sidak pasar dilakukan di beberapa tempat yaitu Pasar Segiri, Pasar Semi Modern (Indogrosir), SPBU Juanda, serta Pergudangan BULOG Regional Samarinda. Dari hasil sidak di pasar tradisional, terdapat kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa komoditas seperti daging ayam ras, daging sapi, dan juga cabai rawit. Kenaikan ini selain disebabkan karena peningkatan permintaan tetapi juga disebabkan

lemahnya *supply* khususnya komoditas cabai sehingga harus mendatangkan dari Provinsi Sulawesi Barat menggunakan pesawat terbang karena terbatasnya pasokan.

Dalam rangka penguatan sinergi dan fungsi lembaga penyangga bahan pangan, TPID Kota Samarinda bersama lembaga penyangga terkait kembali mengadakan kegiatan Gelar Pangan Murah dan Pasar Ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperpendek rantai distribusi sehingga selisih harga dapat dinikmati sepenuhnya oleh konsumen dan produsen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Samarinda dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait seperti Bank Indonesia, BULOG, dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diperkenalkan dengan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) sebagai alternatif cara pembayaran non tunai yang lebih aman dan nyaman di era pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kalimantan Timur terus dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga. Pada bulan Juni 2021, TPID di wilayah Kaltim melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah salah satunya melalui rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang membahas mengenai program pengendalian inflasi daerah, kendala yang dihadapi serta meminta dukungan dari pemerintah pusat. Selain itu, TPID Provinsi Kaltim juga melakukan studi banding mengenai program kartu kendali gas Elpiji kemasan 3 kg sebagaimana yang telah lebih dulu diterapkan oleh Pemkot Tanjung Pinang. Terakhir, TPID Provinsi Kaltim juga terus melaksanakan edukasi yang konsisten mengenai belanja bijak kepada masyarakat.

Tabel III.7 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan II 2021

NO	TPID	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN	PIMPINAN KEGIATAN
1	Kota Samarinda	5-Apr-21	Operasi Pasar	Kegiatan pembukaan Gelar Pangan Murah (GPM) 2021 yang dicanangkan oleh dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan	Walikota Samarinda
2	Kota Samarinda	6 April 2021	HLM	HLM dalam rangka koordinasi stok persediaan komoditas menyambut bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2021	Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3	Kota Samarinda	8-Apr-21	Rapat Koordinasi	Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, telah dilaksanakan rapat pemantapan persiapan pasar Ramadhan 1442H yang akan diadakan di komplek GOR Segiri Samarinda	Asisten I kota Samarinda
4	Provinsi Kalimantan Timur	12 April 2021	HLM	HLM TPID yang membahas mengenai ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442H	Wakil Gubernur Kalimantan Timur
5	Kabupaten Penajam Paser Uta	14 April 2021	HLM	HLM TPID untuk membahas evaluasi harga pangan triwulan I 2021 dan strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadhan	Bupati PPU
6	Kabupaten Paser	15-Apr-21	HLM	HLM dalam rangka evaluasi harga pangan triwulan I 2021 dan monitoring kecukupan stok bahan makanan dan strategi pengendalian inflasi selama bulan ramadhan	Wakil Bupati Paser
7	Kota Samarinda	15 April 2021 - 11 Mei 2021	Pasar Ramadhan	Gelar Pasar Ramadhan yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan dan memperkenalkan transaksi non tunai di lingkungan Samarinda	Walikota Samarinda
8	Kota Balikpapan	26-Apr-21	HLM	HLM TPID yang dipimpin oleh Walikota Balikpapan untuk membahas pemantauan harga dan stok pangan menjelang Idul Fitri 1441 H	Walikota Balikpapan
9	Kabupaten Berau	28 April 2021	HLM dan Sidak Pasar	HLM dalam rangka koordinasi stok persediaan komoditas menyambut bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2021	Bupati Berau
10	Kota Samarinda	10 Mei 2021	Sidak Pasar	Monitoring harga Bapokting di Wilayah Kota Samarinda Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1442 H	Walikota Samarinda
11	Kabupaten Kutai Barat	2 Juni 2021	Monev	Undangan Pokja TPIP kepada Ketua Harian TPID Kab, Kutai Barat untuk monev program pengendalian inflasi	TPIP
12	Provinsi Kalimantan Timur	20 Juni 2021	Studi Banding	Studi Banding mengenai program pemberlakuan kartu kendali gas elpiji 3kg	Pemkot Tanjung Pinang

Sumber: TPID Wilayah Kalimantan Timur



Foto: Kerajinan Tas Ulap Doyo, Kab Kutai Kartanegara

BAB. IV

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

RINGKASAN EKSEKUTIF

- *Stabilitas sistem keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2021 secara umum menunjukkan perbaikan yang bersumber dari membaiknya stabilitas sistem keuangan korporasi, rumah tangga, intermediasi perbankan, termasuk syariah dan pembiayaan UMKM. Kinerja korporasi yang ditopang oleh komoditas utama menunjukkan perbaikan, bergitu pula kinerja sektor rumah tangga yang diikuti dengan optimisme masyarakat ke depan. Selain itu, kinerja perbankan secara umum turut membaik, baik penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran pembiayaan. Dari sisi perbankan syariah, penyaluran pembiayaan syariah Kaltim triwulan II 2021 juga tumbuh positif melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya meskipun DPK syariah pada triwulan yang sama terpantau tumbuh melambat.*
- *Meskipun risiko pembiayaan secara total meningkat, namun masih berada di bawah ambang batas 5%. Di sisi lain, risiko pembiayaan syariah menurun atau relatif membaik.*

IV. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1 Gambaran Umum

Stabilitas sistem keuangan daerah Kaltim triwulan II 2021 menunjukkan perbaikan, seiring dengan membaiknya kinerja korporasi, rumah tangga, intermediasi perbankan dan pembiayaan UMKM. Membaiknya stabilitas sistem keuangan Kaltim tercermin dari perbaikan kinerja korporasi yang bergerak pada komoditas utama, dibarengi dengan membaiknya kinerja rumah tangga baik dari sisi DPK maupun penyaluran pembiayaannya. Begitu pula intermediasi perbankan Kaltim yang turut menunjukkan perbaikan dari sisi DPK dan penyaluran pembiayaan baik berdasarkan jenis penggunaannya maupun secara spasial. Penghimpunan DPK Kaltim triwulan II 2021 tumbuh 9,17% (yoy) dari 7,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, perbaikan kinerja intermediasi perbankan triwulan laporan ditandai dengan mengecilnya kontraksi sebesar 1,94% (yoy) dari kontraksi sebesar 4,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, risiko pembiayaan meningkat, tercermin dari rasio NPL yang berada pada level 4,09% atau lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL pada triwulan sebelumnya sebesar 3,95% namun masih berada di bawah *threshold* 5%. Lebih lanjut dari sisi perbankan syariah, penyaluran pembiayaan syariah Kaltim triwulan II 2021 tumbuh positif 5,33% (yoy). Pencapaian tersebut membaik dibandingkan dengan pertumbuhan 3,85% (yoy) pada triwulan sebelumnya, meskipun DPK syariah pada triwulan yang sama terpantau tumbuh melambat menjadi 17,35% (yoy) dari 22,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan UMKM, perbaikan turut tercermin dari membaiknya pembiayaan UMKM yang tumbuh 5,58% (yoy) setelah kontraksi sebesar 1,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

4.2 Stabilitas Keuangan Daerah

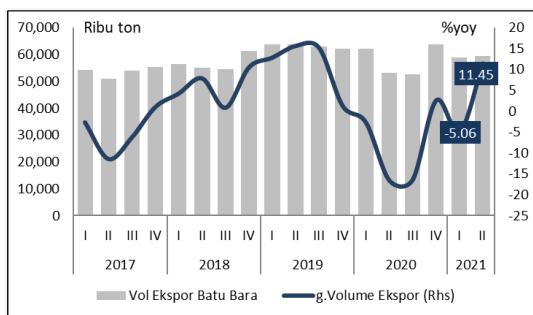
4.2.1 Asesmen Sektor Korporasi

Kinerja korporasi Kaltim mengindikasikan perbaikan, tercermin dari membaiknya kinerja korporasi yang berbasis komoditas utama. Sebagian besar korporasi di Kaltim bergerak di komoditas yang rentan terhadap gejolak eksternal, utamanya sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki pangsa sebesar 41,4% pada PDRB Kaltim tahun 2020, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 18,9%. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi perekonomian internasional dan harga komoditas sangat berpengaruh terhadap kinerja korporasi di Kaltim,

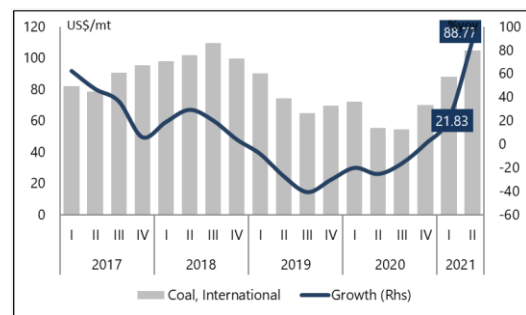
mengingat pangsa ekspor luar negeri terhadap perekonomian Kaltim masih cukup signifikan, terutama pada komoditas batu bara.

Perkembangan kinerja korporasi komoditas utama Kaltim

Terjadi perbaikan kinerja korporasi berbasis komoditas utama, salah satunya tercermin dari meningkatnya ekspor batu bara seiring membaiknya harga dan ekonomi global. Volume ekspor batu bara Kaltim triwulan II 2021 meningkat sebesar 11,45% (yoy) setelah mengalami kontraksi sebesar 5,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.1). Meningkatnya penjualan ekspor batu bara Kaltim disebabkan oleh peningkatan permintaan seiring dengan membaiknya perekonomian global. Lebih lanjut, meningkatnya permintaan ekspor tersebut berdampak pada berlanjutnya tren peningkatan harga internasional batu bara yang signifikan pada triwulan laporan. Harga batu bara internasional triwulan II 2021 terpantau tumbuh signifikan sebesar 88,77% (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan harga pada triwulan sebelumnya sebesar 21,83% (yoy) (Grafik IV.2).

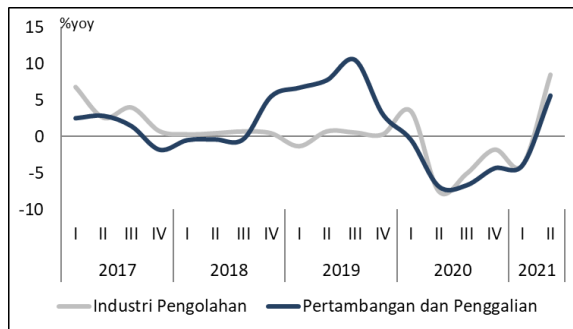


Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik IV.1 Volume Ekspor Batu Bara Kaltim



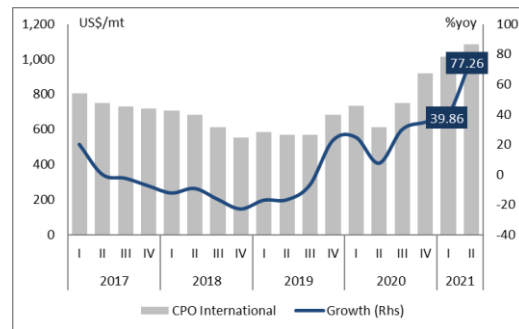
Sumber: Worldbank, diolah
Grafik IV.2 Harga Internasional Batu Bara

Selain komoditas batu bara, kinerja korporasi di sektor industri pengolahan turut mengalami perbaikan terutama didorong industri pengolahan berbasis kelapa sawit. Berdasarkan PDRB triwulan II 2021, lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 8,48% (yoy) setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,98% (yoy) (Grafik IV.3). Perbaikan ini terutama didorong oleh perbaikan di industri pengolahan CPO yang menyumbang 15,12% dari total industri pengolahan. Membaiknya kinerja industri pengolahan turut tercermin dari harga internasional CPO yang masih melanjutkan tren peningkatan. Pada triwulan laporan ditulis, harga internasional CPO tumbuh 77,26% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan harga sebesar 39,86% (yoy) (Grafik IV.4).



Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.3 Pertumbuhan PDRB Kaltim Berdasarkan Pengeluaran Sektor Industri Pengolahan

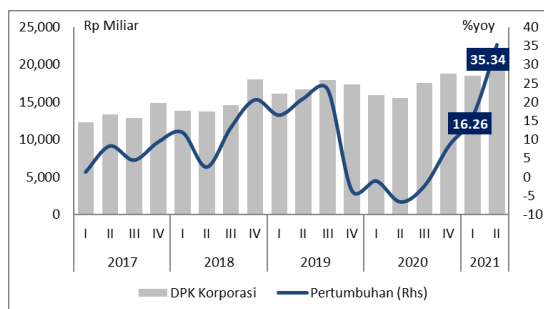


Sumber: Worldbank, diolah

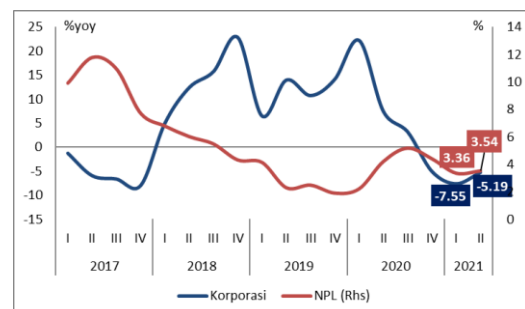
Grafik IV.4 Harga Internasional CPO

Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

Membaiknya kinerja korporasi pada komoditas utama sejalan dengan meningkatnya stabilitas sistem keuangan korporasi baik dari sisi DPK maupun pembiayaan. DPK korporasi masih melanjutkan tren pertumbuhan yang meningkat sebesar 35,34% (yoy) setelah tumbuh 16,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.5). Perbaikan kinerja korporasi turut tercermin dari membaiknya kinerja kredit atau pembiayaan dengan kontraksi yang mengecil dari 7,55% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,19% (yoy). Namun demikian, risiko kredit sedikit meningkat dari 3,36% menjadi 3,54% namun masih berada di bawah *threshold* risiko NPL kredit perbankan sebesar 5% (Grafik IV.6).

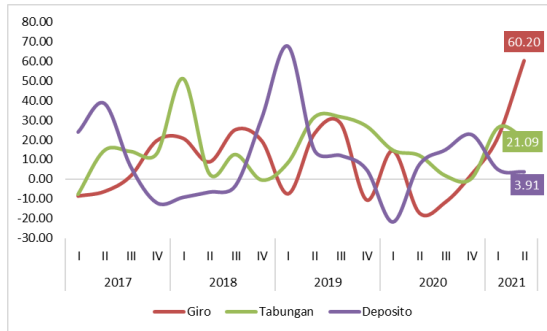


Grafik IV.5 DPK Korporasi Kaltim

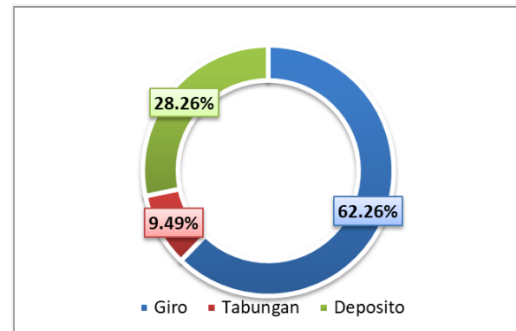


Grafik IV.6 Kredit dan NPL Korporasi Kaltim

Peningkatan kinerja DPK korporasi Kaltim bersumber dari meningkatnya pertumbuhan giro. Pada triwulan II 2021, giro korporasi Kaltim tumbuh sebesar 60,20% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 21,22% (yoy). Sementara DPK tabungan dan deposito tumbuh melambat masing-masing sebesar 21,09% (yoy) dan 3,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 26,31% (yoy) dan 5,13% (yoy) (Grafik IV.7). Menurut pangasanya, giro memiliki porsi paling besar dalam DPK korporasi Kaltim, yakni sebesar 62,26%, diikuti deposito sebesar 28,26% dan tabungan sebesar 9,49% (Grafik IV.8).



Grafik IV.7 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim



Grafik IV.8 Komposisi DPK Korporasi Kaltim

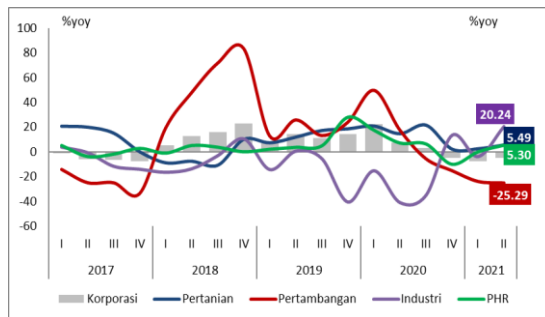
Selain DPK, kinerja kredit atau pembiayaan korporasi turut mengalami perbaikan yang utamanya bersumber dari meningkatnya kredit sektor industri. Pembiayaan korporasi Kaltim periode triwulan II 2021 terpantau membaik dari mengecilnya kontraksi sebesar 7,55% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 5,19% (yoy). Sebagai sumber utama dari membaiknya kinerja pembiayaan korporasi, pembiayaan pada sektor industri tumbuh signifikan sebesar 20,24% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mencatat kontraksi 4,00% (yoy) (Grafik IV.9). Meningkatnya penyaluran pembiayaan di sektor industri triwulan II 2021 menjadi salah satu faktor yang mengindikasikan bahwa kinerja sektor industri terpantau membaik. Perbaikan ini turut terkonfirmasi dari hasil Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU)³ yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur periode triwulan II 2021 yang menunjukkan hadil Saldo Bersih Tertimbang (SBT)⁴ kondisi usaha sektor industri pengolahan tumbuh positif sebesar 1,42% atau membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan nilai negatif (Grafik IV.10).

Selain sektor industri, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) turut membaik sementara kinerja pembiayaan di sektor pertambangan melanjutkan kontraksi. Penyaluran pembiayaan di sektor pertanian mengalami perbaikan dengan pertumbuhan kredit sebesar 5,49% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,39% (yoy). Sektor lain, yakni PHR turut mengalami perbaikan yang tercermin dari penyaluran kredit yang tumbuh positif sebesar 5,30% (yoy) atau membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,08% (yoy). Perbaikan ini turut terkonfirmasi dari hasil SKDU dengan SBT yang positif sebesar 0,47% pada kondisi usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan

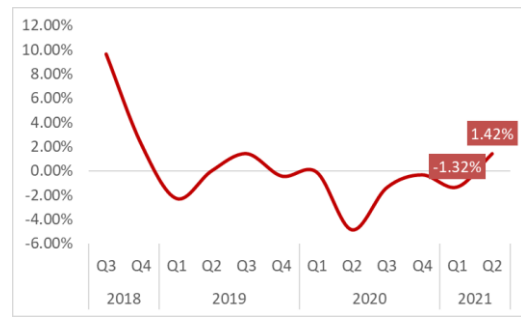
³ Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei rutin setiap triwulan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk *tracking* pertumbuhan korporasi pada berbagai sektor penggerak perekonomian.

⁴ Saldo Bersih Tertimbang (SBT) merupakan salah satu *tools* yang digunakan Bank Indonesia untuk melihat kinerja kondisi dunia usaha, di mana nilai positif atau di atas 0 dapat diartikan dengan lebih banyaknya responden SKDU yang menjawab "kondisi meningkat" daripada "kondisi menurun". SBT positif mengindikasikan kondisi yang membaik, negatif mengindikasikan kondisi yang melemah, dan SBT bernilai 0 mengindikasikan kondisi stabil.

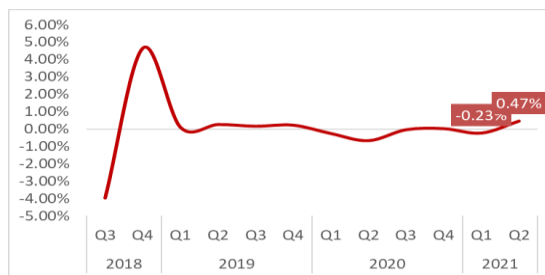
minum. Namun demikian, pertumbuhan kredit korporasi yang lebih tinggi tertahan oleh berlanjutnya tren kontraksi kredit sektor pertambangan dari 24,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 25,29% (yoy) (Grafik IV.11). Berdasarkan kualitas pembiayaannya yang tercermin dari NPL, risiko kredit sektor industri dan sektor pertanian terpantau baik pada level risiko yang relatif rendah masing-masing sebesar 0,39% dan 1,81%. Sementara risiko kredit pada sektor pertambangan dan PHR masih relatif tinggi sebesar 6,19% dan 6,97% (Grafik IV.12).



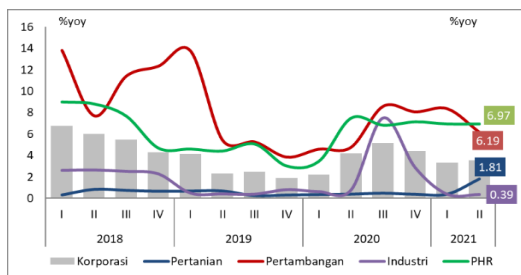
Grafik IV.9 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim Berdasarkan Sektor



Grafik IV.10 Saldo Bersih Tertimbang Kondisi Dunia Usaha Sektor Industri Pengolahan



Grafik IV.11 Saldo Bersih Tertimbang Kondisi Dunia Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi dan Mamin



Grafik IV.12 Perkembangan NPL Korporasi Kaltim

Asesmen Sektor Rumah Tangga

Sebagaimana terjadinya perbaikan kinerja di sektor korporasi, ketahanan sektor rumah tangga (RT) pada triwulan II 2021 juga mengindikasikan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan PDRB sisi penggunaan, kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh positif sebesar 4,49% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,49% (yoy) (Tabel IV.1). Membaiknya konsumsi rumah tangga secara berangsur-angsur mendorong perbaikan keyakinan masyarakat yang tercermin dari Survei Konsumen (SK)⁵ yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Hasil SK triwulan II 2021 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan peningkatan dari 104,33 pada

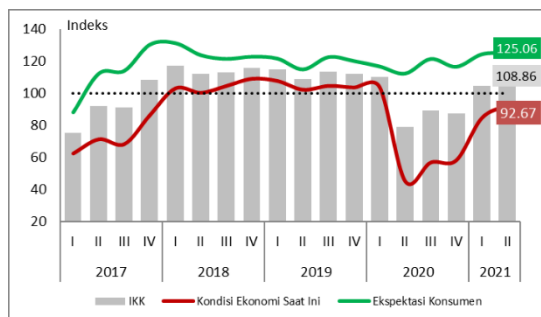
⁵ Survei Konsumen (SK) merupakan survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keyakinan konsumen (IKK) yang tercermin dari indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan ekspektasi terhadap perekonomian pada 6 (enam) bulan mendatang (IEK). Threshold kondisi normal yang tercermin dari indeks tersebut berada pada nilai indeks sebesar 100.

triwulan lalu menjadi 108,86. Peningkatan IKK ini bersumber dari meningkatnya komponen pembentuk utamanya, yakni Indeks Kondisi Ekonomi saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masing-masing sebesar 92,67 dan 125,06, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan IKE sebesar 84,61 dan IEK sebesar 124,06 (Grafik IV.13). Lebih lanjut, Indeks Ekspektasi Konsumen ke depan yang terbentuk dari ekspektasi penghasilan dan ekspektasi kondisi ekonomi ke depan mengindikasikan optimisme yang meningkat. Indeks ekspektasi penghasilan triwulan laporan sebesar 132,50 atau lebih tinggi dari triwulan lalu sebesar 132,33. Begitupula indeks ekspektasi kondisi ekonomi ke depan yang menunjukkan kenaikan dari 113,83 menjadi 120,83 (Grafik IV.14).

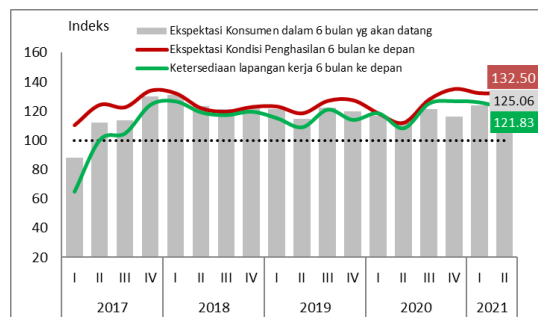
Tabel IV.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Komponen PDRB	2018				2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
PDRB TOTAL	1.79	1.95	2.05	4.74	5.02	4.95	6.23	2.82	1.38	-5.35	-4.54	-2.83	-2.96	5.76
Berdasarkan Pengeluaran														
Konsumsi Rumah Tangga	2.63	3.13	3.05	3.71	4.03	3.37	3.13	2.09	1.65	-2.34	-0.58	-0.46	-0.49	4.49
Konsumsi LNPR	9.51	7.23	12.47	8.56	8.53	7.51	7.77	3.33	-4.88	-3.12	-0.19	3.18	-0.02	0.12
Konsumsi Pemerintah	2.99	-0.34	21.11	8.04	5.15	-3.16	10.89	13.60	8.53	-0.85	1.77	-9.10	-0.33	12.39
PMTB	5.07	16.64	2.19	6.83	9.87	-1.29	5.89	5.22	0.62	0.84	0.32	-7.28	11.19	12.41
Ekspor*)					4.99	7.06	6.25	2.66	2.26	-6.30	-5.87	1.13	-8.19	8.91
Impor*)					6.97	4.96	5.26	3.99	3.12	-2.78	-2.94	3.42	-6.48	15.12

Sumber: BPS, diolah



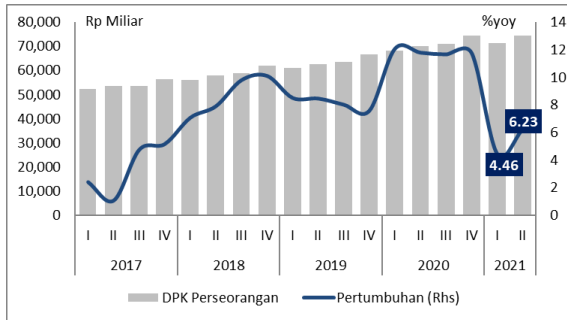
Grafik IV.13 Indeks Keyakinan Konsumen Kaltim



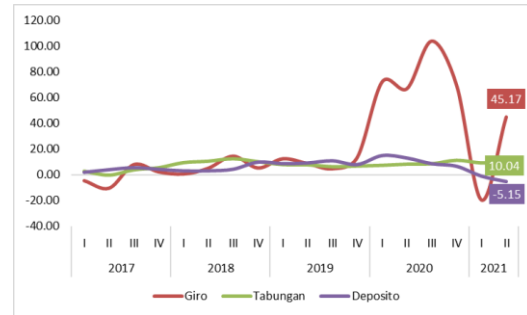
Grafik IV.14 Indeks Kondisi Ekonomi Kaltim

Meningkatnya ketahanan sektor RT triwulan II 2021 turut tercermin dari membaiknya DPK rumah tangga dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang bersumber dari membaiknya giro dan tabungan. DPK perbankan yang bersumber dari perseorangan (rumah tangga) pada triwulan II 2021 tumbuh sebesar 6,23% (yoy) atau melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,46% (yoy) (Grafik IV.15). Pertumbuhan DPK tersebut utamanya bersumber dari DPK giro yang tumbuh signifikan sebesar 45,17% (yoy) setelah triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 19,32% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan disusul oleh DPK tabungan sebesar 10,04% (yoy) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 9,44% (yoy). Peningkatan DPK yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi DPK deposito sebesar 5,15% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,91% (yoy)

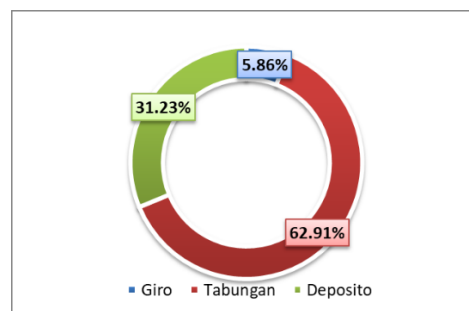
(Grafik IV.16). Dilihat dari *share* DPK perseorangan, DPK tabungan memiliki porsi paling besar yakni 62,91% disusul deposito dan giro masing-masing sebesar 31,32% dan 5,86% (Grafik IV.17).



Grafik IV.15 Perkembangan DPK RT Kaltim



Grafik IV.16 Perkembangan Komponen DPK RT Kaltim

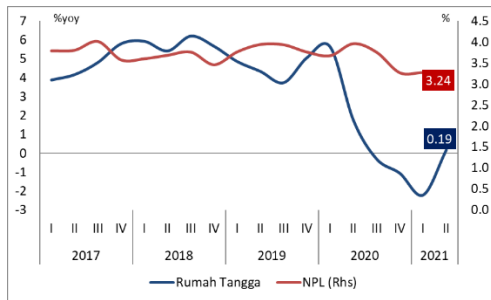


Grafik IV.17 Pangsa DPK RT Kaltim

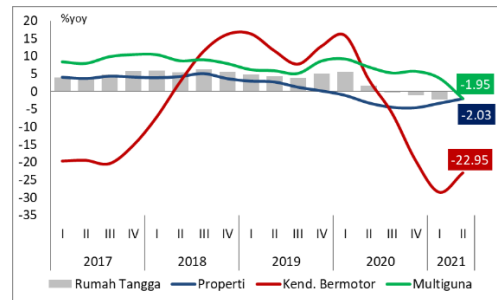
Sejalan dengan membaiknya DPK rumah tangga atau perseorangan dan dikeluarkannya sejumlah pelonggaran kebijakan BI dan pemerintah terkait kendaraan bermotor dan properti, kinerja pembiayaan perseorangan (rumah tangga) turut membaik yang utamanya bersumber dari membaiknya kinerja kredit kendaraan bermotor dan properti. Kredit perseorangan Kaltim pada triwulan laporan terpantau meningkat 0,19% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,20% (yoy) (Grafik IV.18). Adapun risiko kredit perseorangan triwulan II 2021 terpantau stabil. Berdasarkan jenis kreditnya, perbaikan kinerja kredit perseorangan Kaltim bersumber dari kredit kendaraan bermotor, ditandai oleh mengecilnya kontraksi dari 28,24% (yoy) menjadi 22,95% (yoy) (Grafik IV.19). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja otomotif pada kendaraan bermotor mengindikasikan perbaikan, terkonfirmasi pula dalam hasil Survei Penjualan Eceran (SPE)⁶ kategori kendaraan dengan pertumbuhan omset yang signifikan sebesar 102,79% (yoy) (Grafik IV.20). Selanjutnya, membaiknya kinerja kredit perseorangan turut disebabkan oleh membaiknya kredit properti, dengan kontraksi yang mengecil dari 3,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,03% (yoy). Sementara, kinerja kredit multiguna menurun yang terlihat dari kontraksi pada triwulan

⁶ Survei Penjualan Eceran (SPE) merupakan survei yang dilakukan setiap bulan oleh Bank Indonesia guna memperoleh indikator dini untuk *tracking* pertumbuhan ekonomi dari sisi penjualan eceran atau retail.

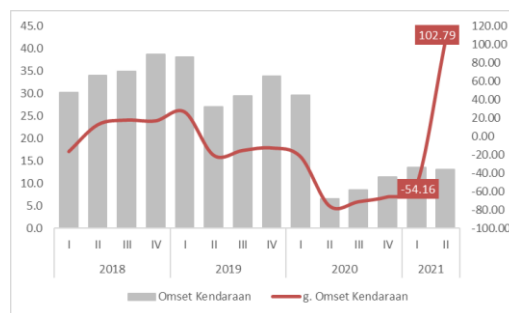
laporan sebesar 1,95% (yoy) setelah triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,84% (yoy).



Grafik IV.18 Perkembangan Pembiayaan Rumah Tangga Kaltim



Grafik IV.19 Perkembangan Pembiayaan Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenisnya



Grafik IV.20 Perkembangan Omset Kendaraan Kaltim

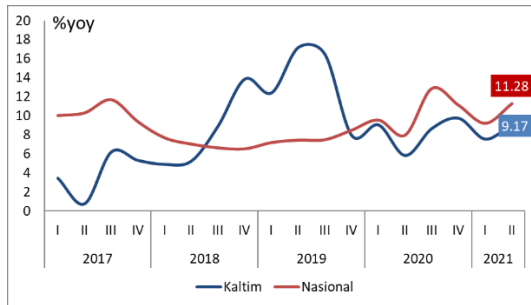
4.2.2 Asesmen Sektor Perbankan

Pada triwulan II 2021, kinerja intermediasi perbankan di wilayah Kaltim menunjukkan perbaikan yang bersumber dari membaiknya DPK dan penyaluran pembiayaan. Membaiknya DPK terutama bersumber dari giro dan tabungan, sementara membaiknya penyaluran pembiayaan bersumber dari semua jenis kredit (konsumsi, modal kerja, dan investasi). Secara spasial, membaiknya kinerja pembiayaan Kaltim disebabkan oleh membaiknya pembiayaan pada beberapa wilayah kabupaten/kota yang tercermin baik dari tren pertumbuhan yang berlanjut maupun mengecilnya kontraksi. Di sisi lain, risiko pembiayaan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya namun berada di bawah *threshold* 5%.

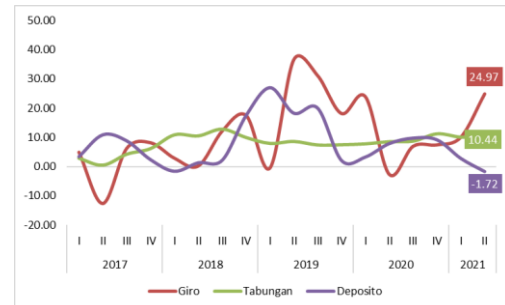
Asesmen Intermediasi Perbankan

Perkembangan penghimpunan DPK Kaltim membaik, bersumber dari membaiknya DPK giro dan tabungan. Sejalan dengan meningkatnya DPK Nasional, penghimpunan DPK Kaltim triwulan II 2021 tumbuh sebesar 9,17% (yoy) dari 7,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.21). Adapun DPK giro menjadi sumber utama membaiknya kinerja DPK triwulan II 2021 yakni sebesar 24,97% (yoy) atau melanjutkan tren pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,13% (yoy). Selanjutnya, perbaikan yang sama terlihat dari DPK

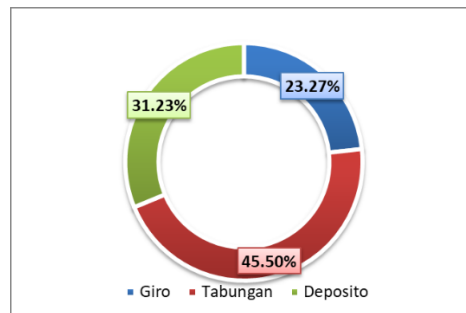
tabungan yang juga melanjutkan tren perbaikan dari 10,11% (yoy) menjadi 10,44% (yoy). Sementara deposito berkontraksi sebesar 1,72% (yoy) setelah tumbuh positif 2,77% (yoy) pada triwulan lalu (Grafik IV.22). Berdasarkan jenisnya, DPK Kaltim triwulan laporan masih didominasi oleh tabungan dengan *share* sebesar 45,50% disusul deposito dan giro masing-masing sebesar 31,23% dan 23,27% (Grafik IV.23).



Grafik IV.21 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional

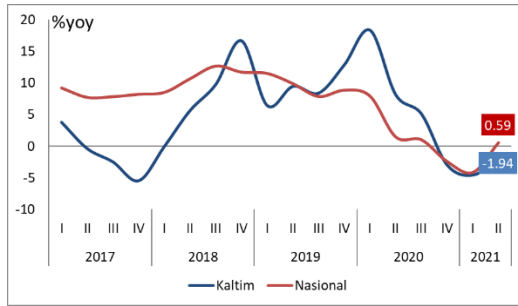


Grafik IV.22 Perkembangan DPK Kaltim Berdasarkan Jenisnya

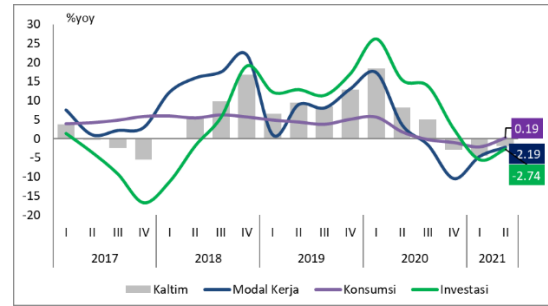


Grafik IV.23 Pangsa DPK Kaltim

Membaiknya kinerja DPK Kaltim dibarengi dengan membaiknya kinerja dari semua jenis pembiayaan di Kaltim. Perbaikan kinerja pembiayaan ditandai dengan mengecilnya kontraksi pada triwulan II 2021 sebesar 1,94% (yoy) dari kontraksi sebesar 4,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.24). Dari jenis pembiayaannya, perbaikan kinerja utamanya bersumber dari seluruh jenis pembiayaan mulai dari kredit konsumsi, modal kerja, dan investasi. Kredit konsumsi triwulan II 2021 tumbuh positif 0,19% (yoy) setelah kontraksi pada triwulan lalu sebesar 2,20% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja dan investasi, keduanya membaik, sebagaimana tercermin dari mengecilnya kontraksi pada triwulan II 2021 sebesar 2,19% (yoy) dan 2,74 (yoy) dari triwulan sebelumnya kontraksi sebesar 4,65% (yoy) dan 5,54% (yoy) (Grafik IV.25).

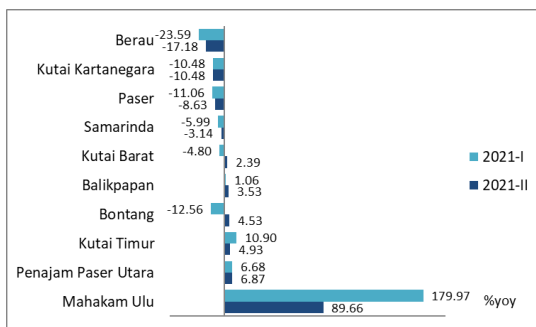


Grafik IV.24 Perkembangan Pembiayaan Kaltim dan Nasional

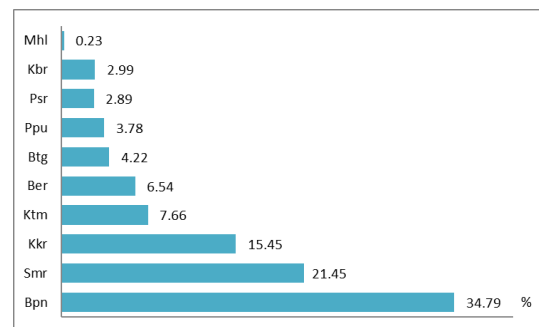


Grafik IV.25 Perkembangan Pembiayaan Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan

Secara spasial, membaiknya kinerja pembiayaan Kaltim bersumber dari membaiknya pembiayaan pada sebagian besar wilayah kabupaten/kota. Membaiknya kinerja pembiayaan secara spasial, utamanya bersumber dari penyaluran pembiayaan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang melanjutkan tren perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,06% (yoy) dan 6,68% (yoy), menjadi 3,53% (yoy) dan 6,87% (yoy). Selanjutnya, penyaluran pembiayaan di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat triwulan II 2021 tumbuh positif masing-masing sebesar 4,53% (yoy) dan 2,39% (yoy) setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.26). Selain itu, membaiknya pembiayaan juga bersumber dari penyaluran pembiayaan di Kabupaten Berau, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau sebagaimana tercermin dari mengecilnya kontraksi. Pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi tertahan oleh penyaluran pembiayaan di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu yang terpantau tumbuh melambat. Berdasarkan porsinya, penyaluran pembiayaan masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai pusat kegiatan ekonomi daerah dengan porsi sebesar 56,24%. Porsi pembiayaan Kota Balikpapan sebesar 34,79% dan Kota Samarinda sebesar 21,45% terhadap total penyaluran pembiayaan di Kaltim (Grafik IV.27).



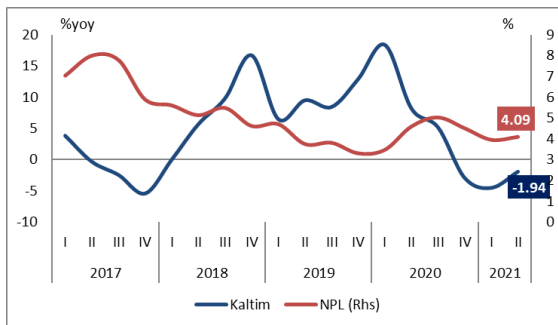
Grafik IV.26 Pertumbuhan Pembiayaan Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim



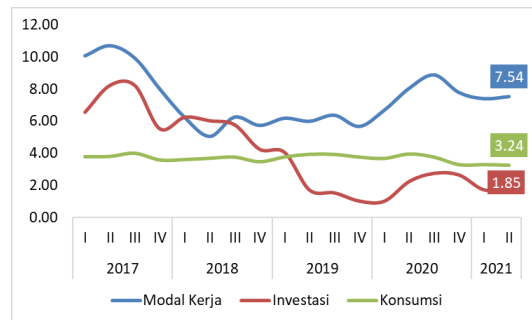
Grafik IV.27 Pangsa Pembiayaan Spasial Kabupaten/Kota di Kaltim

Membaiknya kinerja pembiayaan Kaltim triwulan II 2021 dibarengi dengan meningkatnya risiko pembiayaan, namun secara umum masih di bawah *threshold* 5%. NPL Kaltim triwulan laporan berada pada level 4,09%, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL pada triwulan sebelumnya sebesar 3,95% (Grafik IV.28). Berdasarkan penggunaannya, naiknya risiko pembiayaan disebabkan oleh naiknya NPL pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 7,45% dan 1,85%, lebih tinggi dari triwulan lalu sebesar 7,41% dan 1,72%. Sementara rasio NPL kredit konsumsi terpantau menurun dari 3,28% menjadi 3,24% (Grafik IV.29).

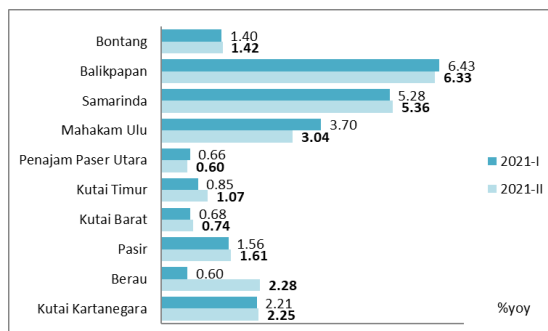
Secara spasial, peningkatan NPL terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim dengan risiko pembiayaan tertinggi tercatat di kota Balikpapan dan Samarinda. Naiknya risiko pembiayaan yang tercermin dari NPL triwulan II 2021 antara lain tercatat di Kabupaten Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang. Sementara itu, tiga kabupaten/kota lainnya mencatatkan penurunan NPL. Lebih lanjut, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda memiliki risiko pembiayaan tertinggi pada triwulan II 2021 dengan NPL masing-masing sebesar 6,43% dan 5,36% (Grafik IV.30).



Grafik IV.28 Perkembangan Pembiayaan dan NPL Kaltim



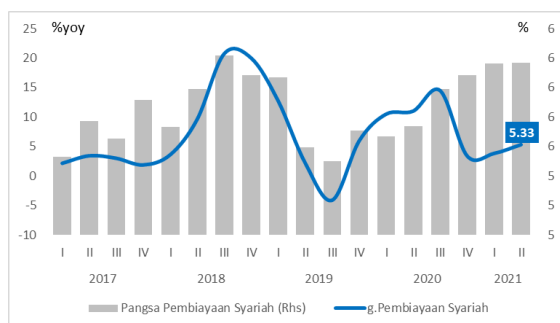
Grafik IV.29 Risiko Pembiayaan Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan



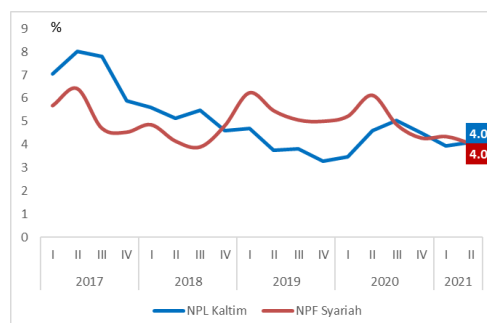
Grafik IV.30 Risiko Pembiayaan Spasial Kabupaten/Kota

Asesmen Intermediasi Perbankan Syariah

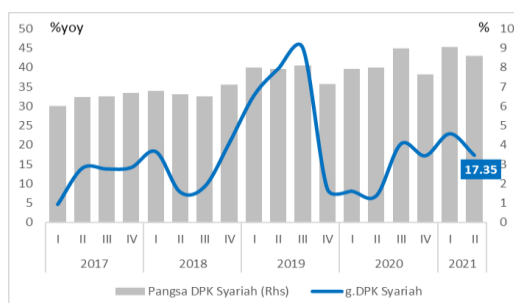
Kinerja pembiayaan dan risiko pembiayaan syariah wilayah Kaltim triwulan II 2021 membaik di tengah DPK yang masih tumbuh relatif tinggi meski melambat. Penyaluran pembiayaan syariah Kaltim tumbuh positif 5,33% (yoy), melanjutkan pertumbuhan sebesar 3,85% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.31). Di samping itu, risiko pembiayaan syariah juga membaik yang tercermin dari menurunnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dari 4,36% pada triwulan lalu, menjadi 4,06%. NPF ini berada di bawah NPL perbankan Kaltim pada triwulan II 2021 yakni sebesar 4,09% (Grafik IV.32). Di sisi lain, pertumbuhan DPK syariah Kaltim triwulan II 2021 masih mampu tumbuh relatif tinggi yakni sebesar 17,35% (yoy) meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 22,93% (yoy) (Grafik IV.33).



Grafik IV.31 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim



Grafik IV.32 Perkembangan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim

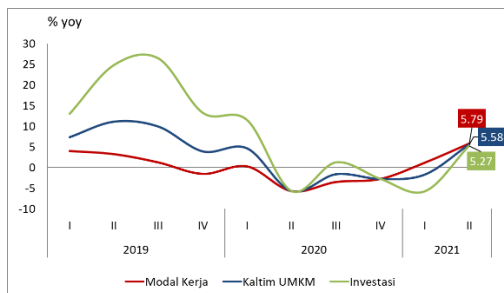


Grafik IV.33 Perkembangan DPK Perbankan Syariah Kaltim

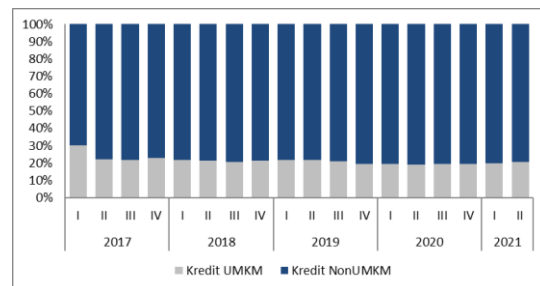
4.3 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pembiayaan UMKM Kaltim melanjutkan perbaikan yang bersumber baik dari kredit modal kerja maupun kredit investasi, sekaligus meningkatkan pangsa terhadap total pembiayaan. Kinerja pembiayaan UMKM Kaltim triwulan II 2021 kembali menunjukkan perbaikan, tumbuh sebesar 5,58% (yoy) setelah kontraksi sebesar 1,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Membaiknya kredit UMKM Kaltim bersumber dari kredit modal kerja sebesar 5,79% (yoy) atau melanjutkan perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,18% (yoy). Selain

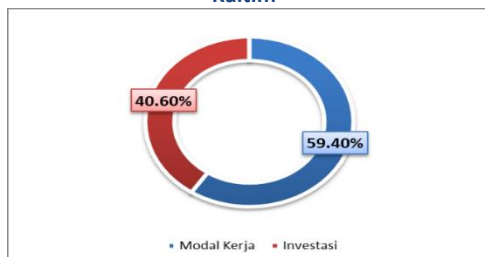
itu, perbaikan pembiayaan UMKM bersumber dari kredit investasi yang tumbuh 5,27% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar 5.77% (yoy) (Grafik IV.34). Perbaikan tersebut turut tercermin dari meningkatnya pangsa pembiayaan UMKM menjadi 20,45% dari total pembiayaan Kaltim, lebih tinggi dari pangsa triwulan sebelumnya sebesar 19,79% (Grafik IV.35). Berdasarkan pangasanya, pembiayaan modal kerja menjadi penyumbang utama pembiayaan UMKM di Kaltim dengan pangsa sebesar 59,40% sementara pembiayaan investasi UMKM memiliki pangsa sebesar 40,60% (Grafik IV.36). Dari kualitas pembiayaannya, risiko pembiayaan UMKM Kaltim yang tercermin dari nilai NPL terpantau meningkat dari 5,83% dari triwulan I 2021 menjadi 6,20% pada triwulan laporan. Peningkatan NPL tersebut bersumber dari meningkatnya NPL kredit modal kerja dan investasi pada triwulan II 2021 sebesar 7,99% dan 2,94%, lebih tinggi dibandingkan dengan NPL pada triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 7,87% dan 2,81% (Grafik IV.37).



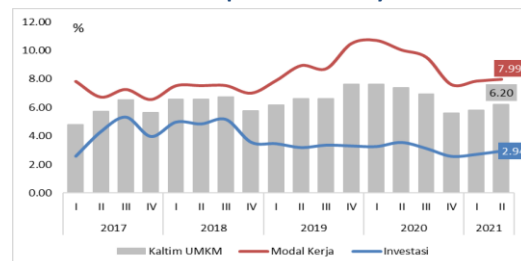
Grafik IV.34 Perkembangan Pembiayaan UMKM Kaltim



Grafik IV.35 Perkembangan Rasio NPL Pembiayaan UMKM Terhadap Total Pembiayaan Kaltim



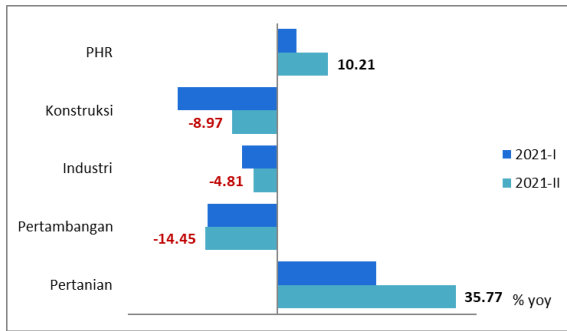
Grafik IV.36 Komposisi Pembiayaan UMKM Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan



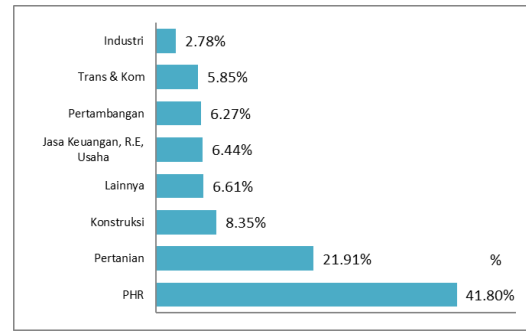
Grafik IV.37 NPL Kredit UMKM Kaltim

Berdasarkan lapangan usahanya, membaiknya pembiayaan UMKM bersumber dari membaiknya penyaluran pembiayaan UMKM ke sebagian besar lapangan usaha utama. Perbaikan pembiayaan UMKM Kaltim triwulan II 2021 utamanya bersumber dari sektor pertanian yang terpantau tumbuh 35,77% (yoy), melanjutkan tumbuhnya pembiayaan pada triwulan sebelumnya sebesar 19,8% (yoy). Sektor lain yang turut mengalami perbaikan yakni PHR yang tumbuh sebesar 10,21% (yoy), lebih tinggi dari triwulan lalu yang tumbuh 3,80% (yoy). Selain itu, penyaluran pembiayaan UMKM di sektor konstruksi dan industri turut membaik,

tercermin dari mengecilnya kontraksi pada triwulan II 2021, masing masing menjadi 8,97% (yoy) dan 4,81% (yoy) atau lebih baik dari triwulan sebelumnya dengan kontraksi sebesar 19,9% (yoy) dan 7,0% (yoy) (Grafik IV.38).). Berdasarkan pangasanya, pembiayaan UMKM Kaltim pada sektor PHR mendominasi penyaluran pembiayaan UMKM di Kaltim dengan pangsa 41,80%, diikuti oleh sektor pertanian dan konstruksi dengan pangsa masing-masing sebesar 21,91% dan 8,35% (Grafik IV.39).



Grafik IV.38 Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha



Grafik IV.39 Pangsa Pembiayaan UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha



Foto: QRIS di Tempat Wisata, Kota Samarinda

BAB. V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

- *Perbaikan kinerja transaksi nontunai melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan II 2021 masih tertahan, seiring dengan perilaku korporasi yang cenderung wait and see dalam melakukan transaksi jumlah besar. Namun demikian, pertumbuhan tahunan volume transaksi non tunai mengalami perbaikan.*
- *Di sisi lain, transaksi sistem pembayaran nontunai ritel mengalami perbaikan yang tercermin dari peningkatan transaksi kartu kredit dan kartu ATM/Debit, peningkatan transaksi dan jumlah akun Uang Elektronik, serta peningkatan transaksi e-commerce.*
- *Edukasi/sosialisasi/kampanye elektronifikasi dan digitalisasi transaksi nontunai yang aman dan nyaman di era COVID-19, terutama dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), terus digencarkan di berbagai sasaran komunitas merchant dan masyarakat luas pengguna QRIS. Hal ini mendorong jumlah merchant pengguna QRIS meningkat secara signifikan hingga mencapai jumlah merchant tertinggi se-Kalimantan. Aliran uang kartal di Provinsi Kaltim pada triwulan II 2021 menunjukkan posisi net outflow, sejalan dengan membaiknya perekonomian Kaltim serta pola musiman yaitu masuknya momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara itu, kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) Bank Indonesia juga mengalami peningkatan dan terpenuhi dengan baik di seluruh wilayah Kaltim.*

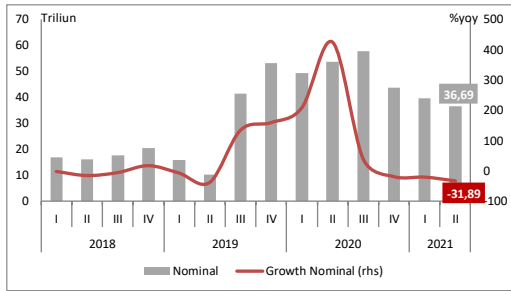
V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai di Provinsi Kalimantan Timur

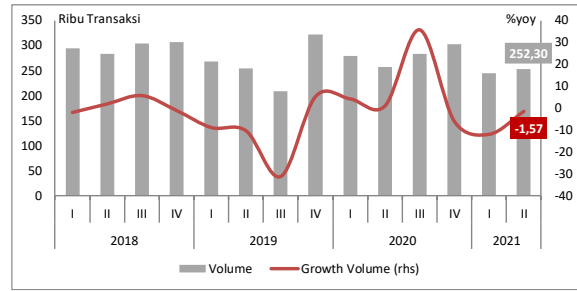
5.1.1 Transaksi Sistem Pembayaran melalui Bank Indonesia

Perbaikan kinerja transaksi nontunai pada triwulan II 2021 masih tertahan seiring dengan perilaku korporasi yang masih cenderung *wait and see* di masa pandemi COVID-19, namun kinerja volume transaksi non tunai mengalami perbaikan pertumbuhan tahunannya. Kinerja transaksi nontunai secara nominal mengalami kontraksi sebesar 31,89% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 19,61% (yoy) (Grafik V.1). Kontraksi yang lebih dalam ini disebabkan oleh perilaku *wait and see* dari sektor korporasi yang tercermin dari peningkatan DPK Korporasi pada triwulan II 2021 sebesar 35,34% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,26% (yoy). Di sisi lain, kinerja transaksi nontunai secara volume mengalami perbaikan kontraksi sebesar 1,57% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 12,04% (yoy) (Grafik V.2).

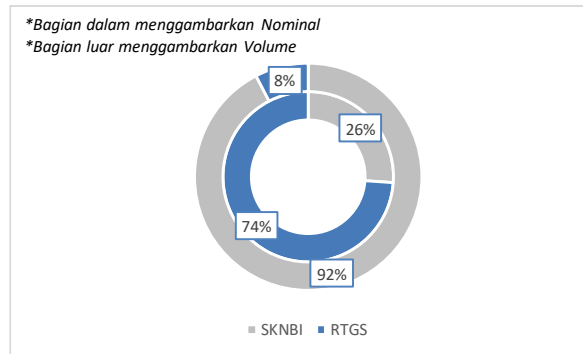
Penurunan kinerja transaksi nontunai disebabkan oleh menurunnya kinerja transaksi RTGS Transaksi nontunai utama di Kaltim terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Pada triwulan II 2021, transaksi RTGS sebesar Rp27,11 triliun atau menyumbang 74% dari seluruh transaksi nontunai di Kaltim. Sementara berdasarkan volume transaksi, transaksi nontunai yang menggunakan SKNBI sebesar 233.156 transaksi atau sebesar 92% dari total volume transaksi nontunai di Kaltim (Grafik V.3). Penurunan transaksi non tunai bersumber dari terkontraksinya transaksi RTGS Kaltim pada triwulan II 2021. Sementara itu, transaksi SKNBI masih mengalami peningkatan. Adapun Peningkatan volume transaksi nontunai Kaltim didorong oleh mengecilnya kontraksi dari volume transaksi SKNBI serta volume transaksi RTGS yang masih tumbuh positif pada triwulan II 2021.



Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Nontunai Kalimantan Timur

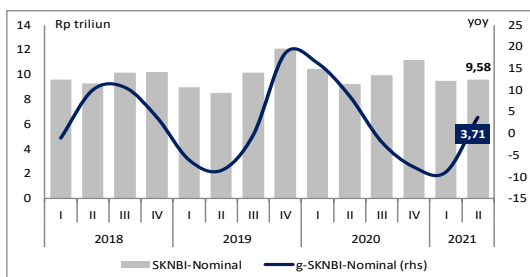


Grafik V.2 Perkembangan Volume Transaksi Nontunai Kalimantan Timur (%yoy)

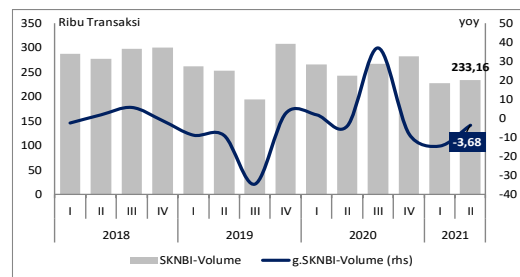


Grafik V.3 Transaksi Nontunai Kaltim Triwulan II 2021 Berdasarkan Instrumennya

Pada triwulan II 2021, kinerja transaksi nontunai SKNBI mengalami perbaikan baik dari segi nilai maupun volume. Transaksi SKNBI secara nominal tumbuh sebesar 3,71% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 8,92% (yoy) (Grafik V.4). Sementara itu, kontraksi transaksi nontunai secara volume mengecil, yaitu sebesar 3,68% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 14,63% (yoy) (Grafik V.5). Transaksi nontunai di Provinsi Kaltim yang menggunakan SKNBI pada triwulan II 2021 secara nominal dan volume tercatat sebesar Rp9,58 triliun dan 233,15 ribu transaksi, mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp9,50 triliun dan 227,07 ribu transaksi.



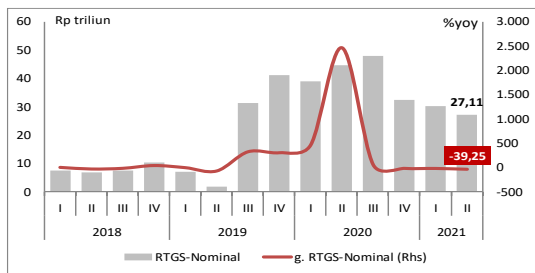
Grafik V.4 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI Kaltim



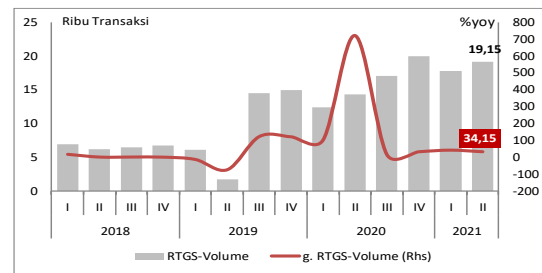
Grafik V.5 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI Kaltim

Berbeda dengan kinerja transaksi SKNBI, kinerja transaksi RTGS mengalami pemburukan baik dari pertumbuhan nominal serta volume namun kembali naik dari sisi volume transaksinya. Kinerja transaksi RTGS secara nominal mengalami kontraksi sebesar

39,25% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 22,47% (yoy) (Grafik V.6). Transaksi nontunai di Provinsi Kaltim yang menggunakan RTGS pada triwulan II 2021 secara nominal sebesar Rp27,11 triliun atau turun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp32,23 triliun. Selain itu, kinerja transaksi nontunai RTGS secara volume juga tumbuh melambat sebesar 34,15% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 43,53% (yoy). Meskipun secara tahunan mengalami perlambatan volume, jumlah transaksi RTGS pada triwulan II masih mengalami peningkatan dengan tercatat 19,15 ribu transaksi setelah pada triwulan sebelumnya sebesar 17,76 ribu transaksi.



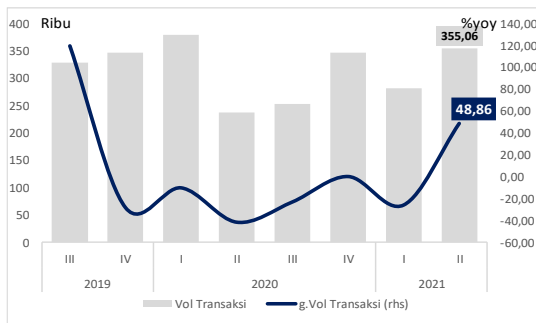
Grafik V.6 Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Kaltim



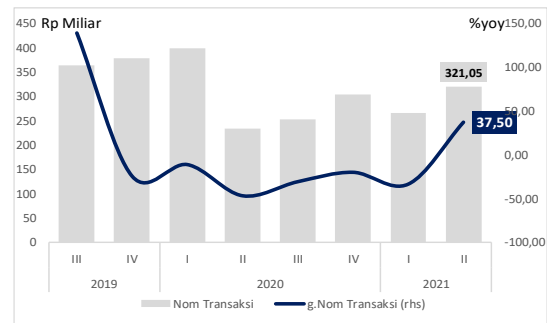
Grafik V.7 Perkembangan Volume Transaksi RTGS Kaltim

5.1.2 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) & E-Commerce

Transaksi nontunai masyarakat dengan menggunakan kartu kredit mengalami peningkatan pada triwulan II 2021 baik dari segi volume maupun nominal transaksi seiring dengan perbaikan perekonomian Kaltim. Volume transaksi kartu kredit mengalami peningkatan dari -25,79% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 48,86% (yoy) pada triwulan II 2021 (Grafik V.8). Sementara itu, transaksi kartu kredit secara nominal juga meningkat sebesar 37,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 33,41% (yoy) (Grafik V.9). Peningkatan transaksi kartu kredit di masyarakat terjadi utamanya didorong oleh optimisme masyarakat yang mengalami peningkatan seiring dengan adanya momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta perekonomian Kaltim yang semakin membaik pada triwulan II 2021.

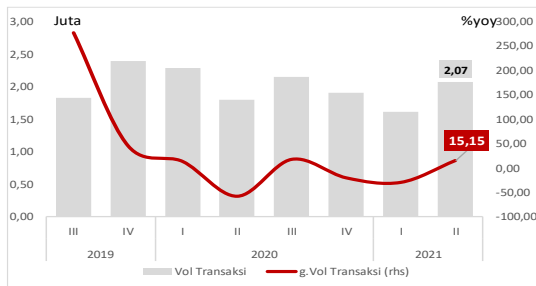


Grafik V.8 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit Kaltim

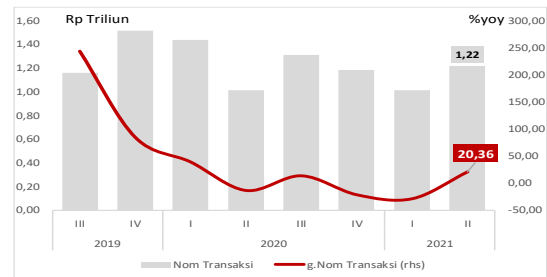


Grafik V.9 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit Kaltim

Sejalan dengan peningkatan transaksi kartu kredit, transaksi kartu ATM/Debit juga mengalami peningkatan pada triwulan II 2021. Volume transaksi kartu ATM/Debit sebesar 2,07 juta transaksi, atau meningkat sebesar 15,15% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 29,57% (yoy) (Grafik V.10). Dari segi nominal, transaksi kartu ATM/Debit juga mengalami peningkatan sebesar 20,36% (yoy) atau Rp1,22 triliun (Grafik V.11). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nominal transaksi triwulan sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,01 triliun.

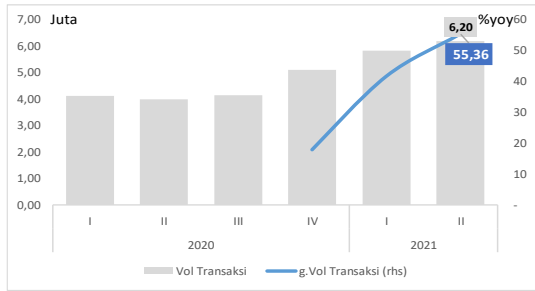


Grafik V.10 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit Kaltim

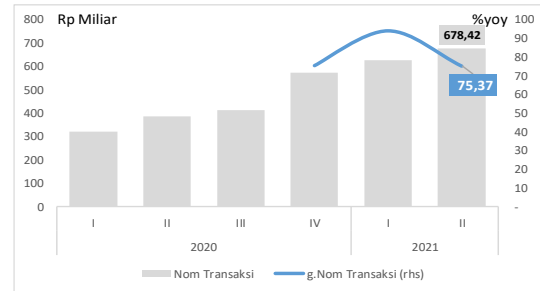


Grafik V.11 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit Kaltim

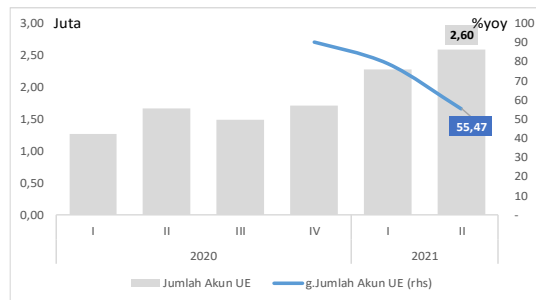
Demikian pula, seiring dengan implementasi elektronifikasi di Kaltim yang terus digencarkan, jumlah akun dan transaksi ritel Uang Elektronik (UE) terus mengalami peningkatan. Volume transaksi UE pada triwulan II 2021 sebesar 6,20 juta transaksi atau tumbuh sebesar 55,36% (yoy) (Grafik V.12). Dari segi nominal, transaksi UE juga mengalami peningkatan dengan sebesar Rp 678,42 miliar meskipun secara tahunan tumbuh sedikit melambat sebesar 75,37% (yoy) (Grafik V.13). Selama pandemi COVID-19 berlangsung, kepemilikan UE di masyarakat terus mengalami peningkatan hingga sebesar terdapat total sejumlah 2,6 juta akun UE pada triwulan II 2021 (Grafik V.14).



Grafik V.12 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik Kaltim



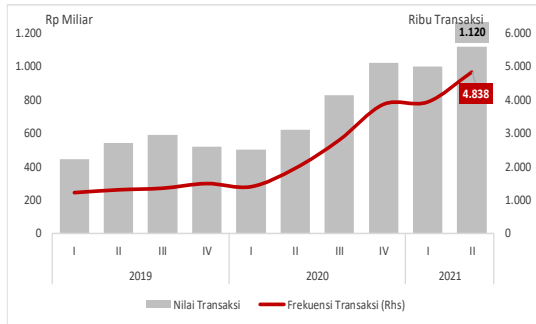
Grafik V.13 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik Kaltim



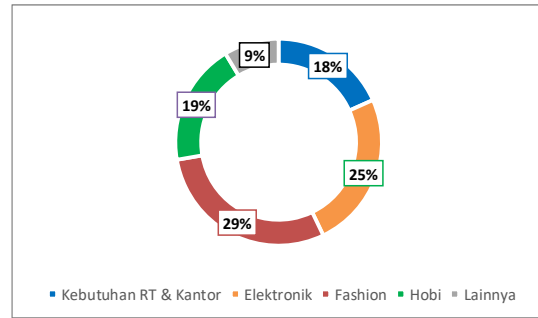
Grafik V.14 Perkembangan Jumlah Akun Uang Elektronik Kaltim

Sejalan dengan peningkatan transaksi penggunaan APMK dan UE serta mobilitas masyarakat yang cenderung terbatas akibat berlanjutnya pandemi COVID-19, transaksi masyarakat melalui *e-commerce*⁷ juga kembali meningkat pada triwulan II 2021. Volume transaksi *e-commerce* di Kaltim sebanyak 4,8 juta transaksi, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 3,9 juta transaksi. Nominal transaksi *e-commerce* di Kaltim turut mengalami peningkatan dengan tercatat sebesar Rp 1,12 triliun (Grafik V.15). Berdasarkan pangsa jenis produk yang dibeli, transaksi *e-commerce* oleh masyarakat Kaltim didominasi oleh transaksi produk-produk *fashion* sebesar 29% dari total nominal transaksi. Selain produk *fashion*, transaksi *e-commerce* Kaltim didominasi oleh produk elektronik, kebutuhan rumah tangga & kantor, serta hobi, dengan pangsa masing-masing sebesar 25%, 19%, dan 18% (Grafik V.16).

⁷ Data *e-commerce* merupakan data agregat yang berasal dari sejumlah *marketplace* terbesar di Indonesia, sehingga belum mencerminkan keseluruhan populasi industri *e-commerce*.



Grafik V.15 Perkembangan Transaksi E-Commerce Kaltim



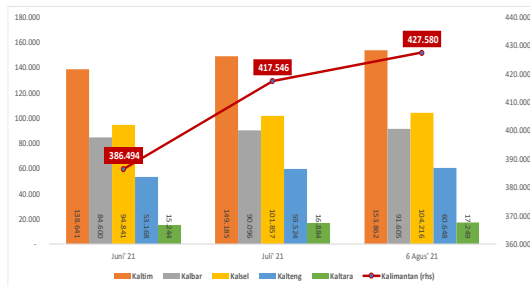
Grafik V.16 Pangsa Transaksi E-Commerce Kaltim berdasarkan Jenis Produknya

5.1.3 Program Digitalisasi Transaksi Keuangan dengan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

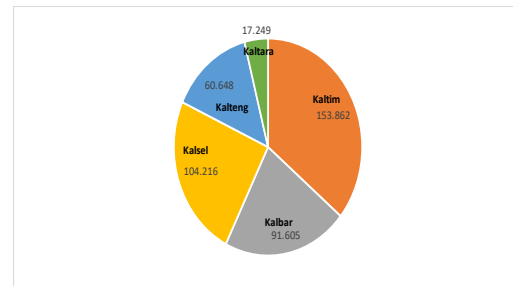
Sejalan dengan pesatnya perkembangan digitalisasi di era pandemi COVID-19, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi transaksi keuangan di Kaltim dengan mengakselerasi penggunaan QRIS. Pandemi COVID-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi transaksi keuangan karena lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan transaksi tunai. Untuk lebih mendorong penggunaan transaksi nontunai, Bank Indonesia melakukan edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan. Salah satu kanal pembayaran nontunai yang dipercepat perluasannya adalah QRIS. Perkembangan jumlah *merchant* QRIS selama triwulan II 2021 terpantau terus meningkat, termasuk penggunaan QRIS oleh UMKM seiring pelaksanaan program pengembangan UMKM *go digital*. Sejumlah upaya terus ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mendorong elektronifikasi transaksi keuangan, di antaranya kepada UMKM, melalui edukasi/sosialisasi/pelatihan secara *offline* dan *online*, penyelenggaraan Expo UMKM yang semua pembayarannya menggunakan QRIS, penyelenggaraan “*Virtual Banking & QRIS Expo*” yang terbuka selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu nonstop selama 1 tahun, serta berbagai upaya untuk terus memperluas pendaftaran dan penggunaan QRIS di berbagai komunitas, pelaku usaha dan masyarakat luas.

Pertumbuhan jumlah *merchant* QRIS di Kaltim meningkat secara signifikan dan merupakan yang terbanyak untuk jumlah pendaftaran QRIS se-Kalimantan. Hingga 6 Agustus 2021, jumlah *merchant* QRIS di Kalimantan telah mencapai 427.580 *merchant* (Grafik V.17). Kalimantan Timur berkontribusi sebesar 36% dari total *merchant* QRIS di Kalimantan atau sejumlah 153.862 *merchant*. Urutan berikutnya adalah Kalsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltara berturut-turut sebanyak 104.216, 91.605, 60.648, dan 17.249 *merchant* (Grafik V.18). Berdasarkan spasial, dari 10 kota/kabupaten di Kaltim, pertumbuhan jumlah *merchant* tertinggi

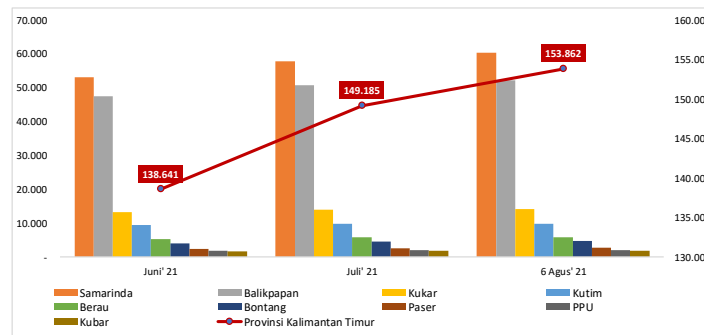
berasal dari Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur (Grafik V.19). Secara pangsa, 39,23% dari *merchant* QRIS berada di Kota Samarinda, diikuti oleh 34,02% di Kota Balikpapan, serta 9,18% dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan sisanya berada di 7 (tujuh) kota atau kabupaten lainnya.



Grafik V.17 Jumlah QRIS di Masing-Masing Provinsi Kalimantan



Grafik V.18 Persebaran Jumlah Merchant QRIS di Kalimantan



Grafik V.19 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di Kaltim

Kegiatan edukasi/sosialisasi/ kampanye untuk memperluas akseptasi QRIS dan berbagai produk *digital banking* di berbagai komunitas merchant dan masyarakat luas terus dilakukan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan banyak *stakeholders* terkait. Program perluasan penggunaan QRIS berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik bank maupun nonbank, serta lembaga lainnya antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), universitas/sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Penegak Hukum (Apgakum), pelaku atau industri kesehatan, Perbankan, UMKM dan *stakeholders* lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui *online webinar* dan/atau sosialisasi secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19. Melalui kegiatan ini, penerimaan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terhadap QRIS serta pemanfaatannya diharapkan akan semakin terakselerasi. Selain itu, untuk menjangkau masyarakat terjauh dan kapanpun, Bank Indonesia bekerja sama dengan PJPS Kaltim berserta pemerintah daerah menyelenggarakan *Virtual Banking dan QRIS Expo*. *Virtual Banking and QRIS Expo* dapat diakses pada [website www.laminetam.id](http://www.laminetam.id) sehingga masyarakat dapat memiliki

pengalaman baru yang mudah tanpa keluar rumah kapanpun juga dalam mencari informasi tentang produk *digital banking* dan QRIS secara 3 (tiga) dimensi karena terbuka selama 24 jam 7 hari seminggu sampai dengan bulan Maret 2022. *Virtual Banking dan QRIS Expo* dapat memberikan edukasi serta sosialisasi QRIS kepada banyak komunitas antara lain: pemda/instansi vertikal, kuliner kria khas daerah, pendidikan keagamaan, pasar tradisional, Apgakum, warung, korporasi daerah, pendidikan umum, pelaku atau industri kesehatan, dan pariwisata. Selain itu, kegiatan edukasi/ sosialisasi fitur QRIS terbaru yaitu QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM) juga terus dilaksanakan sebagai salah satu solusi pada masa PPKM level-4, sehingga seluruh lapisan masyarakat terutama UMKM dapat terus melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan protokol kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah.

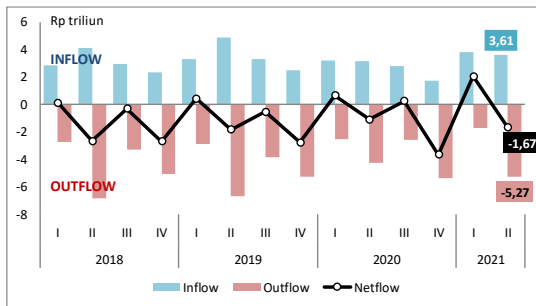
5.1 Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi Kaltim pada triwulan II 2021 kembali mencatat posisi *net outflow*, sejalan dengan pola *seasonal* tahunan yang bertepatan dengan momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta perbaikan pertumbuhan ekonomi. Secara nominal, nilai uang kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia (*outflow*) pada triwulan II 2021 sebesar Rp5,27 triliun atau tumbuh sebesar 23,19% (yoy). Sementara itu, nilai uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) sebesar Rp3,61 triliun atau tumbuh 13,34% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,34% (yoy) (Grafik V.20). Dengan demikian, pada triwulan II 2021 transaksi kas tunai di Kaltim berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp1,67 triliun atau selisih Rp3,73 triliun dari posisi triwulan sebelumnya yang mencatat *net inflow* sebesar Rp2,06 triliun. *Net outflow* yang dialami sejalan dengan pola *seasonal* tahunan yang disebabkan oleh keluarnya aliran uang seiring adanya momen peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan II 2021 sebesar 5,76% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 2,96% (yoy). Secara spasial, *outflow* terbesar bersumber dari wilayah kerja Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur⁸ sebesar Rp3,48 triliun dan diikuti oleh Bank Indonesia Balikpapan⁹ sebesar Rp 1,79 triliun (Grafik V.21). Pada triwulan II 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengalami *net outflow* Rp0,79 triliun,

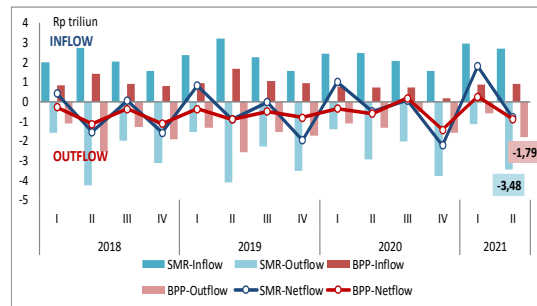
⁸ Meliputi Kabupaten/ Kota di Kaltim selain kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

⁹ Meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

sementara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan mengalami *net outflow* sebesar Rp0,88 triliun.



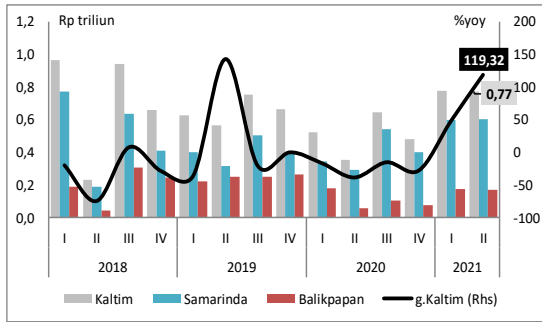
Grafik V.20 Pengedaran Uang Kartal Kalimantan Timur¹⁰



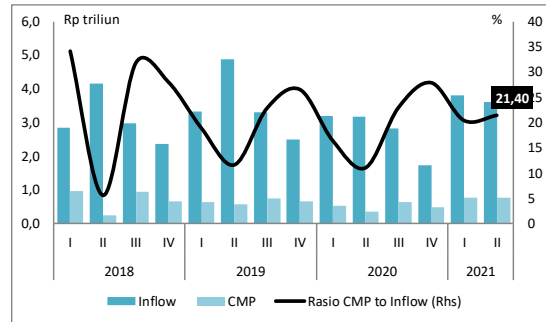
Grafik V.21 Uang Kartal Kalimantan Timur – Spasial

Seiring perbaikan ekonomi, penyediaan uang rupiah layak edar (ULE) kepada masyarakat di seluruh wilayah Kaltim pada triwulan II 2021 juga meningkat dan tetap terpenuhi sesuai kebutuhannya. Bank Indonesia berupaya memastikan terpenuhinya kebutuhan uang tunai masyarakat di wilayah Kaltim melalui optimalisasi kegiatan Kas Titipan di 4 (empat) Kas Titipan yang berlokasi di Sangatta (Kabupaten Kutai Timur), Tanjung Redeb (Kabupaten Berau), Sendawar (Kabupaten Kutai Barat), dan Tana Paser (Kabupaten Paser). Selama triwulan II 2021, jumlah nominal *dropping* ULE kepada 4 (empat) Kas Titipan tersebut sebesar Rp1,13 triliun, meningkat dari *dropping* triwulan sebelumnya sebesar Rp 0,61 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan posisi *net outflow* Kaltim. Sementara itu, total *inflow* UTLE dari Kas Titipan pada triwulan II 2021 sebesar Rp41,77 miliar atau meningkat dibandingkan dengan *inflow* UTLE pada triwulan sebelumnya sebesar Rp35,55 miliar.

Sementara itu, jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang ditarik dari masyarakat pada triwulan II 2021 mengalami penurunan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas peredaran uang dan pengelolaan uang kartal, Bank Indonesia juga senantiasa memelihara kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat melalui kebijakan *Clean Money Policy* (CMP) terlebih pada masa pandemi seperti ini. Kebijakan CMP ini di antaranya dilakukan melalui kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Pada triwulan II 2021, nominal penarikan UTLE adalah sebesar Rp772 miliar, sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp777 miliar (Grafik V.22). Di samping itu, rasio UTLE terhadap *inflow* pada triwulan II 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 20,40% menjadi 21,40% (Grafik V.23).

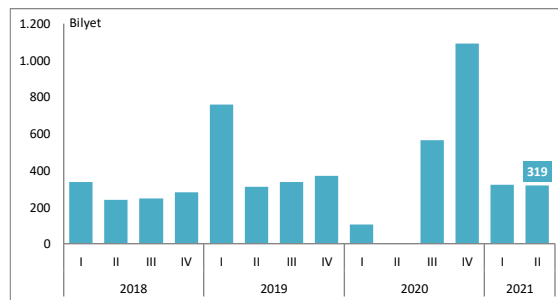


Grafik V.22 Penarikan Uang Tidak Layak Edar Kaltim



Grafik V.23 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap *Inflow* Kaltim

Sementara itu, jumlah temuan uang palsu yang dilaporkan kepada Bank Indonesia selama triwulan II 2021 kembali mengalami penurunan dan didominasi pecahan besar. Berdasarkan data laporan perbankan, terdapat 319 bilyet uang palsu, menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 324 bilyet (Grafik V.24). Temuan uang palsu pada triwulan II 2021 didominasi oleh-2 (dua) pecahan uang terbesar yaitu Rp100.000 dan Rp50.000 sebanyak masing-masing sebesar 178 bilyet dan 124 bilyet temuan. Secara spasial, temuan uang palsu didominasi temuan dari Kota Samarinda yaitu sebanyak 226 bilyet atau sebesar 70,85% dari total temuan. Sebagai langkah mengurangi peredaran uang palsu di masa pandemi dan dalam rangka menghindari transmisi penyebaran COVID-19, Bank Indonesia terus berupaya mendorong masyarakat beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi nontunai.



Grafik V.24 Temuan Uang Palsu Kaltim



Foto: Dayak Tunjung, Kab Kutai Kartanegara

BAB. VI KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

- *Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim mengalami penurunan terutama tercermin dari menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, sejalan dengan tertahannya tren perbaikan perekonomian pada triwulan I 2021.*
- *Selain itu, tingkat kesejahteraan juga menurun yang tercermin dari peningkatan kemiskinan berdasarkan kedalaman dan keparahan, jumlah penduduk miskin, dan ketimpangan pendapatan.*
- *Namun demikian, kesejahteraan sebagian petani meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi Kaltim pada triwulan II 2021. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan pada triwulan II 2021 yang terutama bersumber dari subsektor perkebunan seiring dengan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS).*

VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1 Gambaran Umum

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kaltim secara umum mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan kondisi ketenagakerjaan tersebut ditunjukkan oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, kondisi kesejahteraan yang menurun juga terindikasi dari naiknya tingkat kemiskinan dan turunnya IPM meskipun masih dalam level yang relatif tinggi. Di sisi lain, kondisi kesejahteraan sebagian petani meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh NTP Kaltim yang mengalami peningkatan pada triwulan II 2021 yang utamanya bersumber dari peningkatan NTP pada sub-lapangan usaha perkebunan.

6.2 Ketenagakerjaan

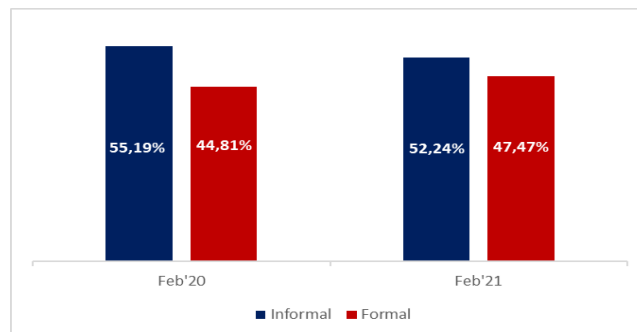
Kondisi ketenagakerjaan Kaltim pada bulan Februari 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 seiring dengan tertahannya tren perbaikan perekonomian Kaltim pada triwulan I 2021. Penurunan tersebut ditandai dengan TPAK Kaltim yang turun cukup signifikan pada Februari 2021 menjadi 67,46%, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 71,79% akibat menurunnya jumlah angkatan kerja dan meningkatnya jumlah penduduk. Penurunan jumlah angkatan kerja sebesar 4,51% (yoy) menjadi 1,88 juta jiwa terutama disebabkan oleh penurunan jumlah orang yang bekerja sebesar 4,61% (yoy) atau menjadi 1,75 juta jiwa seiring dengan masih terkontraksinya pertumbuhan ekonomi selama triwulan I 2021. Sementara itu, TPT di Kaltim meningkat dari 6,72% menjadi 6,81%, didorong oleh kinerja pada hampir seluruh lapangan usaha yang belum sepenuhnya membaik sehingga serapan tenaga kerja masih belum optimal (Tabel VI.1). Secara demografis, peningkatan TPT bersumber dari meningkatnya TPT Laki-Laki, yang pada Februari 2021 menjadi 7,18%, dari 6,65% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara itu, TPT Perempuan cenderung terus menurun menjadi 6,12%, dari 6,84% pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim

Kondisi Ketenagakerjaan	Februari 2020	Februari 2021	Pertumbuhan	
			Orang	%
A. Jumlah Penduduk 15+	2,751,780	2,796,450	44,670	1.62
B. Jumlah Angkatan Kerja	1,975,530	1,886,360	(89,170)	-4.51
B.1. Jumlah Bekerja	1,842,810	1,757,900	(84,910)	-4.61
B.2. Jumlah Penganggur	132,720	128,460	(4,260)	-3.21
C. Bukan Angkatan Kerja	776,250	910,090	133,840	17.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK = [B/A] x 100)	71.79	67.46		↓
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT = [B.2/B] x 100)	6.72	6.81		↑

Sumber : BPS, diolah

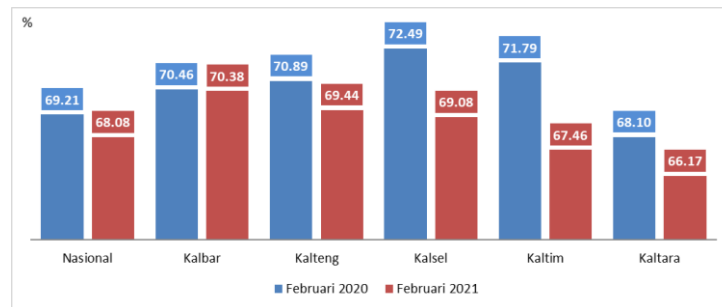
Sampai dengan Februari 2021, tenaga kerja di Kaltim didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Provinsi Kaltim, persentase tenaga kerja Kaltim yang bekerja di sektor informal pada tahun 2021 sebesar 52,24% atau lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja Kaltim yang bekerja di sektor formal sebesar 47,47% (Grafik VI.1). Capaian ini terjadi akibat ketersediaan atau permintaan tenaga kerja pada sektor formal masih relatif minim dan terbatas, sehingga calon pekerja beralih kepada sektor informal guna bertahan hidup. Perkembangan sektor informal juga dapat dipandang dari dua sisi yaitu adanya perkembangan ekonomi digital dan teknologi yang memicu tumbuhnya wiraswasta secara *online* dan mandiri. Selain itu, pertumbuhan sektor informal juga dapat mencerminkan pembangunan yang belum merata.



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.1 Tenaga Kerja Kaltim Berdasarkan Sektor Formal dan Informal

Penurunan TPAK yang cukup signifikan membuat Kaltim menempati posisi dua terendah TPAK untuk wilayah Kalimantan dan berada di bawah level TPAK Nasional. Di kawasan Kalimantan, Kaltim berada di peringkat kedua TPAK terendah setelah Kaltara sebesar 66,17%. TPAK Kaltim periode Februari 2021 tersebut juga masih berada di bawah level TPAK nasional sebesar 68,08%. Capaian TPAK Kaltim saat ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada periode Februari 2020, Kaltim berada di posisi dua teratas dengan TPAK sebesar 71,79% di bawah TPAK Kalsel sebesar 72,49% (Grafik VI.2).



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.2 Perbandingan TPAK Kalimantan Berdasarkan Provinsi

Sementara itu, peningkatan TPT Kaltim menjadikan Kaltim tetap berada di atas TPT kawasan Kalimantan lainnya, yang mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada Februari 2021 sebesar 6,81% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lain di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim menempati 10 besar dengan TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 6,26% atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,94% (Tabel VI.2). Tingginya level TPT tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur cenderung masih belum sepenuhnya pulih.

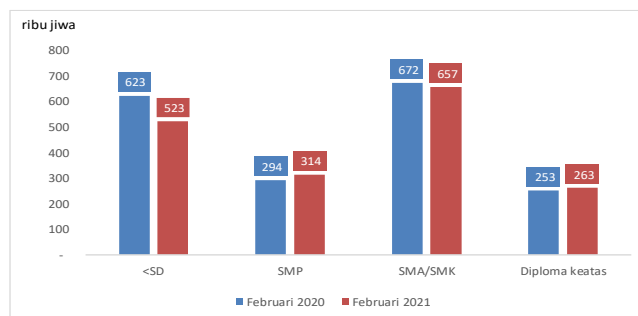
Tabel VI.2 TPT Provinsi di Kalimantan dan Nasional

No	Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Ranking Nasional
		Februari 2020	Februari 2021	
1	Kalimantan Barat	4.47	5.73	14
2	Kalimantan Tengah	3.33	4.25	27
3	Kalimantan Selatan	3.67	4.33	24
4	Kalimantan Timur	6.72	6.81	6
5	Kalimantan Utara	5.71	4.67	22
6	Nasional	4.94	6.26	-

Sumber: BPS, diolah

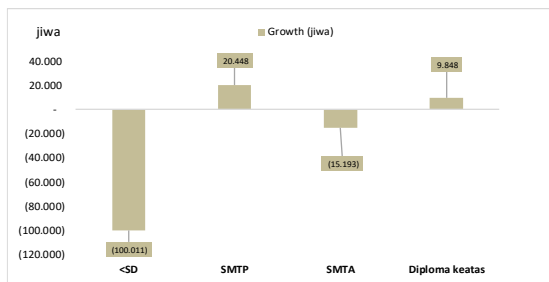
Selanjutnya, penurunan jumlah penduduk yang bekerja utamanya bersumber dari penurunan penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Pada Februari 2021, jumlah penduduk Kaltim tamatan SD yang bekerja turun sebesar 16,04% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 623.412 jiwa (Grafik VI.3). Selain itu, jumlah penduduk tamatan SMA/SMK yang bekerja juga mengalami penurunan sebesar 2,26% (yoy) atau sebanyak 15.193 jiwa, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebanyak 672.320 jiwa. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) meningkat sebesar 6,96% (yoy), diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas sebesar 3,89% (yoy) (Grafik VI.4).

Berdasarkan pangsa, sebagian besar penduduk di Provinsi Kaltim yang bekerja merupakan pekerja dengan pendidikan terakhir SMA/SMK. Pada Februari 2021, jumlah penduduk yang bekerja di Kaltim didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebesar 37,38%. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan diploma ke atas tercatat paling sedikit dengan porsi sebesar 14,96% dari total penduduk yang bekerja di Kaltim. Capaian ini mencerminkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Kaltim masih didominasi oleh pekerjaan yang belum memprioritaskan kompetensi dan keahlian yang tinggi (Grafik VI.5).



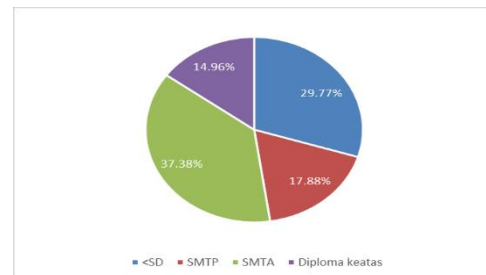
Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.3 Perbandingan TPAK Kalimantan Timur



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.4 Perkembangan Penduduk Kaltim yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.5 Pangsa Penduduk Kaltim yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan status usaha, penurunan penduduk yang bekerja utamanya disebabkan oleh penurunan jumlah pekerja buruh/karyawan. Jumlah penurunan pada status buruh/karyawan tercatat sebanyak 81.246 jiwa atau turun sebesar 8,76% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, jumlah pekerja berusaha dibantu buruh tetap dan pekerja keluarga/tak dibayar juga tercatat turun masing-masing 17.418 orang dan 10.313 orang atau sebesar 19,39% (yoy) dan 4,96% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun demikian, penurunan penduduk bekerja yang lebih dalam tertahan oleh meningkatnya jumlah penduduk bekerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas di non pertanian masing-masing 23.191 orang dan 11.352 atau

sebesar 6,80% (yoy) dan 24,23% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (Tabel VI.3).

Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan tercatat memiliki pangsa terbesar yakni 48,12% dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Pangsa ini mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 50,31%. Penduduk yang berusaha sendiri menempati posisi kedua terbanyak dengan pangsa sebesar 20,71%. Sementara itu, untuk pekerjaan dengan porsi terendah ditempati oleh pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non-pertanian, masing-masing dengan porsi sebesar 1,02% dan 3,31% dari total penduduk bekerja di Kaltim (Tabel VI.3).

Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Usaha	Februari 2020	Februari 2021	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Berusaha Sendiri	340,937	364,128	23,191	6.80	20.71
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	209,868	201,760	(8,108)	-3.86	11.48
Berusaha dibantu buruh tetap	89,828	72,410	(17,418)	-19.39	4.12
Buruh/Karyawan	927,156	845,892	(81,264)	-8.76	48.12
Pekerja bebas di pertanian	20,348	18,000	(2,348)	-11.54	1.02
Pekerja bebas di non pertanian	46850	58202	11,352	24.23	3.31
Pekerja keluarga/tak dibayar	207,818	197,505	(10,313)	-4.96	11.24
Total	1,842,805	1,757,897	(84,908)	-4.61	100.00

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan lapangan usaha, turunnya jumlah penduduk yang bekerja disebabkan oleh turunnya tenaga kerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, disusul lapangan usaha industri pengolahan. Tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan berkurang sebanyak 77.704 jiwa atau turun sebesar 17,88% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Capaian serupa juga terjadi pada tenaga kerja industri pengolahan yang berkurang sebanyak 35.850 jiwa atau turun sebesar 23,29% (yoy). Penurunan yang lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan penduduk yang bekerja di lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan jumlah tenaga kerja meningkat dari 72.853 menjadi 95.671 atau tumbuh sebesar 31,32% (yoy) (Tabel VI.4).

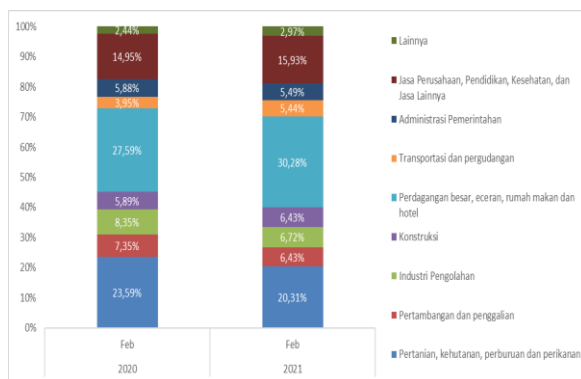
Tabel VI.4 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	Februari 2020	Februari 2021	Pertumbuhan		Pangsa
			Jiwa	%	%
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	434,655	356,951	(77,704)	-17.88	20.31%
Pertambangan dan penggalian	135,462	113,079	(22,383)	-16.52	6.43%
Industri Pengolahan	153,915	118,065	(35,850)	-23.29	6.72%
Konstruksi	108,625	113,086	4,461	4.11	6.43%
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	508,457	532,333	23,876	4.70	30.28%
Transportasi dan pergudangan	72,853	95,671	22,818	31.32	5.44%
Administrasi Pemerintahan	108,428	96,430	(11,998)	-11.07	5.49%
Jasa Perusahaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Lainnya	275,437	280,073	4,636	1.68	15.93%
Lainnya	44,973	52,209	7,236	16.09	2.97%
Total	1,842,805	1,757,897	(84,908)	-4.61	100%

Sumber : BPS, diolah

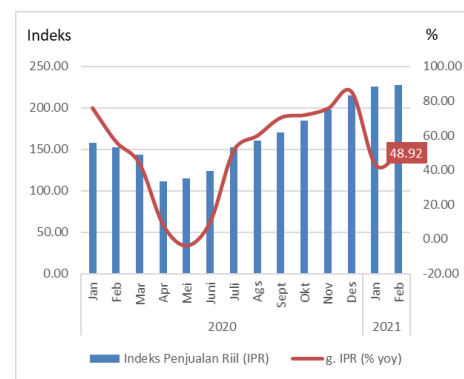
Berdasarkan pangsa tenaga kerja, lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul dengan lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha jasa perusahaan, pendidikan,

kehatan, dan jasa lainnya. Lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel pada Februari 2021 memiliki pangsa sebesar 30,28%, meningkat dibandingkan dengan Februari 2020 dengan pangsa sebesar 27,59% dari total tenaga kerja di Kaltim. Selanjutnya, pangsa tenaga kerja pada posisi kedua ditempati oleh lapangan usaha pertanian sebesar 20,31% atau lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 23,59%. Kemudian disusul oleh lapangan usaha jasa perusahaan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya dengan pangsa tenaga kerja sebesar 15,93% dari total tenaga kerja di Kaltim atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 14,95% (Grafik VI.6). Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel sejalan dengan permintaan masyarakat terhadap produk-produk lapangan usaha tersebut yang masih terjaga di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut tercermin dari peningkatan indeks penjualan riil pada Februari 2021 sebesar 227,0 atau tumbuh sebesar 48,9% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang sebesar 152,5 (Grafik VI.7).



Sumber: BPS, diolah

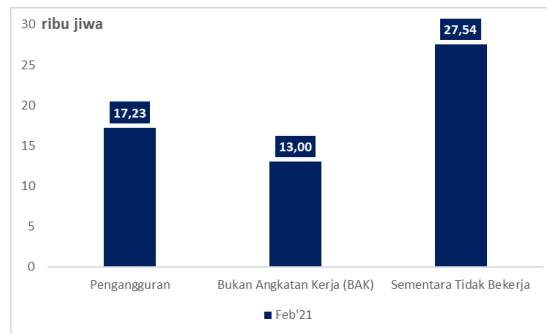
Grafik VI.6 Pangsa Tenaga Kerja Sektoral Kaltim



Sumber: Survei Penjualan Eceran BI, diolah

Grafik VI.7 Indeks Penjualan Riil Kaltim

Penurunan jumlah penduduk yang bekerja diakibatkan oleh wabah COVID-19 tercermin dari capaian TPT. Pada Februari 2021, setidaknya 57,77 ribu orang penduduk usia kerja Kaltim terdampak penurunan kinerja perekonomian akibat pandemi COVID-19, yang terdiri dari 17,23 ribu orang pengangguran (berhenti bekerja karena COVID-19), 13,00 ribu orang yang termasuk bukan angkatan kerja dan berhenti bekerja karena COVID-19, serta 27,54 ribu orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 (Grafik VI.8). Capaian ini mengindikasikan bahwa tertahannya aktivitas ekonomi berdampak pada tertahannya aktivitas produksi lapangan usaha yang akhirnya berimbas pada dirumahnya sebagian tenaga kerja sebagai upaya menekan biaya operasional lapangan usaha. Hal tersebut berdampak pada hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat dan mendorong kenaikan jumlah pengangguran.



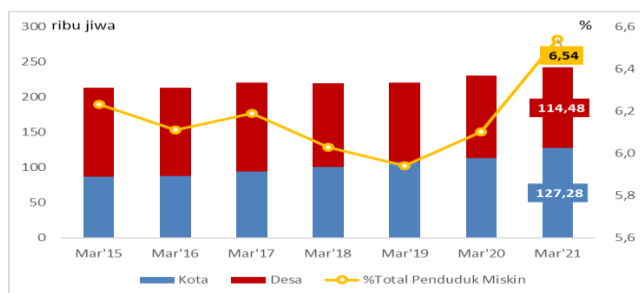
Sumber : BPS, diolah

Grafik VI.8 Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan

6.3 Kesejahteraan

Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang menurun, kondisi kesejahteraan masyarakat Kaltim juga mengalami penurunan yang tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk miskin, terutama di perkotaan, meskipun di perdesaan jumlah penduduk miskin relatif menurun. Sampai dengan Maret 2021, tingkat kemiskinan Kaltim meningkat menjadi 6,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,10%. Meningkatnya tingkat kemiskinan tersebut bersumber dari meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kaltim dari 230,26 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 241,77 ribu jiwa pada bulan Maret 2021. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin sebesar 127,28 ribu jiwa atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 113,27 ribu jiwa. Namun hal yang berbeda terjadi pada wilayah perdesaan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dari 116,99 ribu jiwa pada tahun 2020, menjadi 114,48 ribu jiwa pada tahun 2021 (Grafik VI.9).

Meningkatnya jumlah penduduk miskin terjadi seiring dengan menurunnya kinerja beberapa lapangan usaha utama akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19 di Kaltim. Terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat di Kaltim sebagai dampak dari peningkatan kasus COVID-19 mengakibatkan permintaan dan perekonomian di Kaltim menjadi tertekan. Kondisi tersebut berdampak pada pembatasan kegiatan operasional sebagian lapangan usaha sehingga memicu lapangan usaha untuk melakukan efisiensi, salah satunya dengan menempuh pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong peningkatan angka kemiskinan.

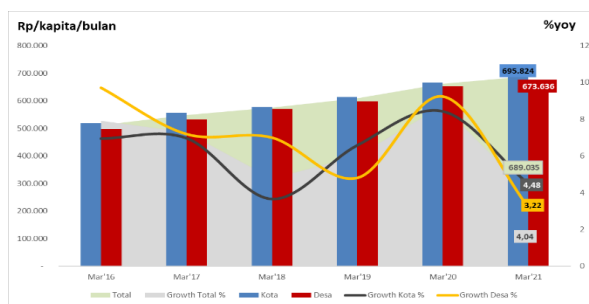


Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.9 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur

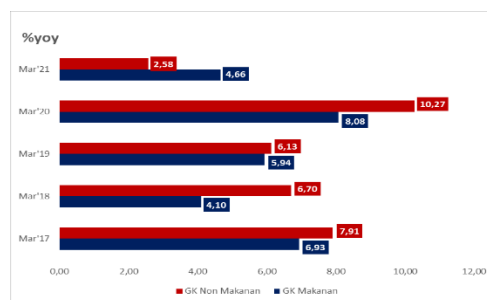
Pada Maret 2021, tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim meningkat sejalan dengan meningkatnya Garis Kemiskinan (GK)¹⁰ baik di perkotaan maupun di perdesaan. GK Kaltim meningkat dari Rp662.302,- per kapita/bulan menjadi Rp689.035,- per kapita/bulan pada tahun 2021. Peningkatan GK di wilayah perkotaan pada tahun 2021 sebesar 4,48% (yoy) atau lebih besar dibandingkan dengan peningkatan GK di wilayah perdesaan sebesar 3,22% (yoy) (Grafik VI.10).

Peningkatan GK bersumber dari naiknya kedua komponennya baik oleh Garis Kemiskinan Makanan (GKM) maupun Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), namun dengan pertumbuhan yang melambat. GKM Kaltim pada bulan Maret 2021 tumbuh sebesar 4,66% (yoy), namun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 8,08% (yoy). Sementara itu, GKNM juga mengalami peningkatan sebesar 2,58% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan GKNM pada tahun 2020 sebesar 10,27% (yoy) (Grafik VI.11).



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.10 Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.11 GKM dan GKNM Kaltim

¹⁰ Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilo kalori/kapita/hari dan kebutuhan nonpangan esensial, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan di sebuah wilayah menunjukkan standar biaya hidup di daerah tersebut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM baik di perkotaan maupun pedesaan utamanya ialah komoditas beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Adapun peningkatan GKNM baik di perkotaan maupun pedesaan bersumber dari komoditas perumahan. Pada Maret 2021 tercatat bahwa komoditas beras merupakan penyumbang terbesar terhadap GKM di perkotaan dan pedesaan dengan masing-masing sebesar 20,96% dan 23,73%. Selanjutnya, rokok kretek filter menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 18,09% di perkotaan dan 20,73% di pedesaan. Kemudian, diikuti oleh komoditas telur ayam ras sebesar 6,19% di perkotaan dan 6,23% di pedesaan. Komoditas lainnya yang mempengaruhi GKM adalah daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe rawit, bawang merah, dan ikan tongkol, tuna, cakalang (TTC) (Tabel VI.5). Di sisi lain, komoditas utama yang mempengaruhi GKNM adalah perumahan yang menyumbang pangsa 39,20% di perkotaan dan 42,46% di pedesaan. Komoditas lainnya yang mempengaruhi GKNM adalah listrik, bensin, pendidikan, perlengkapan mandi, serta perawatan kulit, muka, kuku, rambut (Tabel VI.6).

Tabel VI.5 Persentase Komoditas Makanan terhadap GKM

Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi	%	Komoditi	%
Beras	20,96	Beras	23,73
Rokok kretek filter	18,09	Rokok kretek filter	20,73
Daging ayam ras	6,33	Telur ayam ras	6,23
Telur ayam ras	6,19	Mie instan	4,90
Mie instan	4,05	Gula pasir	4,15
Gula pasir	3,21	Cabe Rawit	3,18
Kue basah	3,21	Bawang merah	2,48
Cabe Rawit	3,07	Daging ayam ras	2,47
Tongkol/tuna/cakalang	2,59	Bandeng	2,27
Bawang merah	2,57	Tongkol/tuna/cakalang	2,26

Sumber: BPS, diolah

Tabel VI.6 Persentase Komoditas Non Makanan terhadap GKNM

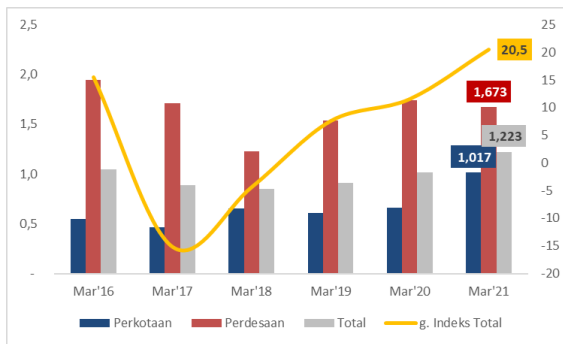
Perkotaan		Pedesaan	
Komoditi	%	Komoditi	%
Perumahan	39,2	Perumahan	42,46
Listrik	12,35	Bensin	12,16
Bensin	9,24	Listrik	9,28
Pendidikan	8,02	Perlengkapan Mandi	4,84
Air	5,39	Pendidikan	4,79
Perlengkapan Mandi	4,67	Sabun Cuci	3,03
Perawatan kulit, muka, kuku,rambut	2,35	Kesehatan	2,71
Pajak Kendaraan Bermotor	2,34	Perawatan kulit, muka, kuku,rambut	2,42

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan data Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)¹¹ Kaltim menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks P1 Kaltim sebesar 1,223 atau meningkat 20,5% (yoy) dari tahun sebelumnya dengan indeks P1 sebesar 1,015. Peningkatan tersebut bersumber dari meningkatnya indeks P1 untuk wilayah perkotaan dari 0,664, menjadi 1,017 pada bulan Maret 2021. Namun demikian, peningkatan indeks P1 yang lebih tinggi tertahan oleh menurunnya indeks P1 wilayah pedesaan menjadi 1,673, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,743. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) periode triwulan I 2021 menjadi 116,98 atau tumbuh sebesar 3,19% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik VI.12).

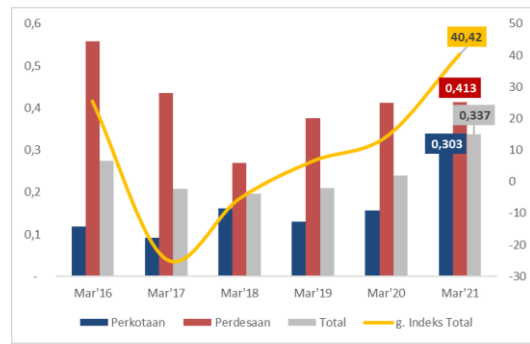
¹¹ Indeks P1 merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Lebih lanjut, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)¹² Kaltim juga meningkat sebesar **40,42% (yoy)**. Pada Maret 2021, indeks P2 Kaltim naik dari 0,24 menjadi 0,337 pada bulan Maret 2021. Meningkatnya indeks keparahan kemiskinan tersebut bersumber baik dari meningkatnya indeks keparahan kemiskinan perkotaan maupun perdesaan. Indeks P2 perkotaan dan perdesaan meningkat masing-masing menjadi 0,303 dan 0,413 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 0,157 dan 0,412 (Grafik VI.13).



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

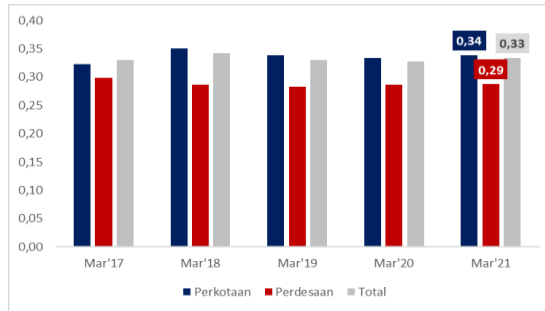


Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.13 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

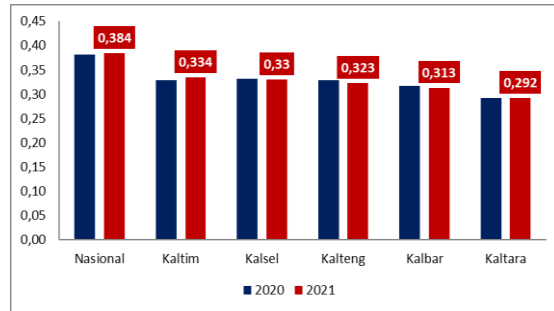
Jumlah penduduk miskin bertambah sejalan dengan ketimpangan pendapatan yang **meningkat**. Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui rasio gini dengan interval 0 – 1. Nilai rasio gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Rasio gini Kaltim pada bulan Maret 2021 sebesar 0,334 atau lebih tinggi daripada bulan Maret 2020 lalu sebesar 0,328. Namun demikian, rasio gini Kaltim masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio gini nasional sebesar 0,384 dan membuat Kaltim menempati posisi rasio gini provinsi ke-19 (urutan rasio gini terbesar ke terkecil) di Indonesia (Grafik VI.14). Adapun secara wilayah Kalimantan, Kaltim menempati posisi tertinggi atau dapat dinyatakan bahwa ketimpangan di Kaltim lebih tinggi daripada di Kalsel, Kalteng, Kalbar dan Kaltara (Grafik VI.15)

¹² Indeks P2 adalah Indeks Keparahan Kemiskinan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara sesama penduduk miskin.



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.14 Perkembangan Rasio Gini Kalimantan Timur



Sumber: BPS, diolah

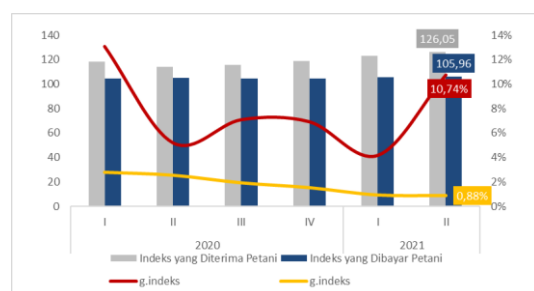
Grafik VI.15 Perkembangan Rasio Gini wilayah Kalimantan

Namun demikian, kondisi kesejahteraan petani Kaltim pada triwulan II menunjukkan perbaikan sejalan dengan capaian NTP yang tumbuh positif sebesar 9,78% (yoy) yang disebabkan oleh kenaikan indeks yang diterima lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayarkan petani Kaltim. NTP¹³ Kaltim pada triwulan II 2021 sebesar 118,97 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 116,98 (Grafik VI.16). Peningkatan NTP tersebut bersumber dari meningkatnya rata-rata indeks yang diterima petani pada triwulan II 2021. Indeks yang diterima petani sebesar 126,05 tumbuh 10,74% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 123,13. Seiring dengan peningkatan indeks yang diterima petani, indeks yang dibayar petani juga tumbuh sebesar 0,88% (yoy) atau meningkat menjadi 105,96 dari 105,26 pada triwulan sebelumnya (Grafik VI.17). Secara tren sejak triwulan I 2020, indeks yang diterima petani selalu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani. Hal tersebut mengindikasikan bahwa petani di Kaltim masih memperoleh margin di tengah tertekannya perekonomian Kaltim di masa pandemi COVID-19.



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.16 Perkembangan NTP Kaltim

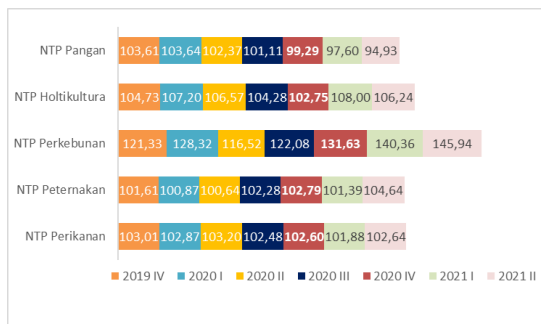


Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.17 Indeks Diterima dan Dibayar Petani Kaltim

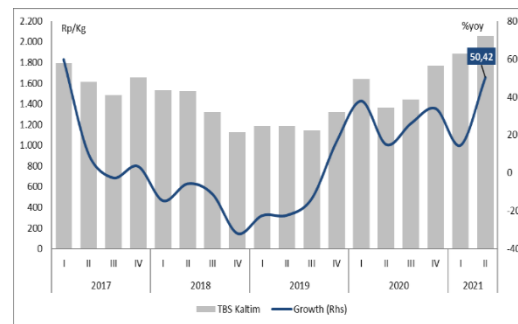
¹³ NTP merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.

Berdasarkan sub-lapangan usaha, peningkatan NTP Kaltim terutama bersumber dari meningkatnya NTP sub-lapangan usaha perkebunan seiring dengan peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kaltim. NTP pada sub-lapangan perkebunan meningkat menjadi 145,94, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 140,36. Peningkatan NTP sub-lapangan perkebunan sejalan dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang masih tumbuh positif pada triwulan II 2021 sebesar 50,42% (yoy) (Grafik VI.18). Peningkatan NTP pada triwulan II 2021 juga dialami oleh sub-lapangan peternakan dan perikanan. Sub-lapangan peternakan meningkat menjadi 104,64 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 101,39. Sedangkan sub-lapangan perikanan meningkat menjadi 102,64 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 101,88 (Grafik VI.19). Peningkatan yang terjadi pada sub lapangan peternakan dan perikanan bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan masuknya momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan II 2021.



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.18 Perkembangan Rata-rata NTP Menurut Sektor Utama



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.19 Perkembangan Harga TBS Kaltim



Foto: Bekantan, Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB. VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

- *Perekonomian Kaltim pada 2021 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh membaiknya kinerja lapangan usaha seiring perbaikan permintaan domestik yang ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat dan perbaikan ekonomi global. Perbaikan ekonomi Kaltim juga didorong oleh berlanjutnya program vaksinasi dan berlanjutnya bantuan sosial dari pemerintah. Namun demikian, terdapat potensi faktor risiko perekonomian Kaltim yang muncul dari sisi lambatnya perkembangan vaksinasi, kemungkinan perkembangan mutasi virus COVID-19 di tingkat global dan nasional, serta prakiraan gangguan cuaca.*
- *Sementara itu, inflasi Kaltim untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan pemulihan permintaan, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Selain dari sisi peningkatan permintaan, potensi tekanan inflasi juga dapat berasal dari terganggunya pasokan/distribusi dan mekanisme pasar kelompok bahan pangan akibat ketergantungan Kaltim terhadap pasokan dari luar provinsi di tengah terjadinya gangguan cuaca, Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan momen panen komoditas pangan yang terjadi di wilayah sentra secara seasonal. Guna mengantisipasi risiko inflasi yang lebih tinggi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara intensif melakukan koordinasi dan melaksanakan berbagai program unggulan di tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten.*

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian Kaltim di tahun 2021 diperkirakan akan kembali tumbuh positif pada rentang 2.25% – 3.25%, utamanya didorong dari peningkatan kinerja lapangan usaha utama sejalan dengan kenaikan permintaan dari negara tujuan ekspor dan juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat di dalam negeri. Berdasarkan sisi penggunaan, kinerja ekspor yang merupakan kontributor terbesar PDRB Kaltim di tahun 2021 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan permintaan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan negara-negara di kawasan ASEAN. Membaiknya kinerja industri dan kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat di negara-negara tersebut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan permintaan komoditas ekspor utama Kaltim seperti batu bara dan CPO. Harga komoditas yang tengah berada di level tinggi pun diperkirakan akan meningkatkan *appetite* para pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya setelah di tahun sebelumnya harga komoditas mengalami penurunan yang cukup dalam. Selain ekspor, kinerja investasi juga diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan berlanjutnya proyek-proyek strategis yang sempat terkendala akibat diberlakukannya pembatasan mobilitas tenaga kerja dan barang modal di masa awal pandemi. Proyek-proyek strategis eksisting seperti *Refinery Development Master Plan (RDMP)* Balikpapan, pembangunan pabrik semen dan pabrik *coal to methanol* di Kutai Timur, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) akan turut meningkatkan kinerja investasi Kaltim. Selain itu, telah disahkannya peraturan turunan UU Cipta Kerja dan simplifikasi perizinan investasi pusat dan daerah akan turut meningkatkan iklim investasi di Kaltim. Lebih lanjut, baik konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah diperkirakan juga akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan dari tahun sebelumnya. Berlanjutnya program vaksinasi dan mulai kembali menggeliatnya aktivitas dunia usaha akan mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi yang juga turut didukung oleh berlanjutnya pemberian bantuan sosial oleh pemerintah.

Berdasarkan lapangan usaha, perekonomian Kaltim yang positif pada tahun 2021 bersumber dari perbaikan pada seluruh lapangan usaha setelah berkontraksi cukup dalam pada tahun sebelumnya. Kinerja lapangan usaha pertambangan diperkirakan tumbuh lebih tinggi seiring dengan potensi meningkatnya permintaan dari negara mitra utama yang

tercermin dari perekonomian beberapa negara mitra yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi di tahun 2021 (Tabel VII.1). Selain itu, meningkatnya tensi hubungan diplomatik Tiongkok – Australia serta besarnya potensi peningkatan permintaan dari Asia Tenggara juga menjadi *upside risk* kinerja pertambangan. Adanya potensi peningkatan permintaan tersebut didorong oleh cuaca yang tidak kondusif untuk penambangan dan *force majeure* yang mengharuskan Tiongkok mengimpor tambahan batu bara dari Indonesia, terutama Kaltim. Revisi penambahan kuota produksi batu bara sebanyak 75 juta ton yang telah disetujui oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) berpotensi secara langsung meningkatkan kinerja lapangan usaha pertambangan untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Sementara itu, pertumbuhan industri pengolahan pada 2021 juga diperkirakan kembali positif sejalan dengan bertambahnya kapasitas pabrik pengolahan bahan bakar nabati (BBN) di Kaltim di tengah berlanjutnya implementasi B30. Kinerja positif industri pengolahan juga didorong oleh *base effect* di industri pengolahan migas yang sempat mengalami *temporary shutdown* pada tahun 2020. Dari sisi lapangan usaha konstruksi, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan dimulainya pembangunan proyek *coal to methanol* akan mendorong kinerja lapangan usaha tersebut. Sementara lapangan usaha tersier juga diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan mulai beroperasinya Seksi 1 dan 5 Jalan Tol Balikpapan – Samarinda sehingga semakin memangkas waktu tempuh arus barang dan penumpang antar kedua kota tersebut.

Tabel VII.1 *Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Kaltim*

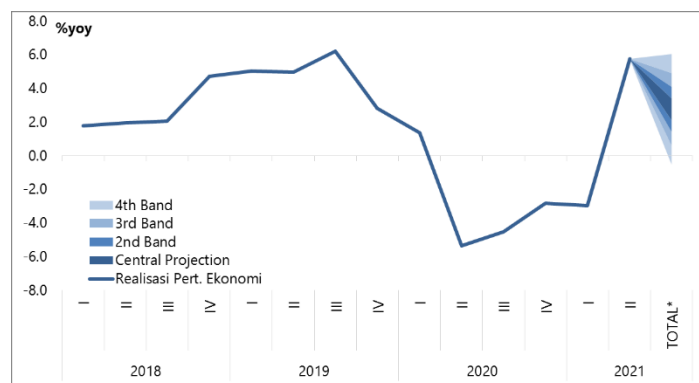
Negara	Realisasi*							IMF WEO					
								Jan-21		Apr-21		Jul-21	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022
World	3.6	3.4	3.2	3.8	3.6	2.9	-3.3	5.5	4.2	6.0	4.4	6.0	4.9
Euro	1.3	2.1	1.8	2.3	1.8	1.2	-6.6	4.2	3.6	4.4	3.8	4.6	4.3
Jepang	0.4	1.4	0.9	1.7	0.8	0.7	-4.8	3.1	2.4	3.3	2.5	2.8	3.0
Tiongkok	7.3	6.9	6.7	6.9	6.6	6.1	2.3	8.1	5.6	8.4	5.6	8.1	5.7
India	7.4	8.2	7.1	6.7	7.1	4.2	-8.0	11.5	6.8	12.5	6.9	9.5	8.5
ASEAN-5	4.6	4.8	5.0	5.3	5.2	4.8	-3.4	5.2	6.0	4.9	6.1	4.3	6.3

*) IMF menggunakan negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam untuk mewakili ASEAN. Sementara itu, Consensus Forecast menggunakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Sumber : IMF, diolah

Faktor risiko perekonomian Kalimantan Timur muncul dari sisi lambatnya perkembangan vaksinasi dan kemungkinan perkembangan mutasi lanjutan virus COVID-19 (varian Delta) di tengah potensi gangguan permintaan komoditas utama dari beberapa negara mitra. Program vaksinasi COVID-19 yang sedang dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur, menjadi *game changer* bagi pemulihan ekonomi nasional dan Kalimantan Timur. Kendala pasokan vaksin di Kaltim di tengah kembali melonjaknya kasus pada pertengahan 2021 baik di

tingkat nasional, Kaltim, maupun di sejumlah negara mitra berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi Kaltim. Melonjaknya kasus COVID-19 akibat varian Delta ini juga menyebabkan diberlakukannya pengetatan kegiatan masyarakat sehingga berisiko menghambat laju perbaikan ekonomi, seperti menurunnya permintaan minyak goreng, B30, serta konsumsi listrik. Sementara itu, terdapat risiko pada lapangan usaha batu bara yang berasal dari kendala cuaca yang dapat menghambat kinerja produksi batu bara dan pengiriman batu bara. Risiko selanjutnya berasal dari regulasi pemerintah yang membatasi ekspor dari beberapa perusahaan eksportir batu bara (akibat DMO yang tidak terpenuhi), di tengah permintaan global cukup tinggi. Selain itu, ketatnya ketersediaan kontraktor dan alat berat pertambangan batu bara juga menjadi *downside risk* pemulihan ekonomi Kaltim di tengah kenaikan kuota produksi dan tingginya harga. Pada komoditas CPO, pemberlakuan tambahan pajak impor CPO oleh India yang memperkecil gap pajak impor terhadap *soybean* diperkirakan dapat menyebabkan turunnya tingkat kompetitivitas CPO Indonesia. Sejumlah risiko tersebut berpotensi mengganggu proses pemulihan ekonomi dan menahan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut di Kalimantan Timur.



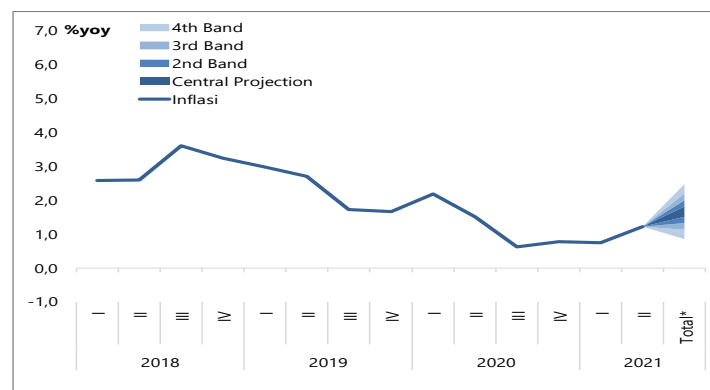
Sumber : BPS Kaltim, proyeksi Bank Indonesia.

Grafik VII.1 Realisasi & Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2021 (% yoy)

7.2 Prospek Inflasi

Inflasi Kaltim pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan pemulihan konsumsi masyarakat yang mendorong permintaan, namun tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kaltim yang mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan diperkirakan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan tekanan inflasi. Selain itu, program vaksinasi yang sedang dilakukan secara masif diharapkan dapat mendorong keyakinan masyarakat untuk perlahan kembali beraktivitas di luar rumah. Proses pemulihan

aktivitas masyarakat ini juga diperkirakan berbarengan dengan semakin membaiknya harga komoditas utama Kaltim, seperti batu bara, migas, dan CPO. Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga dapat berasal dari masih besarnya risiko terganggunya pasokan/distribusi dan mekanisme pasar seiring tingginya ketergantungan Kaltim terhadap pasokan komoditas pangan dari luar provinsi, di tengah adanya pengetatan mobilitas dalam bentuk Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Faktor risiko lainnya juga berasal dari gangguan cuaca akibat fenomena La Nina yang terjadi hingga awal triwulan II 2021 dan dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir di musim hujan akhir tahun. Tekanan inflasi juga dapat berasal dari komoditas pangan yang diperkirakan dapat berasal dari *pricing behavior* pasca COVID-19 dan mekanisme pasar yang tidak efisien, sehingga mendorong produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Selain itu, kenaikan inflasi juga diperkirakan berasal dari sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% yang mulai berlaku 1 Februari 2021, kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai.



Sumber : BPS Kaltim, proyeksi Bank Indonesia

Grafik VII.2 Realisasi & Prakiraan Inflasi Kaltim 2021 (% yoy)

Penguatan sinergi antar TPID dan antara TPID dengan para pemangku kepentingan yang lain adalah faktor kunci pengendalian inflasi di tengah ekonomi yang berada dalam proses pemulihan. Program kerja TPID Provinsi dan Kota/Kabupaten pada tahun 2021 tetap mengacu pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan ketersediaan pasokan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peta jalan pengendalian inflasi daerah. Beberapa program yang diusulkan akan dilakukan di provinsi Kaltim pada 2021 untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah dan stabil terutama pada bahan pangan strategis antara lain sebagai berikut:

- I. Penguatan produksi/pasokan, kelembagaan, dan mekanisme pasar yang lebih efisien serta kerjasama dengan daerah produsen yang mengalami surplus pangan. Penguatan

produksi/pasokan dilakukan dengan menggalakkan produksi lokal untuk tanaman pangan/hortikultura strategis penyebab inflasi. Peningkatan produksi lokal di tingkat petani dan rumah tangga perkotaan (*urban farming*) di Kaltim dilakukan sekaligus agar mampu meningkatkan pendapatannya. Penguatan pasokan juga perlu didukung dengan penguatan kelembagaan penyangga pasokan (terutama Badan Usaha Milik Daerah atau Negara) serta peningkatan efisiensi pada mekanisme pasar. Penguatan lembaga penyangga untuk stabilisasi harga pangan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan daerah produsen intra-Kaltim maupun di luar Kaltim untuk memasok ke daerah konsumen (seperti kota Samarinda dan Balikpapan sebagai kota IHK). Berbagai kerjasama ini perlu dituangkan dalam bentuk komitmen bersama/perjanjian kerjasama/MoU *Government to Government* (G2G) atau *Business to Business* (B2B). Jika sudah pernah dilakukan MoU dengan daerah produsen pangan tersebut, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait efektivitas MoU untuk memastikan bahwa MoU tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi distribusi/pasokan serta mekanisme pasar yang mendorong stabilisasi harga pangan di Kaltim.

- II. Penguatan efisiensi rantai pasok/distribusi dan mekanisme pasar juga dapat dilakukan dengan membentuk dan memperkuat sinergi semua *outlet* distribusi milik Pemda (provinsi, kabupaten, dan kota) dan Bulog di pusat-pusat perdagangan seperti Toko Tani, Pasar Tani, kios inflasi dan Rumah Pangan Kita (RPK). Sinergi semua *outlet* distribusi milik Pemerintah yang dikelola secara profesional, baik berjualan secara *offline* maupun *online*, berpotensi untuk meningkatkan persaingan yang sehat dan memotong biaya tinggi yang muncul dari rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Pada akhirnya, diharapkan agar konsumen dapat mengeluarkan harga yang lebih rendah dan petani memperoleh harga beli yang lebih tinggi. Kehadiran Toko/Pasar Tani yang menjadi outlet penjualan produk-produk segar petani lokal juga diharapkan menjadi alternatif berbelanja yang lebih segar dan terjangkau bagi masyarakat serta aman dan nyaman dikarenakan wajib menerapkan protokol kesehatan dan kemudahan bertransaksi nontunai/QRIS untuk menghindari penularan COVID-19. Lebih lanjut untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan dan mengantisipasi lonjakan inflasi, dilakukan penyediaan *cold storage* yang dikelola oleh BUMD (Perusda) atau pihak lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah dan memiliki kemampuan untuk menyediakan pasokan daging ayam dalam jumlah yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan kestabilan pasokan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan potensi bencana/hujan/banjir yang akan

mempengaruhi pasokan melalui BMKG. Kerjasama dengan BMKG diharapkan dapat memberikan prakiraan yang tepat sehingga dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyusun kebijakan dalam upaya antisipasi kondisi sehingga dapat mengendalikan tingkat inflasi Kaltim.

- III. Koordinasi secara aktif antara TPID wilayah Kaltim dengan instansi terkait dalam rangka percepatan realisasi bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta menyeimbangkan dengan potensi risiko *pricing behavior* produsen. Selain itu, dalam rangka memastikan distribusi berjalan lancar pada saat PPKM, perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Terakhir, dalam rangka meminimalisasi risiko dari struktur pasar yang masih kurang efisien sehingga rentan menyebabkan lonjakan harga yang tidak normal, khususnya di momen tertentu seperti HBKN, perlu dilakukan sidak pasar dan *market intelligence*.
- IV. Koordinasi TPID di wilayah Kaltim juga terus diperkuat dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Selain itu, pembentukan ekspektasi positif masyarakat juga terus dibangun melalui upaya penyampaian kondisi kecukupan ketersediaan pasokan pangan, penyampaian stabilitas harga melalui pembaharuan harga produk secara berkala di portal lokal (laminetam.id) dan portal nasional (hargapangan.id) serta sosialisasi budaya belanja bijak bagi masyarakat guna menghindari *panic buying* dan penimbunan bahan pangan di masa pandemi.

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Clean Money Policy

Kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan memusnahkannya serta menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Ekspor-Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to Month (mtm)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Non-Performing Loan (NPL)

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau nonlancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Purchasing Managers Index (PMI)

Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.

Year on Year (yoy)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN LAPORAN

Penanggung Jawab:

Tutuk S.H Cahyono - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim

Editor:

- Darmansjah M. Prijanto – Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim
- Ramadhani P. Guna – Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim

Tim Penulis:

- **Bab I – Perkembangan Makro Ekonomi Daerah**
Ramadhani P. Guna – Ekonom Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
 - ***BOKS 1.1 – Kelapa Sawit Sebagai The Rising Star Ekonomi Kaltim: Peluang dan Tantangan***
Ramadhani P. Guna – Ekonom Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
 - ***BOKS 1.2 – Optimalisasi Pengembangan Kawasan Ekonomi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Kaltim yang Tinggi, Berkelanjutan, dan Inklusif***
Ivan Firmanda D. – Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
Indrayana Pratama – *Liaison Officer* RIRU Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- **Bab II – Keuangan Pemerintah Daerah**
Indah Kusumaastuti – Analis Junior Kantor Perwakilan BI Balikpapan
- **Bab III – Perkembangan Inflasi Daerah**
Hanita Fitriyani – Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- **Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM**
T. Enrica Stefani Dutriandra – Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- **Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**
Ivan Firmanda D. – Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- **Bab VI – Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**
Ivan Firmanda D. – Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
Tita Ajeng P. – OJT PCPM Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
- **Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah**
Muhamad Rifki Maulana – Ekonom Junior Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim
Tio Angie P. Samosir – OJT PCPM Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

AGUSTUS 2021

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Gajah Mada No. 1 SAMARINDA 75122 | Telp. 0541 - 741022, Fax. 0541 - 732644
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>

Foto: Batu Lapis, Kabupaten Kutai Timur